



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022

MATRIKS PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.1 -

MATRIKS PEMBANGUNAN RKP TAHUN 2022

PRIORITAS NASIONAL 1 : MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PN	01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	01 - Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	01 - Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	15,7 %	44.474.152,2	
			02 - Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92,8 Nilai		
			03 - Penjaminan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan dan pemanfaatan	11 WPP		
		02 - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	01 - Rasio Kewirausahaan Nasional	3,75 %		
			02 - Pertumbuhan PDB Pertanian	3,6-4,0 %		
			03 - Pertumbuhan PDB Perikanan	8,31 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.2 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Pertumbuhan PDB industri pengolahan		5,3-5,9 %		
		05 - Kontribusi PDB industri pengolahan		19,9-20,0 %		
		06 - Nilai devisa pariwisata		10,6-11,3 US\$ Miliar		
		07 - Kontribusi PDB pariwisata		4,3 %		
		08 - Penyediaan lapangan kerja per tahun		2,3-2,8 juta orang		
		09 - Pertumbuhan investasi (PMTB)		5,4-6,9 %		
		10 - Pertumbuhan ekspor industri pengolahan		8,45 %		
		11 - Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa		4,3-6,8 %		
		12 - Rasio perpajakan terhadap PDB		8,37-8,42 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.3 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PP	01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	01 - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	01 - Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT (Kumulatif)	2 dan 5	13,90 Giga Watt (GW)	135.919,9	
			02 - Pemanfaatan <i>biofuel</i> untuk Domestik	2 dan 5	9,6 Juta Kilo Liter		
KP	01.01.01 - Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan	01 - Meningkatnya akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan	01 - Kapasitas Terpasang Tambahan Pembangkit EBT	2 dan 5	1 921,8 Mega Watt	92.522,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
PRO-P	01.01.01.01 - Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan	01 - Terlaksananya percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan	01 - Penambahan Kapasitas Terpasang Tambahan PLTA	2 dan 5	955,9 Mega Watt	92.522,0	
			02 - Penambahan Kapasitas Terpasang Tambahan PLT Panas Bumi	2 dan 5	132 Mega Watt		
			03 - Penambahan Kapasitas Terpasang Tambahan PLT Bioenergi	2 dan 5	484,8 Mega Watt		
			04 - Penambahan Kapasitas Terpasang Tambahan PLTS	2 dan 5	339,1 Mega Watt		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.4 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		05 - Kapasitas Terpasang Tambahan PLT Bayu	2 dan 5	10 Mega Watt			
KP	01.01.02 - Peningkatan Pasokan Bahan Bakar Nabati	01 - Meningkatnya pasokan bahan bakar nabati	01 - Jumlah Pemanfaatan <i>biofuel</i> untuk Domestik	5	9,6 Juta Kilo Liter	32.120,0	
PRO-P	01 01.02.01 - Akselerasi Pengembangan BBN	01 - Terlaksananya akselerasi pengembangan BBN	01 - Persentase mandatori pencampuran BBN ke dalam bahan bakar fosil	5	30 %	32.120,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT), KEMENTERIAN PERTANIAN
KP	01.01.04 - Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik	01 - Meningkatnya Pemenuhan Energi Domestik	01 - Alokasi batu bara untuk Kepentingan dalam Negeri (DMO) yang direncanakan	2	177 Juta Ton	4.994,2	
			02 - Persentase Pemanfaatan Gas Bumi Domestik	2	66 %		
PRO-P	01.01.04.01 - Pemenuhan Energi yang Kompetitif bagi Industri	01 - Terlaksananya Pemenuhan Energi yang Kompetitif	01 - Jumlah Laporan Pemenuhan Energi yang Kompetitif Bagi Industri	2	1 Laporan	4.994,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KP	01.01.05 - Pengembangan Industri Pendukung EBT	01 - Meningkatnya Pengembangan Industri Pendukung EBT	01 - TKDN sektor pembangkit EBT	2	44,6 %	2.150,3	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.5 -

PN/PP/KP/Prop	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	01.01.05.01 - Pengembangan Industri EBT	01 - Terlaksananya pengembangan Industri EBT	01 - TKDN Sektor EBT dalam rangka mendukung kemandirian energi nasional	2	55,45 Indeks Skala 100	2.150,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KP	01.01.03 - Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi	01 - Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi	01 - Intensitas Energi Primer	2	136,6 SBM/Rp Miliar	4.133,5	
			02 - Penurunan Intensitas Energi Final	2	0,9 SBM/Rp Miliar		
PRO-P	01.01.03.01 - Perluasan Penerapan Efisiensi Energi	01 - Terlaksananya perluasan penerapan efisiensi energi	01 - Persentase penyelesaian penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)	2	100 %	4.133,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PP	01.02 - Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01 - Meningkatnya kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	01 - Produktivitas air (<i>water productivity</i>)	2	3,57 m ³ /kg	14.742.538,9	
KP	01.02.01 - Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	01 - Meningkatnya pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif)	01 - Luas minimal kawasan berfungsi lindung (kumulatif)	5	65 Juta Ha	251.668,9	
PRO-P	01.02.01.01 - Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	01 - Terlaksananya inventarisasi jasa lingkungan tinggi	01 - Luas area dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	5	7 Ekoregion	44.913,5	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.6 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	01.02.01.02 - Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	01 - Terlaksananya perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional secara partisipatif	01 - Desa dalam dan sekitar kawasan konservasi	5	2 500 Desa	206.755,4	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KP	01 02.02 - Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01 - Meningkatnya pengelolaan hutan berkelanjutan	01 - Luas kawasan hutan produksi	2	34,3 Juta Ha	159.637,5	
PRO-P	01 02 02 01 - Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	01 - Terlaksananya optimalisasi hasil hutan dan jasa lingkungan	01 - Jumlah unit usaha pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan	5	30 Juta m ³	26.083,8	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PRO-P	01.02.02.02 - Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	01 - Terlaksananya penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	01 - Jumlah KPH yang difasilitasi penguatannya	5	60 KPH	133.553,7	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KP	01.02.03 - Penyediaan Air untuk Pertanian	01 - Meningkatnya penyediaan air untuk pertanian	01 - Luas lahan berrigasi untuk komoditas padi dan nonpadi	2	45.000 Ha	2.070.136,9	
PRO-P	01.02.03.01 - Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	01 - Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	5	45.000 Ha	2.070.136,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
			02 - Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	5	441.197 Ha		
KP	01.02.04 - Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas	01 - Meningkatnya penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	01 - Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan	2	1,50 m ³ /detik	418.152,9	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.7 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	01.02.04.01 - Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah	01 - Terlaksananya penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	01 - Tambahan penyediaan air baku	5	1,50 m ³ /detik	418.152,9	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KP	01.02.05 - Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	01 - Meningkatnya pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau	01 - Peningkatan tutupan hutan	2	425.000 Ha	1.458.692,2	
PRO-P	01.02.05.01 - Rehabilitasi Hutan dan Lahan	01 - Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan	01 - Luas hutan dan lahan yang terhabilitasi secara nasional	5	425.000 Ha	1.130.715,5	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PRO-P	01.02.05.02 - Revitalisasi/ Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	01 - Terlaksananya revitalisasi/ penyelamatan Danau Prioritas Nasional	01 - Perbaikan kualitas Danau Prioritas Nasional	5	15 Danau Prioritas	327.976,7	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KP	01.02.06 - Pengembangan Waduk Multiguna	01 - Berkembangnya pemanfaatan waduk multiguna	01 - Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (kumulatif)	2	16,1 miliar m ³	10.384.250,5	
			02 - Jumlah tampungan yang ditingkatkan pemanfaatannya	2	9 Unit		
PRO-P	01.02.06 01 - Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bendungan	01 - Jumlah bendungan multiguna yang selesai	5	13 unit	9.949.250,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.8 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	01.02.06.02 - Optimalisasi dan Pemanfaatan Tampungan	01 - Terlaksananya optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	01 - Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai dengan fungsi rencananya	5	9 unit	435.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
			02 - Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi dan dikembangkan manfaatnya	5	2 unit		
PP	01.03 - Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	01 - Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan	01 - Nilai Tukar Petani (NTP)	5	103-105 nilai	9.068.235,7	
			02 - Angka Kecukupan Energi (AKE)	5	2 100 Kkal/kapita/hari		
			03 - Angka Kecukupan Protein (AKP)	5	57 gram/kapita/hari		
			04 - <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	5	5,5 %		
			05 - <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	5	4,5 %		
KP	01.03.01 - Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	01 - Meningkatnya kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	01 - Konsumsi daging	5	14,1 kg/kapita/tahun	902.094,8	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.9 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Konsumsi protein asal ternak	5	10,84 gram/kapita/hari		
			03 - Konsumsi sayur dan buah	5	286,9 gram/kapita/hari		
			04 - Konsumsi ikan	5	59,53 kg/kapita/tahun		
			05 - Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	5	85-95 %		
			06 - Luas lahan produksi beras biofortifikasi	5	100 000 ha		
			07 - Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi	5	60 % Penerima BPNT		
			08 - Persentase pangsa pangan organik**	5	10 %		
PRO-P	01.03.01.01 - Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	01 - Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	01 - Konsumsi daging	5	14,1 kg/kapita/tahun	325.090,0	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
			02 - Konsumsi protein asal ternak	5	10,84 gram/kapita/hari		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.10 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			03 - Konsumsi sayur dan buah	5	286,9 gram/kapita/hari		
			04 - Konsumsi kacang-kacangan	5	27,8 gram/kapita/hari		
PRO-P	01.03.01.02 - Peningkatan Keamanan Pangan	01 - Meningkatnya keamanan pangan	01 - Rasio tindak lanjut terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di tempat pemasukan atau pengeluaran yang ditetapkan	5	93 %	241.904,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
			02 - Persentase pangan hewani yang memenuhi syarat keamanan pangan	5	82,5 %		
PRO-P	01.03.01.03 - Pengembangan Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	01 - Terlaksananya pengembangan fortifikasi dan biofortifikasi pangan	01 - Penelitian dan pengembangan biofortifikasi pangan	5	1 VUB	111.250,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
			02 - produksi padi biofortifikasi	5	560 ribu ton GKG		
PRO-P	01.03.01.04 - Pengembangan Pangan Organik	01 - Terlaksananya pengembangan pertanian organik	01 - Persentase pangsa pangan organik	5	10 %	223.850,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
KP	01 03.02 - Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok	01 - Meningkatnya ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok	01 - Penggunaan Benih Bersertifikat	5	70,0 %	2.989 276,6	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.11 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Ketersediaan Beras	5	44,0 Juta ton		
			03 - Ketersediaan Protein Hewani	5	2,7 Juta ton		
			04 - Produksi jagung	5	33,0 Juta ton		
			05 - Produksi daging	5	5,6 Juta ton		
			06 - Produksi umbi-umbian	5	24,9 Juta ton		
			07 - Produksi sayuran	5	15,01 juta ton		
			08 - Produksi buah-buahan	5	27,71 juta ton		
PRO-P	01.03.02.01 - Peningkatan Produksi Padi	01 - Meningkatnya produksi padi	01 - Pertumbuhan produktivitas padi	5	3 %	723.687,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
			02 - Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	5	5,3 %		
PRO-P	01.03.02.02 - Peningkatan Produksi Jagung	01 - Meningkatnya produksi jagung	01 - Pertumbuhan produktivitas jagung	5	1,2 %	170.321,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	01.03.02.03 - Peningkatan Produksi Kedelai	01 - Meningkatnya produksi kedelai	01 - Pertumbuhan produktivitas kedelai	5	1,1 %	5.310,0	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.12 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	01.03.02.04 - Peningkatan Produksi Daging	01 - Meningkatnya produksi daging	01 - Produksi daging	5	5,6 Juta ton	1.618.065,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	01.03.02.05 - Peningkatan Produksi Hortikultura	01 - Meningkatnya produksi hortikultura	01 - Pertumbuhan produktivitas sayuran	5	5,65 %	444.910,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
			02 - Peningkatan produktivitas buah-buahan	5	2,2 %		
PRO-P	01.03.02.06 - Peningkatan Produksi Umbi-Umbian	01 - Meningkatnya produksi umbi-umbian	01 - Pertumbuhan produktivitas ubi kayu	5	1,5 %	26.982,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
			02 - Pertumbuhan produktivitas ubi jalar	5	3,8 %		
KP	01.03.03 - Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar	01 - Meningkatnya produktivitas, kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, dan kepastian pasar	01 - Teknologi yang diterapkan oleh petani	5	75-80 %	1.414.468,5	
			02 - Nilai tambah per tenaga kerja pertanian	5	54,3 Rp juta/tenaga kerja/tahun		
PRO-P	01.03.03.01 - Asuransi Pertanian	01 - Terlaksananya asuransi pertanian	01 - Luas area yang difasilitasi asuransi usaha tani padi	5	1.000.000 ha	252.920,0	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.I.13 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Jumlah ternak yang difasilitasi asuransi usaha peternak sapi/kerbau	5	150.000 ekor		
PRO-P	01.03.03.02 - Pendidikan Pertanian	01 - Terlaksananya pendidikan pertanian	01 - Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang mendapatkan pekerjaan di sektor pertanian	1	80 %	167.784,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	01.03.03.03 - Penyuluhan dan Pendampingan Sekolah Lapang	01 - Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan sekolah lapang	01 - Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	1	80 %	671 763,7	KEMENTERIAN PERTANIAN
			02 - Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	5	20 %		
PRO-P	01.03.03.04 - Korporasi Petani	01 - Berkembangnya korporasi petani	01 - Jumlah korporasi petani yang dikembangkan	5	65 Unit	322 000,2	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KP	01.03.04 - Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, dan Digitalisasi Pertanian	01 - Meningkatnya produktivitas, keberlanjutan sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian	01 - Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	5	80 %	1.633.194,5	
			02 - Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	5	35 dan 8 Varietas unggul baru dan galur		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.14 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		03 - Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	5	4.250 Akses			
PRO-P	01.03.04.01 - Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian	01 - Terkelolanya sumber daya air pertanian	01 - Luasan rehabilitasi jaringan irigasi	5	269 884 ha	483.762,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	01.03.04.02 - Pengelolaan Sumber Daya Lahan Pertanian	01 - Terkelolanya sumber daya lahan pertanian	01 - Luas lahan sawah yang ditetapkan LP2B tiap tahunnya	5	5 920.000 ha	1.090.428,2	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PRO-P	01.03.04.03 - Peningkatan varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	01 - Meningkatnya varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	01 - Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	5	35 dan 8 Varietas unggul baru dan galur	51.484,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	01.03.04.04 - Peningkatan sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	01 - Peningkatan sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	01 - Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	5	4.250 Akses	7.520,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
KP	01.03.05 - Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional	01 - Meningkatnya tata kelola sistem pangan nasional	01 - <i>Global food security index</i>	5	66,9 Nilai	2.129.201,3	
PRO-P	01.03.05.01 - Stabilisasi Harga Pangan	01 - Stabilitasnya harga pangan strategis	01 - Koefisien Varian Harga Pangan	5	2 nilai	123.250,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	01.03.05.02 - Penanganan Rawan Pangan	01 - Menurunnya daerah rawan pangan	01 - Persentase daerah rentan rawan pangan	5	14 %	83.811,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.15 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
						TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN	
PRO-P	01.03.05.03 - Penguatan Cadangan Pangan Nasional	01 - Menguatnya cadangan pangan nasional	01 - Cadangan pangan pemerintah	5	10 %	1.887.139,7	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PRO-P	01.03.05.04 - Desain Ulang Kelembagaan Pangan Nasional	01 - Terlaksananya pembahasan desain ulang kelembagaan pangan nasional	01 - Pembahasan desain ulang kelembagaan pangan nasional	5	10 Pembahasan	35 000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
PP	01.04 - Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	01 - Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	01 - Konservasi kawasan kelautan	5	25,1 juta ha	1.714.419,9	
			02 - Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	5	≤72 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.16 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		03 - Produksi perikanan	5	29,42 juta ton			
		04 - Produksi garam	5	3,2 juta ton			
		05 - Nilai Tukar Nelayan	5	104-106 nilai			
KP	01.04.01 - Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut	01 - Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	01 - Pengelola WPP	5	11 Unit	67.250,0	
		02 - Akurasi pendataan <i>stock</i> dan pemanfaatan WPP	4	11 WPP			
		03 - Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	4	31 RZ			
PRO-P	01 04.01.01 - Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	01 - Terlaksananya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	01 - Jumlah model percontohan penguatan tata kelola WPP	4	7 WPP	15.600,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P	01.04.01.02 - Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir	01 - Terlaksananya penataan ruang laut dan Rencana Zonasi Pesisir	01 - Jumlah KSN dan KSNT yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT dan antarwilayah laut	5	22 RZ	44.800,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.17 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	01.04.01.03 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	01 - Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang laut	01 - Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah	5	34 lokasi	6.850,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KP	01.04.02 - Peningkatan Ekosistem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	01 - Meningkatnya ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan	01 - Jumlah kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	5	17.500.000 Hektar	17.400,0	
PRO-P	01.04.02.01 - Pengembangan Wisata Bahari dan Jasa Maritim	01 - Terlaksananya pengembangan wisata bahari dan jasa maritim	01 - Jumlah kawasan wisata bahari dan BMKT yang terkelola	5	12 kawasan	12.600,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P	01.04.02.02 - Pengembangan <i>Marine Bioproduct</i> dan Bioteknologi	01 - Terlaksananya pengembangan <i>marine bioproduct</i> dan bioteknologi	01 - Jumlah bioteknologi dan biofarmakologi yang dikembangkan	5	8 paket	4.800,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KP	01.04.03 - Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	01 - Meningkatnya produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	01 - Produksi ikan	5	17,57 juta ton	1.421.206,8	
			02 - Produksi rumput laut	5	11,8 juta ton		
PRO-P	01.04.03.01 - Peningkatan Produksi Perikanan	01 - Meningkatnya produksi perikanan	01 - Produksi ikan tangkap	5	8,88 juta ton	1.262.349,1	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERDAGANGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.18 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Produksi ikan budidaya	5	8,69 juta ton		
PRO-P	01.04.03.02 - Peningkatan Produksi Rumput Laut	01 - Meningkatnya produksi rumput laut	01 - Jumlah produksi rumput laut	5	11,8 juta ton	23.200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P	01.04.03.03 - Peningkatan Produksi Garam	01 - Meningkatnya produksi garam	01 - Jumlah produksi garam	5	3,2 juta ton	80.761,8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
PRO-P	01.04.03.04 - Karantina Ikan dan Jaminan Mutu	01 - Terlaksananya karantina ikan dan jaminan mutu	01 - Persentase pencegahan impor, ekspor, antararea jenis ikan yang dilarang, dilindungi, dan dibatasi	5	90 %	54.895,9	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KP	01.04.04 - Peningkatan Fasilitas Usaha, Pembiayaan, dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil serta Akses terhadap Pengelolaan Sumber Daya	01 - Meningkatnya fasilitas usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	01 - Jumlah pendanaan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil	5	3,6 Rp triliun	72.782,5	
			02 - Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	5	103 indeks		
PRO-P	01.04.04.01 - Peningkatan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	01 - Meningkatnya perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan	01 - Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan yang terlindungi	5	126.500 orang	27.950,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.19 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	01.04.04.02 - Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	01 - Terlaksananya peningkatan akses pembiayaan usaha perikanan	01 - Sertifikasi tanah nelayan dan lahan budidaya	5	12.500 Bidang	24.707,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P	01.04.04.03 - Penataan Perizinan Kelautan dan Perikanan	01 - Terlaksananya penataan perizinan kelautan dan perikanan	01 - Integrasi sistem perizinan pusat-daerah	4	34 Provinsi	20 125,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KP	01.04.05 - Peningkatan SDM dan Riset Kemaritiman dan Kelautan serta <i>Database</i> Kelautan dan Perikanan	01 - Meningkatnya SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta <i>database</i> kelautan	01 - Jumlah hasil riset yang diadopsi/diterapkan	5	11 Hasil Riset	135.780,6	
PRO-P	01.04.05.01 - Peningkatan SDM Kelautan dan Perikanan	01 - Terlaksananya peningkatan SDM kelautan dan perikanan	01 - Jumlah masyarakat yang disuluh	1	410.000 Orang	107 858,1	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P	01.04.05.02 - Penguatan Inovasi Teknologi dan Riset Kelautan dan Perikanan	01 - Terlaksananya penguatan inovasi teknologi dan riset kelautan dan perikanan	01 - Jumlah sarana riset kelautan dan perikanan yang dikembangkan	5	13 unit	27.922,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PP	01 05 - Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	01 - Menguatnya kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM) dan koperasi	01 - Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal	1 dan 5	27,80 %	1.902.677,0	
			02 - Pertumbuhan wirausaha	1	3,00 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.20 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
			03 - Kontribusi koperasi terhadap PDB	1 dan 5	5,30 %		
KP	01.05.01 - Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	01 - Meningkatnya kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	01 - Proporsi IMK (Industri Mikro Kecil) yang menjalin kemitraan	1 dan 5	9,5 %	291.278,0	
			02 - IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	5	190 IKM (Kumulatif)		
PRO-P	01.05.01.01 - Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk	01 - Terlaksananya pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk	01 - Jumlah UMKM yang dikembangkan kapasitas usahanya	1 dan 5	7.990 UMKM	197.597,4	BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN), KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PRO-P	01.05.01.02 - Perluasan Kemitraan Usaha	01 - Terlaksananya perluasan kemitraan usaha	01 - Jumlah UMKM yang diperluas cakupan kemitraannya	1 dan 5	777 UMKM	45.609,7	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.21 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	01.05.01 03 - Penguatan Kapasitas Kelembagaan untuk Bermitra	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas kelembagaan untuk bermitra	01 - Jumlah UMKM yang ditingkatkan kapasitas usahanya	1 dan 5	500 UMKM	48.070,9	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN KEUANGAN
KP	01.05.02 - Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha	01 - Meningkatnya kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	01 - Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	5	20,9 %	132.320,7	
			02 - Proporsi IKM dengan pinjaman/kredit	5	3,4 %		
			03 - Proporsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi	5	70 %		
PRO-P	01.05.02.01 - Dukungan Pemberian Modal Awal Usaha	01 - Terlaksananya dukungan pemberian modal awal usaha	01 - Jumlah wirausaha pemula yang mendapat modal usaha	5	6 900 Orang	113.622,1	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	01.05.02.02 - Pendampingan UMKM untuk Mengakses Kredit	01 - Terlaksananya pendampingan UMKM untuk mengakses kredit	01 - Jumlah UMKM yang didampingi mengakses kredit/pembiayaan	5	10.000 UMKM	15.198,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PRO-P	01.05.02.03 - Pengembangan Skema Pembiayaan bagi Wirausaha dan UMKM	01 - Terlaksananya pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM	01 - Jumlah UMKM yang dikembangkan skema pembiayaannya	5	850 UMKM	3 500,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.22 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
KP	01.05.03 - Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi	01 - Meningkatnya kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	01 - Jumlah koperasi modern yang dikembangkan	5	200 Unit (Kumulatif)	46.418,9	
PRO-P	01.05.03.01 - Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Manajer Koperasi	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi koperasi	01 - Jumlah pengurus dan pengelola koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	1 dan 5	2.300 Orang	20.070,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PRO-P	01.05.03.03 - Pengembangan Jangkauan dan Cakupan Usaha	01 - Terlaksananya pengembangan jangkauan dan cakupan usaha kepada koperasi	01 - Jumlah koperasi yang dikembangkan jangkauan dan cakupan usahanya	5	525 Koperasi	9.697,2	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PRO-P	01.05.03.04 - Pengembangan Inovasi Koperasi	01 - Terlaksananya pengembangan inovasi kepada koperasi	01 - Jumlah koperasi yang dikembangkan untuk berinovasi	5	225 Koperasi	4.651,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PRO-P	01.05.03.02 - Pendampingan Kelompok untuk Membentuk Koperasi	01 - Terlaksananya pendampingan kepada masyarakat untuk membentuk koperasi	01 - Jumlah orang/masyarakat yang didampingi membentuk koperasi	1 dan 5	3.000 Orang	12.000,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KP	01.05.04 - Peningkatan Penciptaan <i>Start-Up</i> dan Peluang Usaha	01 - Meningkatnya penciptaan <i>start-up</i> dan peluang usaha	01 - Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri	5	19,3 %	1.412.832,1	
			02 - Penumbuhan <i>start-up</i>	5	2.100 <i>Startup</i> (Kumulatif)		
			03 - Jumlah Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	5	12.000 WUB		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.23 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	01.05.04.01 - Pelatihan Kewirausahaan	01 - Terlaksananya pelatihan kepada wirausaha atau calon wirausaha	01 - Jumlah wirausaha yang dilatih	1 dan 5	82.400 Orang	706.404,2	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI), KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	01.05.04.02 - Inkubasi Usaha	01 - Terlaksananya inkubasi kepada wirausaha	01 - Jumlah wirausaha yang diinkubasi	1 dan 5	200 Orang	80.500,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PRO-P	01.05.04.03 - Penguatan Kapasitas Layanan Usaha	01 - Terlaksananya layanan pengembangan Usaha kepada UMKM	01 - Jumlah UMKM yang mendapat layanan usaha	5	7.170 UMKM	572.652,1	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	01.05.04.04 - Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah	01 - Terlaksananya pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah	01 - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	5	30 Sentra IKM (Kumulatif)	11.341,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PRO-P	01.05.04.05 - Pembinaan Wirausaha Mapan	01 - Meningkatnya jumlah wirausaha mapan	01 - Jumlah wirausaha mapan yang terbentuk	1 dan 5	100 Orang	41.934,8	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.24 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
						PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	
	02 - Meningkatnya jumlah wirausaha mapan yang memperoleh dukungan akses pasar	01 - Jumlah wirausaha mapan yang mendapatkan dukungan akses pasar	1 dan 5	600 UMKM			
KP	01.05.05 - Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	01 - Meningkatnya nilai tambah usaha sosial	01 - Kontribusi usaha sosial	5	2,2 %	19.827,3	
PRO-P	01.05.05.01 - Pembinaan Wirausaha Sosial	01 - Terlaksananya pembinaan wirausaha sosial	01 - Jumlah lembaga yang membina wirausaha sosial	5	44 Lembaga	14.442,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PRO-P	01.05.05.02 - Pembinaan Usaha Berdampak Sosial dan Lingkungan	01 - Meningkatnya jumlah usaha yang memiliki dampak sosial atau dampak lingkungan	01 - Jumlah unit usaha yang dibina	1 dan 5	300 Unit	5.385,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PP	01.06 - Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01 - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01 - Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	5	5,3-6,1 %	13.942.042,5	
			02 - Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas	5	18,0 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.25 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		03 - Nilai tambah ekonomi kreatif	5	1.398,0 Rp Triliun			
		04 - Jumlah tenaga kerja industri pengolahan	5	20,9 juta orang			
		05 - Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	5	15,00 %			
		06 - Jumlah tenaga kerja pariwisata	5	14,7 juta orang			
		07 - Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	5	18,6 juta orang			
		08 - Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia/EODB	5	51 peringkat			
		09 - Nilai Realisasi PMA dan PMDN	5	968,4 Rp Triliun			
		10 - Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan	5	352,5 Rp Triliun			
		11 - Pertumbuhan PDB Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	5	3,6 - 3,8 %			
KP	01.06.01 - Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	01 - Meningkatnya industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir	01 - Pertumbuhan PDB Perkebunan	5	4,98 %	2.264.592,4	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.26 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		02 - Pertumbuhan PDB Hortikultura	5	5,9 %			
		03 - Pertumbuhan PDB Subsektor industri makanan dan minuman	5	5,3-5,8 %			
PRO-P	01.06.01.01 - Pengembangan Industri Berbasis Perkebunan	01 - Terlaksananya pengembangan industri berbasis perkebunan	01 - Peningkatan Produksi Kakao	5	2,5 %	1.038.797,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
		02 - Peningkatan Produksi Kopi	5	1,48 %			
		03 - Peningkatan Produksi Kelapa Sawit	5	5,93 %			
		04 - Peningkatan Produksi Kelapa	5	0,7 %			
		05 - Peningkatan Produksi Karet	5	0,9 %			
		06 - Peningkatan Produksi Sagu	5	4,5 %			
		07 - Peningkatan Produksi Tebu	5	6,0 %			
		08 - Peningkatan Produksi Lada	5	0,1 %			
		09 - Peningkatan Produksi Pala	5	0,1 %			
		10 - Peningkatan Produksi Cengkeh	5	0,1 %			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.27 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	01.06.01.02 - Pengembangan Industri Berbasis Pertanian Pangan	01 - Terlaksananya pengembangan industri berbasis pertanian pangan	01 - Peningkatan Produksi Sayuran	5	2,9 %	958.474,9	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KEUANGAN
			02 - Peningkatan Produksi Buah-Buahan	5	4,7 %		
			03 - Peningkatan Produksi Florikultura	5	5,3 %		
PRO-P	01.06.01.03 - Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	01 - Terlaksananya pengembangan industri berbasis kehutanan	01 - Penumbuhan PDB industri furnitur	5	6,0-7,0 %	10.730,1	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PRO-P	01.06.01.04 - Pengembangan Industri Kemaritiman	01 - Terlaksananya pengembangan industri kemaritiman	01 - Pertumbuhan PDB Perikanan	5	8,31 %	215.780,7	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PRO-P	01.06.01.05 - Pengembangan Industri Kimia, Farmasi dan Logam	01 - Terlaksananya pengembangan industri kimia, farmasi dan logam	01 - Pertumbuhan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	5	9,8-10,5 %	40 808,8	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KP	01 06.02 - Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa	01 - Meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	01 - Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasilitasi	5	11 KI-KEK Industri	1.595 166,7	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.28 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	01.06.02.01 - Pengembangan Kawasan Industri dan Smelter secara Terintegrasi	01 - Terlaksananya pengembangan kawasan industri dan smelter secara terintegrasi	01 - Pertumbuhan PDB industri logam dasar	5	9,5-11,0 %	1.573.345,8	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (KPBU), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PRO-P	01.06.02.02 - Pemanfaatan Mineral dan batu bara untuk Peningkatan Nilai Tambah	01 - Terlaksananya pemanfaatan mineral dan batu bara untuk peningkatan nilai tambah	01 - Indeks pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri	5	77,63 %	21.820,8	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			02 - Rasio pemanfaatan batu bara untuk peningkatan nilai tambah batu bara	5	50 %		
KP	01.06.03 - Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01 - Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	01 - Destinasi pariwisata prioritas yang dipercepat pengembangannya	5	10 destinasi	9.289.734,4	
			02 - Revitalisasi destinasi Bali	5	1 destinasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.29 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		03 - Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas	5	25 unit			
		04 - Destinasi wisata berbasis <i>geopark</i>	5	16 destinasi			
		05 - Destinasi wisata bahari	5	6 destinasi			
PRO-P	01 06 03.01 - Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	01 - Terlaksananya pengembangan 25 kawasan hutan untuk mendukung destinasi pariwisata prioritas	01 - Jumlah destinasi wisata alam prioritas	5	25 destinasi	57 611,3	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PRO-P	01.06.03.02 - Peningkatan Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi, serta Daya Dukung Destinasi Pariwisata	01 - Terlaksananya peningkatan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi serta daya dukung destinasi pariwisata	01 - Jumlah destinasi pariwisata yang ditingkatkan aksesibilitasnya, amenitas, atraksi, serta daya dukungnya	5	10 destinasi	9.053.475,5	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.30 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
						RUANG/BPN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPBU), KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (KPBU)	
PRO-P	01.06.03.03 - Penguatan Rantai Pasok Industri dan Kapasitas Masyarakat, termasuk Melalui Desa Wisata	01 - Terlaksananya penguatan rantai pasok industri dan kapasitas masyarakat, termasuk melalui desa wisata	01 - Jumlah penguatan rantai pasok industri dan kapasitas masyarakat, termasuk melalui desa wisata	5	13 destinasi/provinsi	52.278,4	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	01.06.03.04 - Pengelolaan dan Standar Layanan Destinasi Pariwisata	01 - Terlaksananya pengelolaan dan standar layanan destinasi pariwisata	01 - Jumlah pengelolaan dan standar layanan destinasi pariwisata	5	3 destinasi	116.700,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PRO-P	01.06.03.05 - Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata Geopark	01 - Terlaksananya pengembangan 16 Geopark untuk mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	01 - Jumlah koordinasi pengembangan geopark	5	1 kegiatan	9.669,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
KP	01.06.04 - Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	01 - Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif	5	3,78 %	187.732,0	
			02 - Pertumbuhan PDB informasi dan komunikasi	5	9,75-10,28 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.31 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	01.06.04.01 - Penyediaan Insentif Inovasi dan Pengembangan <i>Brand</i>	01 - Terlaksananya Penyediaan Insentif Inovasi dan Pengembangan <i>Brand</i>	01 - Jumlah skema insentif inovasi dan pengembangan <i>brand</i>	4	3 skema	3.340,8	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PRO-P	01.06.04.02 - Penyediaan Insentif Penerapan dan Komersialisasi HKI	01 - Terlaksananya Penyediaan Insentif Penerapan dan Komersialisasi HKI	01 - Jumlah Penyediaan Insentif Penerapan dan Komersialisasi HKI	5	860 kegiatan	8.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PRO-P	01.06.04.03 - Fasilitas Rantai Pasok dan <i>Scale-up</i> Karya dan Platform Kreatif Unggulan	01 - Terlaksananya Fasilitas Rantai Pasok dan <i>Scale-up</i> Karya dan Platform Kreatif Unggulan	01 - Jumlah Fasilitas Rantai Pasok dan <i>Scale-up</i> Karya dan Platform Kreatif Unggulan	5	51 Kerja sama	6.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PRO-P	01.06.04.04 - Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Kota Kreatif	01 - Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Kota Kreatif	01 - Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kota Kreatif	5	2 kawasan	53.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PRO-P	01.06.04.05 - Pengembangan 'Start-Up Parks' dan <i>Center of Excellence</i>	01 - Terlaksananya Pengembangan 'Start-Up Parks' dan <i>Center of Excellence</i>	01 - Jumlah 'Start-Up Parks' dan <i>Center of Excellence</i> yang dikembangkan	5	1 kerja sama	10.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PRO-P	01.06.04.06 - Pengembangan Pendampingan dan Inkubasi di Ruang Kreatif	01 - Terlaksananya Pengembangan Pendampingan dan Inkubasi di Ruang Kreatif	01 - Jumlah Pengembangan Pendampingan dan Inkubasi di Ruang Kreatif	5	497 kegiatan	106.391,2	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.32 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	01.06.04.07 - Pengembangan Kawasan <i>Be Creative District</i> (BCD)	01 - Terlaksananya Pengembangan Kawasan <i>Be Creative District</i> (BCD)	01 - Jumlah Kawasan <i>Be Creative District</i> (BCD) yang dikembangkan	5	1 Kegiatan	1 000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KP	01.06.05 - Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	01 - Terlaksananya perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	01 - Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN	5	48,3 %	604.017,0	
			02 - Kontribusi realisasi investasi luar Jawa	5	47,4 %		
PRO-P	01.06.05.01 - Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi	01 - Terlaksananya kepastian hukum berusaha dan investasi	01 - Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi	5	1 usulan rekomendasi	45.993,8	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
PRO-P	01 06 05.02 - Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi	01 - Terlaksananya fasilitasi kemudahan usaha dan investasi	01 - Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di wilayah I,II,III dan IV	5	113 perusahaan	264.532,6	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.33 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	01.06.05.03 - Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	01 - Meningkatnya jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial pada perusahaan	01 - Perusahaan Besar dan Menengah yang Mendapatkan Pemahaman Tata Cara Pengesahan ePP	5	1.500 Badan Usaha	293 490,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI), BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KP	01.06.06 - Pengembangan Industri Halal	01 - Terlaksananya pengembangan industri halal	01 - Jumlah sektor industri halal yang difasilitasi	5	3 sektor industri	800,0	
PRO-P	01.06.06.01 - Pengembangan Infrastruktur Industri Halal	01 - Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Industri Halal	01 - Jumlah Kawasan Industri Tematik yang difasilitasi	5	3 Kawasan Industri	800,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PP	01.07 - Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01- Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01 - Neraca perdagangan	5	17,6-20,4 US\$ Miliar	839.008,0	
			02 - Pertumbuhan ekspor nonmigas	5	3,7-5,5 %		
			03 - Jumlah wisatawan mancanegara	5	8,5 - 10,5 juta kunjungan		
			04 - Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	5	260-280 juta perjalanan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.34 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Nilai ekspor hasil perikanan	5	7,13 US\$ Miliar		
		06 - Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi	5	8,2-10,1 %		
KP	01.07.01 - Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	01 - Meningkatnya diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa	01 - Pertumbuhan ekspor pertanian	5	9,0 - 10,0 %	199 638,6
		02 - Ekspor hasil pertanian (fob)	5	4,3 US\$ Miliar		
		03 - Kontribusi ekspor industri pengolahan	5	77 %		
		04 - Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi (komputer, instrumen ilmiah, mesin listrik, dirgantara)	5	10,79 %		
		05 - Rasio ekspor jasa terhadap PDB	5	2,0-2,2 %		
		06 - Nilai ekspor produk industri kehutanan	5	9,75 US\$ Miliar		
		07 - Nilai ekspor industri pengolahan	5	151,9 US\$ Miliar		
		08 - Nilai ekspor produk rempah-rempah	5	1.470,17 US\$ Juta		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.35 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	01.07.01.01 - Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor dan Jasa	01 - Terlaksananya peningkatan diversifikasi produk ekspor dan jasa	01 - Jumlah perusahaan yang difasilitasi bantuan permesinan	5	36 perusahaan	156.670,8	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PRO-P	01.07.01.02 - Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa	01 - Terlaksananya peningkatan nilai tambah produk ekspor dan jasa	01 - Jumlah produk ekspor yang diberikan fasilitasi pengembangan produk	5	140 produk	42.967,8	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
			02 - Jumlah restoran Indonesia di luar negeri	5	2.000 unit		
KP	01.07.02 - Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor	01 - Meningkatnya akses dan pendalaman pasar ekspor	01 - Jumlah negara tujuan ekspor	5	221 negara	126.515,8	
			02 - Pangsa pasar ekspor produk Indonesia di kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur	5	1,8 %		
			03 - Pangsa pasar ekspor produk Indonesia di pasar tradisional	5	3,60 %		
PRO-P	01.07.02.01 - Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	01 - Terlaksananya peningkatan pangsa pasar produk Indonesia	01 - Jumlah kegiatan promosi, pencitraan dan misi dagang	5	54 kegiatan promosi	57.386,1	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PRO-P	01.07.02.02 - Fasilitasi Ekspor	01 - Terlaksananya fasilitasi ekspor	01 - Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi ekspor (pelayanan ekspor-impor melalui INATRADE, pelayanan SKA, dan fasilitasi pembiayaan perdagangan)	5	1.009.020 Badan Usaha	39.814,6	KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.36 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
						EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
PRO-P	01.07.02.03 - Peningkatan Daya Saing Industri Guna Mendorong Peningkatan Ekspor	01 - Terlaksananya peningkatan daya saing industri guna mendorong peningkatan ekspor	01 - Nilai ekspor produk industri sektor ILMATE	5	42,88 US\$ Miliar	29.315,1	BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN), KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			02 - Nilai ekspor produk industri sektor Agro	5	62,55 US\$ Miliar		
			03 - Nilai ekspor produk industri IKFT	5	38,42 US\$ Miliar		
			04 - Nilai ekspor produk industri aneka	5	9,84 US\$ Miliar		
KP	01.07.03 - Pengelolaan Impor	01 - Meningkatnya pengelolaan impor	01 - Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	5	50,9 %	4 093,9	
PRO-P	01.07.03.01 - Penguatan Kebijakan Perlindungan Akses Pasar Dalam Negeri	01 - Terlaksananya penguatan kebijakan perlindungan akses pasar dalam negeri	01 - Jumlah pengawasan <i>post border</i>	5	735 berita acara	4 093,9	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
KP	01 07 04 - Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif	01 - Meningkatnya kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif	01 - Produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku	5	7.130 produk (kumulatif)	27 406,2	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.37 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	01.07.04.01 - Pengembangan Sistem Katalog	01 - Terlaksananya pengembangan sistem katalog	01 - Jumlah katalog produk dalam negeri	5	40 katalog	27.406,2	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
KP	01.07.05 - Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global	01 - Meningkatnya partisipasi dalam jaringan produksi global	01 - Jumlah kesepakatan industri dalam jaringan produksi global	5	2 Kesepakatan	20.250,0	
PRO-P	01.07.05.01 - Peningkatan Investasi (<i>Inbound & Outbound</i>) Industri GPN Berbasis Hilirisasi SDA, Teknologi Tinggi	01 - Terlaksananya peningkatan investasi (<i>inbound</i> dan <i>outbound</i>) industri GPN berbasis hilirisasi SDA teknologi tinggi	01 - Jumlah perusahaan yang difasilitasi kemitraan dalam <i>global value chain</i>	5	7 Badan Usaha	20.250,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KP	01.07.06 - Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi <i>Branding</i> , dan Produk Kreatif	01 - Meningkatnya citra dan diversifikasi pemasaran, destinasi pariwisata prioritas dan destinasi <i>branding</i> , dan produk kreatif	01 - Jumlah <i>branding</i> 'Wonderful Indonesia'	5	10 destinasi <i>branding</i>	306.020,2	
			02 - Nilai ekspor ekonomi kreatif	5	18,08 US\$ Miliar		
			03 - Jumlah warisan budaya yang diregenerasi (<i>cultural heritage regeneration</i>)	5	2 lokasi		
PRO-P	01.07.06.01 - <i>Branding</i> 'Wonderful Indonesia'	01 - Terlaksananya <i>branding</i> 'Wonderful Indonesia'	01 - Jumlah media <i>branding</i>	5	4 media	175.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.38 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	01.07.06.02 - Pendalaman Pasar Tradisional dan Diversifikasi Pemasaran ke Pasar Baru	01 - Terlaksananya pendalaman pasar tradisional dan diversifikasi pemasaran ke pasar baru	01 - Jumlah pendalaman pasar tradisional dan diversifikasi pemasaran ke pasar baru	5	3 regional pemasaran	79.646,3	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PRO-P	01.07.06.03 - Perluasan Pemasaran Produk Kreatif, termasuk Melalui e-Commerce	01 - Terlaksananya perluasan pemasaran produk kreatif, termasuk melalui e-commerce	01 - Jumlah Pendukung/Fasilitas pada Pelaku Ekonomi Kreatif	5	1 Promosi	-	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PRO-P	01.07.06.04 - Perluasan Diklat Manajemen Usaha dan Pemasaran	01 - Terlaksananya perluasan diklat manajemen usaha dan pemasaran	01 - Jumlah diklat manajemen usaha dan pemasaran	1 dan 5	13.000 orang	51.374,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KP	01.07.07 - Peningkatan Efektivitas <i>Preferential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)</i> dan Diplomasi Ekonomi	01 - Meningkatnya efektivitas <i>Preferential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)</i> dan Diplomasi Ekonomi	01 - Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	5	94 negara	155.083,4	
			02 - Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	5	88 negara		
			03 - Jumlah ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional	5	4 ratifikasi		
			04 - Jumlah promosi <i>Tourism, Trade, and Investment (TTI)</i> terintegrasi	5	9 promosi terintegrasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.39 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		05 - PTA/FTA/CEPA yang disepakati	5	30 (kumulatif) kesepakatan			
PRO-P	01.07.07.01 - Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (Negosiator) dan Kelembagaan Perwakilan RI di Luar Negeri termasuk FTA Center	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM (negosiator) dan kelembagaan perwakilan RI di luar negeri, termasuk FTA Center	01 - Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas negosiator	5	87 Orang	378,3	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PRO-P	01.07.07.02 - Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerja sama Ekonomi Internasional	01 - Terlaksananya peningkatan kesepakatan dan penyelesaian proses ratifikasi kerja sama ekonomi internasional	01 - Jumlah kesepakatan dan penyelesaian proses ratifikasi kerja sama ekonomi internasional	5	48 dokumen	54.433,7	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PRO-P	01.07.07.03 - Promosi Terintegrasi	01 - Terlaksananya promosi terintegrasi	01 - Jumlah promosi terintegrasi	5	9 pameran	100.271,4	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PP	01.08 - Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	01 - Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	01 - Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB	5	4,53 %	2.129.310,4	
		02 - Skor <i>Logistic Performance Index</i>	5	3,40 Skor			
		03 - Rasio M2/PDB	5	46,9-47,5 %			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.40 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		04 - Peringkat <i>travel and tourism competitiveness index</i>	5	36-39 Peringkat			
		05 - Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (<i>core tax administration system</i>)	5	48,05 %			
		06 - Imbal hasil (<i>yield</i>) surat berharga negara	5	Menurun %			
		07 - Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	5	28,94 %			
KP	01.08.01 - Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	01 - Meningkatnya pendalaman sektor keuangan	01 - Rasio Kredit/PDB	5	34,0-34,7 %	3.159,6	
			02 - Jumlah mesin ATM per 100.000 penduduk dewasa	5	56,7 Unit		
			03 - Jumlah Kantor Layanan Bank per 100.000 Penduduk Dewasa	5	15,3 Unit		
			04 - Skema Pembiayaan Berbasis HKI	5	1 Skema		
PRO-P	01 08 01.01 - Peningkatan Inklusi Keuangan, Inovasi Sektor Keuangan, dengan Menjaga Stabilitas dan Integritas Sistem Keuangan	01 - Terlaksananya peningkatan inklusi keuangan, inovasi sektor keuangan, dengan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan	01 - Indeks inklusi keuangan	5	85 %	1.959,6	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KEUANGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.41 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	01.08.01.02 - Peningkatan Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan Pemerintah	01 - Terlaksananya Peningkatan Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan Pemerintah	01 - <i>Turnover</i> rasio SBN	5	5,02 %	1.200,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KP	01.08.02 - Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0	01 - Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0	01 - Kontribusi ekonomi digital	5	5,32 %	128.906,9	
			02 - Nilai transaksi <i>e-commerce</i> .	5	689,5 Rp Triliun		
PRO-P	01.08.02.01 - Penguatan Industri <i>Fintech</i> , <i>e-Commerce</i> , <i>On-Demand Service</i> , dan <i>Internet Of Things</i>	01 - Jumlah fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mendapat pelatihan (Fasilitator)	01 - Jumlah fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mendapat pelatihan (Fasilitator)	5	160 Orang	7.223,3	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PRO-P	01.08.02.02 - Modernisasi Industri Hingga 4.0 Sesuai Karakteristik Industri	01 - Terlaksananya modernisasi industri hingga 4.0 sesuai karakteristik industri	01 - Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia <i>Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) > 3.0	5	45 perusahaan	121.683,6	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KP	01.08.03 - Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	01 - Meningkatnya Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	01 - Skor <i>Logistic Performance Index</i>	5	3,4 Indeks	500.127,9	
			02 - Tingkat Inflasi	5	2,0-4,0 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.42 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	01.08.03.01 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik	01 - Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pendukung efisiensi sistem logistik	01 - Jumlah sarana prasarana pendukung efisiensi distribusi yang dibangun	5	87 unit	492.361,9	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PRO-P	01.08.03.02 - Pengendalian Inflasi	01 - Terjaganya inflasi pangan bergejolak	01 - Tingkat inflasi pangan bergejolak	5	2,1-4,1 %	7.766,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
KP	01.08.04 - Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata	01 - Meningkatnya penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata	01 - Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau	5	5 %	78.828,7	
			02 - Jumlah lokasi penerapan <i>sustainable tourism development</i>	5	11 Lokasi		
PRO-P	01.08.04.01 - Penerapan Standar Pariwisata Berkelanjutan	01 - Jumlah destinasi dengan penerapan standar pariwisata berkelanjutan (destinasi)	01 - Jumlah destinasi dengan penerapan standar pariwisata berkelanjutan (destinasi)	5	11 Destinasi	61.050,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PRO-P	01.08.04.02 - Penerapan Industri Hijau	01 - Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	01 - Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	5	46 perusahaan	17.778,7	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.43 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
KP	01.08.05 - Reformasi Fiskal	01 - Terlaksananya Reformasi Fiskal	01 - Persentase Realisasi Penerimaan Negara	5	100 %	683.729,2	
PRO-P	01.08.05.01 - Pembaruan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan yang Andal dan Terintegrasi	01 - Terlaksananya pembaruan sistem informasi administrasi perpajakan yang andal dan terintegrasi	01 - Penyelesaian modul <i>core tax system</i>	5	9 Modul	644.952,6	KEMENTERIAN KEUANGAN
PRO-P	01.08.05.03 - Perumusan Kebijakan Terkait Pembiayaan	01 - Terlaksananya Rekomendasi Pengembangan Pembiayaan	01 - Persentase Terlaksananya Rekomendasi Pengembangan Pembiayaan	5	100 %	21.248,5	KEMENTERIAN KEUANGAN
PRO-P	01.08.05.04 - Pengembangan Sistem Pembayaran	01 - Terlaksananya Pengembangan Sistem Pembayaran	01 - Persentase Terlaksananya Pengembangan Sistem Pembayaran	5	100 %	16.454,9	KEMENTERIAN KEUANGAN
PRO-P	01.08.05.05 - Pembangunan dan Pengembangan <i>Data Analytic</i>	01 - Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan <i>Data Analytic</i>	01 - Persentase Pembangunan dan Pengembangan <i>Data Analytic</i>	5	100 %	1.073,2	KEMENTERIAN KEUANGAN
KP	01.08.06 - Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	01 - Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	01 - Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif	5	3 Database	734.558,0	
			02 - Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan data pangan	5	3 Database		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.44 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	01.08.06.01 - Pengembangan Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	01 - Terlaksananya pengembangan statistik pariwisata dan ekonomi kreatif	01 - Jumlah publikasi/laporan statistik pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan	5	3 Database	13.780,3	BADAN PUSAT STATISTIK, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PRO-P	01.08.06.03 - Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan Perbaikan Statistik Pangan	01 - Terlaksanakannya Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan Statistik Pangan	01 - Jumlah publikasi/laporan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan statistik pangan	5	3 Database	720.777,8	BADAN PUSAT STATISTIK

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- 2) Rincian pada masing-masing prioritas nasional masih terus akan dilakukan penajaman dan pendalaman kesiapan pelaksanaan. Beberapa proyek yang masih terpusat (alokasi dan lokusnya) akan terus dipertajam alokasi dan distribusi lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota nya. Untuk proyek yang mendukung lintas PP/KP/ProP dalam 1 PN, alokasi hanya di munculkan 1 (satu) kali;
- 3) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L dan KPBU, belum mencakup dukungan Transfer Ke Daerah dan Badan Usaha (BUMN/Swasta). Identifikasi dan integrasi antar instansi dan sumber pendanaan (K/L, Transfer Ke Daerah, KPBU dan Badan Usaha) akan terus dilakukan sampai dengan Pemutakhiran RKP dan APBN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.1 -

PRIORITAS NASIONAL 2 : MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PN	02 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)		01 - Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI	5,78—6,53 % per tahun	94.676.446,4	
				02 - IPM KTI	62,06—78,11 nilai minimum—nilai maksimum		
				03 - Persentase penduduk miskin KTI	10,97 %		
		02 - Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)		01 - Laju pertumbuhan PDRB KBI	4,99—5,68 % per tahun		
				02 - IPM KBI	70,51—82,99 nilai minimum—nilai maksimum		
				03 - Persentase penduduk miskin KBI	8,64 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.2 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PP	02.01 - Pembangunan Wilayah Sumatera	01 - Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera	5	4,44—5,04 % per tahun	37.805.334,6	
			02 - IPM Provinsi di Wilayah Sumatera	1	70,51—76,91 nilai minimum—nilai maksimum		
			03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Sumatera	1	9,13 %		
KP	02.01.01 - Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya Kawasan Strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1 Nilai	5.578.390,4	
			02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	14 Kawasan		
			03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 Jumlah Destinasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.3 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			04 - Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi	5	2 Jumlah Destinasi		
			05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	4 Kawasan		
			06 - KI Prioritas dan KI pengembangan	5	4 Jumlah KI		
			07 - Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	5	2 Jumlah Kawasan		
PRO-P	02.01.01.01 - Percepatan Peningkatan Investasi KEK Arun Lhokseumawe	01 - Terlaksananya Percepatan Peningkatan Investasi KEK Arun Lhokseumawe	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh	5	>1 nilai	1 261.646,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
PRO-P	02.01.01.02 - Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Sei Mangkei	01 - Terlaksananya Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Sei Mangkei	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara	5	>1 nilai	31.919,2	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.4 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.01.01.03 - Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan sekitarnya	01 - Terlaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan sekitarnya	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara	5	>1 nilai	469.714,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PRO-P	02.01.01.04 - Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi	01 - Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Barat	5	>1 nilai	757.305,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRO-P	02.01.01.05 - Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang	01 - Terlaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5	>1 nilai	2.616.618,7	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.5 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
						PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	
PRO-P	02.01.01.06 - Percepatan Peningkatan Investasi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	>1 nilai	434.557,9	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
PRO-P	02.01.01.07 - Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Galang Batang	01 - Terlaksananya fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan KI/KEK Galang Batang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	>1 nilai	-	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PRO-P	02.01.01.08 - Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam Bintan	01 - Terlaksananya pembangunan destinasi pariwisata pengembangan Batam Bintan	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	>1 nilai	-	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.01.01.10 - Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Bintan Aerospace	01 - Terlaksananya Percepatan Peningkatan Investasi KI Bintan Aerospace	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	>1 nilai	-	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PRO-P	02.01.01.11 - Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Sadai	01 - Terlaksananya Percepatan Peningkatan Investasi KI Sadai	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5	>1 nilai	-	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.6 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	02.01.01 12 - Percepatan Peningkatan Investasi KPBPB Sabang	01 - Terlaksananya Percepatan Peningkatan Investasi KPBPB Sabang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh	5	>1 nilai	6.628,6	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)
KP	02.01.02 - Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya Sektor Unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Kakao	5	.3 - 5 %	475.190,5	
			02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Kopi	5	2 - 4 %		
			03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Kelapa	5	1 - 2 %		
			04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Tebu	5	2 - 4 %		
			05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Karet	5	2 - 3 %		
			06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Cengkeh	5	2 - 4 %		
			07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Perikanan Tangkap	5	2 - 4 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.7 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			08 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Perikanan Budidaya	5	4 - 6 %		
			09 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Garam	5	4 - 6 %		
			10 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Lada	5	1 - 2 %		
			11 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Pala	5	2 - 4 %		
PRO-P	02.01.02.01 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh - Kopi	5	4 - 6 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.01.02.02 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh - Kakao	5	5 - 7 %	96.536,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.01.02.04 - Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh - Lada, pala, cengkeh	5	5 - 7 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.01.02.10 - Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara - Karet	5	1 - 2 %	35 100,0	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.8 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.01.02.11 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara - Kopi	5	2 - 4 %	114.883,2	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.01.02.17 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat - Kopi	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.01.02.18 - Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat - Karet	5	4 - 6 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.01.02.24 - Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau - Karet	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.01.02.25 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau - Kelapa	5	1 - 2 %	50.864,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.01.02.31 - Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi - Karet	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.01.02.33 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi - Kopi	5	3 - 5 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.9 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.01.02.37 - Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan - Karet	5	4 - 6 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.01.02.38 - Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan - Tebu	5	4 - 6 %	107.807,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.01.02.45 - Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Bengkulu	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu - Karet	5	4 - 6 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.01.02.49 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - Kopi	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.01.02.50 - Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - Karet	5	4 - 6 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.01.02.51 - Pengembangan Komoditas Unggulan Lada di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - Lada	5	1 - 3 %	25 000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.01.02.53 - Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - Tebu	5	1 - 3 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.10 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.01.02.55 - Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - Perikanan Budidaya	5	5 - 7 %	7.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P	02.01.02.56 - Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Lada, pala, cengkeh	5	5 - 7 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.01.02.61 - Pengembangan Komoditas Unggulan Pala di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Riau - Pala	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.01.02.62 - Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Riau - Perikanan Tangkap	5	1 - 2 %	37.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KP	02.01.03 - Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Banda Aceh (Angka perhitungan sementara)	5	47,41 Nilai	1.407.331,1	
			02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sabang (Angka perhitungan sementara)	5	43,72 Nilai		
			03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Lhokseumawe (Angka perhitungan sementara)	5	39,66 Nilai		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.11 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Langsa (Angka perhitungan sementara)	5	39,72 Nilai		
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Medan (Angka perhitungan sementara)	5	57,29 Nilai		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sibolga (Angka perhitungan sementara)	5	60,42 Nilai		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pematangsiantar (Angka perhitungan sementara)	5	55,50 Nilai		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Gunungsitoh (Angka perhitungan sementara)	5	37,60 Nilai		
		09 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Padang (Angka perhitungan sementara)	5	47,38 Nilai		
		10 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Solok (Angka perhitungan sementara)	5	42,15 Nilai		
		11 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bukittinggi (Angka perhitungan sementara)	5	48,38 Nilai		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.12 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		12 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Dumai (Angka perhitungan sementara)	5	58,63 Nilai		
		13 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pekanbaru (Angka perhitungan sementara)	5	61,92 Nilai		
		14 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Jambi (Angka perhitungan sementara)	5	43,47 Nilai		
		15 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Palembang (Angka perhitungan sementara)	5	48,63 Nilai		
		16 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Prabumulih (Angka perhitungan sementara)	5	49,17 Nilai		
		17 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Lubuklinggau (Angka perhitungan sementara)	5	55,65 Nilai		
		18 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bengkulu (Angka perhitungan sementara)	5	45,60 Nilai		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.13 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			19 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bandar Lampung (Angka perhitungan sementara)	5	45,54 Nilai		
			20 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pangkal Pinang (Angka perhitungan sementara)	5	46,44 Nilai		
			21 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tanjungpinang (Angka perhitungan sementara)	5	47,66 Nilai		
			22 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Batam (Angka perhitungan sementara)	5	51,34 Nilai		
		02 - Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	20 Kota		
		03 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
		04 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	2 WM		
PRO-P	02.01.03.01 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Aceh	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	8 919,9	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.14 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
						PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	
PRO-P	02.01.03.02 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Bengkulu	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	949,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PRO-P	02.01.03.03 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jambi	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	949,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.01.03.04 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	951,7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.01.03.05 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota	1.322,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.01.03.06 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Lampung	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	128.570,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.15 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.01.03.07 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Riau	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota	949,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.01.03.08 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sumatera Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	3 Kota	65.005,6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.01.03.09 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	6 061,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.01.03.10 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sumatera Utara	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	3 Kota	958,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PRO-P	02.01.03.11 - Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sumatera Utara	01 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM	627.114,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.16 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	02.01.03.12 - Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM	565.580,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM		
KP	02.01.04 - Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi	01 - Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Sumatera	5	59 Nilai Indeks	29.794.018,3	
			02 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Pulau Sumatera	1 dan 5	58,93 Nilai Indeks		
			03 - Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1 dan 5	58,38 Nilai Indeks		
		02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal	01 - Jumlah Daerah Tertinggal	5	N/A (Sesuai PP 78/2014, evaluasi penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 tahun sekali pada akhir RPJMN, sehingga jumlah daerah tertinggal 2022 belum dapat ditentukan) Kabupaten		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.17 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	36 Kecamatan		
			03 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,49 IPKP		
PRO-P	02.01.04.07 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Aceh	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi	1 dan 5	60,78 Nilai Indeks	327.917,7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.01.04.08 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Aceh Timur	1 dan 5	64,41 Nilai Indeks	31.041,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.01.04.09 - Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusanantara, Samar Kilang, dan Selaut	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusanantara, Samar Kilang, dan Selaut	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Aceh	5	57,89 Nilai Indeks	8.720,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.01.04.10 - Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Aceh	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Aceh	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Aceh	5	3 Kecamatan	-	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.18 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.01.04.11 - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Sabang	5	0,48 IPKP	250,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P	02.01.04.12 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sumatera Utara	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Sumatera Utara	1 dan 5	64,62 Nilai Indeks	116.100,1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.01.04.13 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Toba Samosir dan Samosir	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Toba Samosir dan Samosir	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab Toba Samosir dan Samosir	1 dan 5	66,72 Nilai Indeks	21.897,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.01.04.14 - Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sumatera Utara	01 - Meningkatkan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Sumatera Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Sumatera Utara	5	2 Kecamatan	-	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.01.04.15 - Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	01 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	01 - Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	1	18,5 - 19 %	56.463,2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
			02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	1	63,5 - 64 Nilai Indeks		
PRO-P	02.01.04.16 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sumatera Barat	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Sumatera Barat	1 dan 5	69,14 Nilai Indeks	30.810,7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.19 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.01.04.17 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Agam	1 dan 5	56,75 Nilai Indeks	12 614,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.01.04.18 - Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sumatera Barat	5	68,07 Nilai Indeks	838,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.01.04 19 - Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	01 - Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	1	11,6 - 12,1 %	3.293,3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
			02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	1	61,7 - 62,2 Nilai Indeks		
PRO-P	02.01.04 20 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Riau	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Riau	1 dan 5	64,90 Nilai Indeks	34 428,3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.01.04.21 - Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Riau	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Riau	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Riau	5	7 Kecamatan	-	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.20 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.01.04.22 - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkulu	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkulu	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Bengkulu	5	0,53 IPKP	5.500,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.01.04.23 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Jambi	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Jambi	1 dan 5	64,63 Nilai Indeks	32.792,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.01.04.24 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Muaro Jambi	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Muaro Jambi	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Muaro Jambi	1 dan 5	58,15 Nilai Indeks	144,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.01.04.25 - Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Jambi	5	33,82 Nilai Indeks	44,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.01.04.26 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sumatera Selatan	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Sumatera Selatan	1 dan 5	61,14 Nilai Indeks	55.633,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.01.04.27 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banyuasin	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banyuasin	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Banyuasin	1 dan 5	61,13 Nilai Indeks	153.342,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.21 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.01.04.28 - Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Telang, dan Kikim	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Telang, dan Kikim	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sumatera Selatan	5	59,71 Nilai Indeks	64,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.01.04.29 - Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	1	18 - 18,5 %	3 044,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
			02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	1	66,2 - 66,7 Nilai Indeks		
PRO-P	02.01.04.30 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Bengkulu	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Bengkulu	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Bengkulu	1 dan 5	60,63 Nilai Indeks	31.050,8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.01.04.31 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bengkulu Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bengkulu Tengah	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Bengkulu Tengah	1 dan 5	55,00 Nilai Indeks	398,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.01.04.32 - Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lagita	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lagita	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Bengkulu	5	71,73 Nilai Indeks	190,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.22 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02 01.04 33 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Lampung	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Lampung	1 dan 5	65,27 Nilai Indeks	53.325,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.01.04.34 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mesuji dan Tulang Bawang	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mesuji dan Tulang Bawang	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Mesuji dan Tulang Bawang	1 dan 5	61,21 Nilai Indeks	1.219,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.01.04.35 - Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu dan Mesuji	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu dan Mesuji	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Lampung	5	55,17 Nilai Indeks	3.169,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.01.04.36 - Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Lampung	01 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Lampung	01 - Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal di Provinsi Lampung	1	13,8 - 14,3 %	28.765.119,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN SOSIAL
			02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal di Provinsi Lampung	1	66 - 66,5 Nilai Indeks		
PRO-P	02.01.04.37 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dan 5	67,15 Nilai Indeks	10 247,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.23 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.01.04.38 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	1 dan 5	54,65 Nilai Indeks	11.729,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.01.04.39 - Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Bangka Belitung	5	71,23 Nilai Indeks	679,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.01.04.40 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kepulauan Riau	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Kepulauan Riau	1 dan 5	61,43 Nilai Indeks	12.093,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.01.04.41 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bintan dan Karimun	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bintan dan Karimun	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Bintan dan Karimun	1 dan 5	58,52 Nilai Indeks	9.104,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.01.04.42 - Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Meningkatkan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kepulauan Riau	5	24 Kecamatan	-	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.01.04.43 - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Ranai	5	0,47 IPKP	750,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.24 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
KP	02.01.05 - Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,15 Nilai		
		02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	44,3 %		
		03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	121 Daerah		
		04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	96 Daerah		
		05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	14.641 Dokumen		
		06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	23 Daerah		
		07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	96 Daerah		
		08 - Meningkatnya Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	4	7 Daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.25 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	83,16 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 Daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	3.855 104 Hektar	550.404,3	
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	2.258.341 Hektar		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	72 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR		
		04 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	40 Persetujuan Substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	21 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
		06 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	15 Persetujuan Substansi RTRW		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.26 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah	5	5 Nilai		
			08 - Jumlah Materi Teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	1 Materi Teknis dan Raperpres RTR		
			09 - Jumlah Penanganan Perkara Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	5	1 Perkara		
		12 - Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan informasi geospasial	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	312.845 Km ²		
			02 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	974 Desa		
			03 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	468.683 Km ²		
PRO-P	02.01.05.04 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Aceh	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.724 Dokumen	13.110,7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 Daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.27 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	84,78 %	
		04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	24 %	
		05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	17 Daerah	
		06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	13 Daerah	
		07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	13 Daerah	
		08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi	
		09 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.	4	1 Rekomendasi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.28 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.01.05.05 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	139.630 Bidang	42 708,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	93.480 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	33.100 Bidang		
PRO-P	02.01.05.06 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Aceh	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	5 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	1 762,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	3 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 Materi Teknis dan Ranperkada RTRW		
			04 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 Persetujuan Substansi RTRW		
PRO-P	02.01.05.07 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sumatera Utara	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	2.209 Dokumen	2.717,2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.29 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	82,90 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	33 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	25 Daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	18 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	18 Daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.30 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	02.01.05.08 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	212.100 Bidang	70.883,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	125.160 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	77.460 Bidang		
PRO-P	02.01.05.09 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Utara	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	10 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	2.664,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	4 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	4 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
PRO-P	02.01.05.10 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sumatera Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.824 Dokumen	2.675,1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 Daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.31 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	81 %		
		04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	81 %		
		05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	13 Daerah		
		06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	11 Daerah		
		07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	11 Daerah		
		08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		
PRO-P	02.01.05.11 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	369.900 Bidang	123.549,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	02 - Jumlah Bidang Tanah	5	298.200 Bidang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.32 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	2.400 Bidang		
PRO-P	02.01.05.12 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Barat	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	6 Materi Teknis dan Ranperkada RTRW	3.287,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	4 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
			04 - Jumlah Materi Teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	1 Materi Teknis dan Raperpres RTR		
PRO-P	02 01 05.13 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Riau	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.606 Dokumen	2 541,2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 Daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.33 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	83,94 %	
		04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	39 %	
		05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	8 Daerah	
		06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	8 Daerah	
		07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	8 Daerah	
		08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi	
PRO-P	02.01.05.14 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	14.510 Bidang	24.391,3 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.34 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	3.610 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	720 Bidang		
PRO-P	02.01.05.15 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Riau	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	6 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	1 839,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	7 Persetujuan Substansi RDTR		
PRO-P	02.01.05.16 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	576 Dokumen	2.637,5	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatkan persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	82,94 %		
		03 - Meningkatkan persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	38 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.35 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	6 Daerah		
		05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	6 Daerah		
		06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	6 Daerah		
		07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		
PRO-P	02.01.05 17 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	45.600 Bidang	9.516,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	7.600 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	4.860 Bidang		
PRO-P	02.01.05 18 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	3 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	1.508,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.36 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	5 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
			04 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 Persetujuan Substansi RTRW		
PRO-P	02.01.05 19 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jambi	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.086 Dokumen	2 244,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 Daerah		
		03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	82,66 %		
		04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	66 %		
		05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	11 Daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.37 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	8 Daerah		
		07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	8 Daerah		
		08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		
PRO-P	02.01 05 20 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	35.540 Bidang	48 058,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	33.700 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	108.000 Bidang		
PRO-P	02.01.05.21 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jambi	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	6 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	2.417,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.38 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	6 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
			04 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 Persetujuan Substansi RTRW		
PRO-P	02.01.05.22 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	2.015 Dokumen	2.366,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 Daerah		
		03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	84,75 %		
		04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	46 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.39 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	13 Daerah		
		06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	10 Daerah		
		07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	10 Daerah		
		08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		
PRO-P	02.01.05.23 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	87.960 Bidang	55 091,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	21.650 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	31.260 Bidang		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.40 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.01.05.24 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	12 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	5.152,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	3 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	7 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
			04 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	4 Persetujuan Substansi RTRW		
PRO-P	02.01.05.25 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Lampung	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	872 Dokumen	2.061,7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
			02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	4	82,58 %		
			03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	4	37 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.41 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaannya meningkat	4	11 Daerah		
		05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	9 Daerah		
		06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	9 Daerah		
		07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		
PRO-P	02.01.05.26 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	151 500 Bidang	44 624,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	86.580 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	165.000 Bidang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.42 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.01.05.27 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Lampung	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	15 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	4.575,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	2 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
			04 - Jumlah Penanganan Perkara Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	5	1 Perkara		
PRO-P	02.01.05.28 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Bengkulu	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	2.152 Dokumen	2 279,2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 Daerah		
		03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	78,72 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.43 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	42 %		
		05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	9 Daerah		
		06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	7 Daerah		
		07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	7 Daerah		
		08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		
PRO-P	02.01 05.29 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Bengkulu	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	59 780 Bidang	27.382,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	20 260 Bidang		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.44 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	74.000 Bidang		
PRO-P	02.01.05.30 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Bengkulu	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	6 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	1.267,2	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	1 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
PRO-P	02.01.05.31 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	577 Dokumen	2.310,3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	86,71 %		
		03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	37 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.45 -

PN/PP/KP/Prop		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaannya meningkat	4	8 Daerah		
		05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	6 Daerah		
		06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	6 Daerah		
		07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		
PRO-P	02 01.05.32 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	54 100 bidang	14.748,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	24.910 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	15.220 Bidang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.46 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.01.05.33 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	3 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	1 905,2	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	5 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
			04 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	4 Persetujuan Substansi RTRW		
PRO-P	02.01.05.34 - Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sumatera Utara	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	68.275 Km ²	11 000,0	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
			02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	71.970 Km ²		
PRO-P	02.01.05.35 - Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sumatera Barat	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	38.945 Km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
			02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	41 530 Km ²		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.47 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02 01.05 36 - Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	619 Desa	17.124,7	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
		02 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	76.602 Km ²		
			02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	84.904 Km ²		
PRO-P	02.01.05.37 - Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Lampung	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	355 Desa	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
		02 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	32.751 Km ²		
			02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	33.008 Km ²		
PRO-P	02.01.05.38 - Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Bengkulu	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	19.921 Km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.48 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	20.071 Km ²			
PRO-P	02.01.05.39 - Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Jambi	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	47.551 Km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
		02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	48.396 Km ²			
PRO-P	02.01.05.40 - Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kep. Bangka Belitung	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	15.979 Km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
		02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	16.691 Km ²			
PRO-P	02.01.05.41 - Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Aceh	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	55.009 Km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
		02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	56.782 Km ²			
PRO-P	02.01.05.42 - Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kep. Riau	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	6.618 Km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.49 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	7.652 Km ²		
PRO-P	02.01.05 43 - Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Riau	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5 000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	86.403 Km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
			02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1.5.000 yang diakuisisi	2	87.679 Km ²		
PP	02.02 - Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	01 - Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa-Bali	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali	5	5,20—5,92 % per tahun	16.259.615,2	
			02 - IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali	1	73,26—82,99 nilai minimum—nilai maksimum		
			03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali	1 dan 5	8,45 %		
KP	02.02.01 - Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya Kawasan Strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1 Nilai	5.902.960,9	
			02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	10 Kawasan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.50 -

PN/PP/KP/Prop	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 Jumlah Destinasi			
		04 - Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi	5	3 Jumlah Destinasi			
		05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	3 Kawasan			
		06 - KI Prioritas dan KI Pengembangan	5	2 Jumlah KI			
PRO-P	02.02.01.01 - Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat	5	>1 nilai	591.653,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPBU), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.02.01.02 - Percepatan Peningkatan Investasi KEK Kendal	01 - Terlaksananya Percepatan Peningkatan Investasi KEK Kendal	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah	5	>1 nilai	1.000,0	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRO-P	02.02.01.03 - Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah	5	>1 nilai	1.156.715,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.51 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
							KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (KPBUI)
PRO-P	02.02.01.04 - Terlaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi DI Yogyakarta	5	>1 nilai	977.599,8	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PRO-P	02.02.01.05 - Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru	01 - Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	5	>1 nilai	486.346,3	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.52 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
							BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PRO-P	02.02 01 06 - Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi	01 - Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	5	>1 nilai	11 105,6	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.02.01.07 - Percepatan Peningkatan Investasi KEK Tanjung Lesung	01 - Terlaksananya Percepatan Peningkatan Investasi KEK Tanjung Lesung	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Banten	5	>1 nilai	149.250,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
PRO-P	02.02 01 08 - Peningkatan keberlanjutan DPP Revitalisasi Bali	01 - Terlaksananya peningkatan keberlanjutan DPP Revitalisasi Bali	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Bali	5	>1 nilai	338 151,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.53 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
						DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	
PRO-P	02.02.01.09 - Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Banten	5	>1 nilai	2.191.140,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU)
PRO-P	02.02.01.11 - Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Subang	01 - Terlaksananya Percepatan Peningkatan Investasi KI Subang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat	5	>1 nilai	-	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PRO-P	02.02.01.12 - Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Batang	01 - Terlaksananya Percepatan Peningkatan Investasi KI Batang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah	5	>1 nilai	-	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
KP	02.02.02 - Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya Sektor Unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Kakao	5	3 - 4 %	270.380,0	
			02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Kopi	5	3 - 5 %		
			03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Kelapa	5	1 - 2 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.54 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Tebu	5	2 - 4 %		
			05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Cengkeh	5	2 - 4 %		
			06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Perikanan Tangkap	5	2 - 4 %		
			07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Perikanan Budidaya	5	4 - 6 %		
			08 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Garam	5	8 - 10 %		
			09 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Lada	5	1 - 2 %		
			10 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Pala	5	1 - 2 %		
PRO-P	02.02.02 01 - Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - Lada, pala, cengkeh	5	3 - 5 %	5.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.55 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.02.02.02 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - Kopi	5	4 - 6 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.02.02.03 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - Kelapa	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.02.02.04 - Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - Tebu	5	4 - 6 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.02.02.07 - Peningkatan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - Tebu	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.02.02.08 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - Kopi	5	7 - 9 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.02.02.10 - Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DI Yogyakarta - Tebu	5	4 - 6 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.02.02.11 - Peningkatan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - Tebu	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.02.02.12 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - Kopi	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.56 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.02.02.14 - Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - Garam	5	10 - 12 %	5.880,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P	02.02.02.15 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Banten - Kopi	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.02.02.17 - Pengembangan komoditas unggulan kopi di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali - Kopi	5	2 - 4 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.02.02.18 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali - Kelapa	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.02.02.19 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali - Kakao	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.02.02.25 - Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - Perikanan Budidaya	5	4 - 6 %	259.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KP	02.02.03 - Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Jakarta (Angka perhitungan sementara)	5	60,14 Nilai	7.492.854,7	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.57 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Bandung (Angka perhitungan sementara)	5	41,87 Nilai		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sukabumi (Angka perhitungan sementara)	5	43,24 Nilai		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Cirebon (Angka perhitungan sementara)	5	44,31 Nilai		
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Semarang (Angka perhitungan sementara)	5	44,22 Nilai		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Magelang (Angka perhitungan sementara)	5	49,09 Nilai		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Surakarta (Angka perhitungan sementara)	5	50,06 Nilai		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pekalongan (Angka perhitungan sementara)	5	45,57 Nilai		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.58 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		09 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tegal (Angka perhitungan sementara)	5	47,24 Nilai		
		10 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Yogyakarta (Angka perhitungan sementara)	5	76,11 Nilai		
		11 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Surabaya (Angka perhitungan sementara)	5	43,50 Nilai		
		12 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kediri (Angka perhitungan sementara)	5	51,35 Nilai		
		13 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Malang (Angka perhitungan sementara)	5	45,84 Nilai		
		14 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Probolinggo (Angka perhitungan sementara)	5	46,72 Nilai		
		15 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pasuruan (Angka perhitungan sementara)	5	44,81 Nilai		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.59 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		16 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Batu (Angka perhitungan sementara)	5	47,79 Nilai		
		17 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Maja (Angka perhitungan sementara)	5	31,06 Nilai		
		18 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Cilegon (Angka perhitungan sementara)	5	63,10 Nilai		
		19 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Serang (Angka perhitungan sementara)	5	55,31 Nilai		
		20 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Denpasar (Angka perhitungan sementara)	5	67,71 Nilai		
	02 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	4 WM		
	03 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	14 Kota		
	04 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 Kota		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.60 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
	05 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM			
PRO-P	02.02.03.05 - Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta di Provinsi DKI Jakarta	01 - Meningkatnya kualitas WM Jakarta di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	1.935.049,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (KPBU)
PRO-P	02.02.03.06 - Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta di Provinsi Jawa Barat	01 - Meningkatnya kualitas WM Jakarta di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	222.627,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PRO-P	02.02.03.07 - Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Barat	01 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	136.693,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PRO-P	02.02.03.08 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jawa Barat	01 - Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota	414.846,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PRO-P	02.02.03.09 - Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Tengah	01 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	4.254.213,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.61 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
						PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	
PRO-P	02.02.03.10 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jawa Tengah	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	4 Kota	36.610,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PRO-P	02.02.03.11 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	933,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PRO-P	02.02.03.12 - Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Timur	01 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	160.772,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.02.03.13 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jawa Timur	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	5 Kota	933,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PRO-P	02.02.03.15 - Pembangunan Kota Baru di Provinsi Banten	01 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 Kota	380,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.62 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
							KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PRO-P	02.02.03.16 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Banten	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota	36.584,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PRO-P	02.02.03.17 - Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta di Provinsi Banten	01 - Meningkatnya kualitas WM Jakarta di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	82.953,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PRO-P	02.02.03.18 - Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Bali	01 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM	210.256,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KP	02.02.04 - Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya Desa Terpadu dan Kawasan Perdesaan	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Pulau Jawa-Bali	1 dan 5	69,76 Nilai Indeks	833.274,9	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.63 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah-an Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1 dan 5	63,56 Nilai Indeks		
PRO-P	02.02.04.04 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Jawa Barat	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Jawa Barat	1	71,31 Nilai Indeks	112.035,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.02.04.05 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Jawa Tengah	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Jawa Tengah	1 dan 5	68,75 Nilai Indeks	151.840,7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.02.04.06 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi DI Yogyakarta	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi DI Yogyakarta	1	74,83 Nilai Indeks	11.229,7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.02.04.07 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Jawa Timur	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Jawa Timur	1 dan 5	68,49 Nilai Indeks	165.645,3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.02.04.08 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Banten	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Banten	1 dan 5	66,57 Nilai Indeks	28.202,8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.64 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.02.04.09 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Bali	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Bali	1 dan 5	72,52 Nilai Indeks	11.549,8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.02.04.10 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sukabumi	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sukabumi	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Sukabumi	1 dan 5	55,25 Nilai Indeks	17.459,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.02.04.11 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Magelang dan Kendal	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Magelang dan Kendal	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Magelang dan Kendal	1 dan 5	64,55 Nilai Indeks	16.609,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.02.04.12 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pamekasan dan Banyuwangi	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pamekasan dan Banyuwangi	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Pamekasan dan Banyuwangi	1 dan 5	83,00 Nilai Indeks	3.011,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.02.04.13 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Pandeglang	1 dan 5	74,85 Nilai Indeks	59.518,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.02.04.14 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Buleleng dan Klungkung	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Buleleng dan Klungkung	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Buleleng dan Klungkung	1 dan 5	69,36 Nilai Indeks	5.871,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.65 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	02.02.04 15 - Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Kawasan Pesisir Selat Sunda	01 - Pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	01 - Persentase pelayanan publik yang dipulihkan	2	90 %	250.301,5	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL
KP	02.02.05 - Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	1.683.409 Hektar	1.760.144,8	
			02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	629.581 Hektar		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	53 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR		
			04 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	39 Persetujuan Substansi RDTR		
			05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	13 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
			06 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	12 Persetujuan Substansi RTRW		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.66 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah	5	5 Nilai		
		08 - Jumlah Materi Teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	1 Materi Teknis dan Raperpres RTR		
		09 - Jumlah Penanganan Perkara Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	5	2 Perkara		
	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,44 Nilai		
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	67,1 %		
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	101 Daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	73 Daerah		
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	9.514 Dokumen		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.67 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	19 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	73 Daerah		
	08 - Meningkatnya Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	4	2 Daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	85,93 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 Daerah		
	12 - Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	134.171 Km ²		
		02 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	3.026 Desa		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.68 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			03 - Jumlah layanan data center jaringan informasi geospasial nasional beroperasi	2	1 Layanan		
			04 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	16.345 Km ²		
PRO-P	02.02.05.05 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi DKI Jakarta	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	294 Dokumen	63.468,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	77,67 %		
		03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	100 %		
		04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	1 Daerah		
		05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	1 Daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.69 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	1 Daerah		
		07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		
PRO-P	02.02.05 06 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	213 Bidang	669 950,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	213 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta dasar pertanahan	01 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	2.022.250 Hektar		
PRO-P	02.02.05.07 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jawa Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	2.492 Dokumen	2.819,5	KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.70 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	87,40 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	53 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	23 Daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	16 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	16 Daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.71 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.02.05.08 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	962.960 Bidang	336.381,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	633.626 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	218.580 Bidang		
PRO-P	02.02.05.09 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Barat	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	12 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	4.522,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	8 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	5 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
			04 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	4 Persetujuan Substansi RTRW		
			05 - Jumlah Penanganan Perkara Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	5	2 Perkara		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.72 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.02.05 10 - Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Jawa Barat	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	802 Desa	66.444,4	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
		02 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5 000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	37.020 Km ²		
		03 - Terlaksananya layanan data center	01 - Jumlah layanan data center jaringan informasi geospasial nasional beroperasi	2	1 Layanan		
PRO-P	02.02.05 11 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jawa Tengah	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.596 Dokumen	2 274,1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatkan persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	86,60 %		
		03 - Meningkatkan persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	63 %		
		04 - Meningkatkan daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	29 Daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.73 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	18 Daerah		
		06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	18 Daerah		
		07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		
PRO-P	02.02.05.12 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	790.400 Bidang	282 849,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	489.420 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	539.820 Bidang		
PRO-P	02.02.05.13 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Tengah	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	18 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	3.209,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.74 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	7 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
PRO-P	02.02.05.14 - Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Jawa Tengah	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	836 Desa	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
		02 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5 000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	34.332 Km ²		
			02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	5.380 Km ²		
PRO-P	02.02.05.15 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	604 Dokumen	2.809,3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	93,49 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.75 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	74 %		
		04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	6 Daerah		
		05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	5 Daerah		
		06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	5 Daerah		
		07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		
		08 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.	4	1 Rekomendasi		
PRO-P	02.02.05 16 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi D I. Yogyakarta	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	4.400 Bidang	6 182,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.76 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	4.400 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	86.160 Bidang		
PRO-P	02 02.05.17 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi D.I. Yogyakarta	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	5 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	2.030,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	5 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
			04 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	4 Persetujuan Substansi RTRW		
PRO-P	02.02.05.18 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jawa Timur	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	2.872 Dokumen	2.473,7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.77 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	85,87 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	80 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	28 Daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	20 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	20 Daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.78 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.02.05.19 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	593 750 Bidang	269 583,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	275 400 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah Bidang Tanah K4	5	368.100 Bidang		
PRO-P	02 02.05.20 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Timur	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	6 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	2.199,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	7 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
			04 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 Persetujuan Substansi RTRW		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.79 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	02.02.05 21 - Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Jawa Timur	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	1 019 Desa	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
		02 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	45.531 Km ²		
			02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1 5.000 yang diakuisisi	2	7.072 Km ²		
PRO-P	02.02.05 22 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Banten	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	869 Dokumen	2 118,2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	81,68 %		
		03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	46 %		
		04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	7 Daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.80 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	6 Daerah		
		06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	6 Daerah		
		07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		
PRO-P	02.02.05.23 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	18 000 Bidang	10 726,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	8.930 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	17.460 Bidang		
PRO-P	02.02.05.24 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Banten	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	5 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	1 465,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	3 Persetujuan Substansi RDTR		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.81 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
PRO-P	02.02.05.25 - Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Banten	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	369 Desa	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
		02 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1.5.000	2	9.340 Km ²		
PRO-P	02.02.05.26 - Peningkatan kapasitas pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Bali	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	786 Dokumen	2.571,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	88,81 %		
		03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	54 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.82 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaannya meningkat	4	7 Daerah		
		05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	7 Daerah		
		06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	7 Daerah		
		07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		
PRO-P	02.02.05 27 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	56.060 Bidang	21.708,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	1.980 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	32.020 Bidang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.83 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.02.05.28 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Bali	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	7 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	3 827,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	9 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
			04 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 Persetujuan Substansi RTRW		
			05 - Jumlah Materi Teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	1 Materi Teknis dan Raperpres RTR		
PRO-P	02.02.05.29 - Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	3.176 Km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
			02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	3.176 Km ²		
PRO-P	02.02.05.30 - Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Bali	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	4 761 Km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.84 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	717 Km ²		
PRO-P	02.02.05.31 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi DKI Jakarta	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	1 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	528,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	1 Persetujuan Substansi RDTR		
PRO-P	02.02.05.32 - Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi DKI Jakarta	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	11 km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
PP	02.03 - Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Nusa Tenggara	5	5,12-6,01 % per tahun	17.506.154,1	
			02 - IPM Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara	1	66,87-70,20 nilai minimum-nilai maksimum		
			03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Nusa Tenggara	1	16,75 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.85 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
KP	02.03.01 - Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya Kawasan Strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1 Nilai	347 518,7	
			02 - Jumlah Kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	3 Kawasan		
			03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 Jumlah Destinasi		
			04 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	1 Kawasan		
PRO-P	02.03.01.01 - Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/KEK Mandalika	01 - Terlaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/ KEK Mandalika	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	5	>1 nilai	300.068,7	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (KPBU), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.86 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.03.01 02 - Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	01 - Terlaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KBPBP) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	5	>1 nilai	47.450,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPB), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KP	02.03.02 - Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya Sektor Unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Kopi	5	1 - 2 %	1.960,0	
			02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Kelapa	5	1 - 2 %		
			03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Tebu	5	1 - 2 %		
			04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Cengkeh	5	4 - 6 %		
			05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Perikanan Tangkap	5	1 - 2 %		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.87 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Perikanan Budidaya	5	1 - 2 %		
			07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Garam	5	10 - 12 %		
			08 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Lada	5	1 - 2 %		
			09 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Pala	5	3 - 5 %		
PRO-P	02.03.02.01 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - Kelapa	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.03.02.02 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - Kopi	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.03.02.03 - Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - Tebu	5	1 - 3 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.03.02.08 - Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - Garam	5	10 - 12 %	1 960,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P	02.03.02.09 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT - Kopi	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.88 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.03.02.10 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT - Kelapa	5	1 - 3 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
KP	02.03.03 - Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Mataram (Angka perhitungan sementara)	5	45,50 Nilai	37.346,1	
			02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kupang (Angka perhitungan sementara)	5	45,07 Nilai		
		02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota		
PRO-P	02.03.03.02 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	31.735,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PRO-P	02.03.03.03 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	5.610,5	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KP	02.03.04 - Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Wilayah Nusa Tenggara	1 dan 5	57,50 Nilai Indeks	17.032.857,0	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.89 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			03 - Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1 dan 5	54,37 Nilai Indeks		
			04 - Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Nusa Tenggara	5	49,48 Nilai Indeks		
		02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal	01 - Jumlah Daerah Tertinggal	5	N/A (Sesuai PP 78/2014, evaluasi penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 tahun sekali pada akhir RPJMN, sehingga jumlah daerah tertinggal 2022 belum dapat ditentukan) Kabupaten		
			02 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	18 Kecamatan		
			03 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,48 IPKP		
PRO-P	02 03 04.02 - Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur	5	18 Kecamatan	84 916,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.90 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.03.04.11 - Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	25,1 - 25,6 %	15.974.500,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN SOSIAL
			02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	67,7 - 68,2 Nilai Indeks		
PRO-P	02.03.04.12 - Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	24,9 - 25,4 %	818.132,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
			02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	63,9 - 64,4 Nilai Indeks		
PRO-P	02.03.04.14 - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua	5	0,44 IPKP	42.281,4	KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.03.04.15 - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kefamenanu	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kefamenanu	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kefamenanu	5	0,52 IPKP	40.385,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.03.04.16 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 dan 5	54,25 Nilai Indeks	480,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.91 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	02.03.04.17 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 dan 5	68,49 Nilai Indeks	24.836,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.03.04.18 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompus	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompus	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompus	1 dan 5	63,44 Nilai Indeks	24.857,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.03.04.19 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	1 dan 5	51,2 Nilai Indeks	8.249,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.03.04.20 - Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Pulau Lombok dan Sekitarnya	01 - Pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	01 - Persentase pelayanan publik yang dipulihkan	2	90 %	854,9	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL
PRO-P	02.03.04.21 - Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tambora dan Labangka	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tambora dan Labangka	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat	5	57,57 Nilai Indeks	606,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.92 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	02.03.04.22 - Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Ponu, dan Melolo	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Ponu, dan Melolo	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	5	44,08 Nilai Indeks	12 755,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
KP	02.03.05 - Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,14 Nilai	86.472,3	
		02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	30,5 %		
		03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	25 Daerah		
		04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	19 Daerah		
		05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.343 Dokumen		
		06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	9 Daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.93 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	19 Daerah		
	08 - Meningkatnya Kesepakatan akan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	4	2 Daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	79,9 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 Daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	843.168 Hektar		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	101.979 Hektar		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	23 Materi Teknis dan Ranperkada		
		04 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	8 Persetujuan Substansi RDTR		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.94 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	5 Materi Teknis dan Ranperda		
			06 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 Persetujuan Substansi RTRW		
			07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah	5	5 Nilai		
		12 - Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan informasi geospasial	01 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	1.429 Km ²		
PRO-P	02.03.05 11 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	695 Dokumen	2 911,1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 Daerah		
		03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	74,82 %		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.95 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	28 %		
		05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	16 Daerah		
		06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	12 Daerah		
		07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	12 Daerah		
		08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		
PRO-P	02.03.05.12 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	648 Dokumen	2.363,8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.96 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	84,96 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	33 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	9 Daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	7 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	7 Daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.97 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.03.05.13 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	69.820 Bidang	48 051,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	57.850 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	174.460 Bidang		
PRO-P	02.03.05.14 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	90.130 Bidang	27 569,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	42.350 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	85.660 Bidang		
PRO-P	02.03.05.15 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	14 Materi Teknis dan Ranperkada	3 307,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.98 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	4 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 Materi Teknis dan Ranperda		
			04 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 Persetujuan Substansi RTRW		
PRO-P	02.03.05.16 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	9 Materi Teknis dan Ranperkada	2 269,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	4 Dokumen Persub RDTR Kab/Kota		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 Materi Teknis dan Ranperda		
			04 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 Dokumen Persub RTRW Prov/Kab/Kota		
PRO-P	02.03.05.18 - Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1.5.000 yang diakuisisi	2	1.429 Km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.99 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PP	02.04 - Pembangunan Wilayah Kalimantan	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kalimantan	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan	5	5,22—5,78 % per tahun	2.195.629,7	
			02 - IPM Provinsi di Wilayah Kalimantan	1	69,60—78,11 nilai minimum—nilai maksimum		
			03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan	1	5,15 %		
KP	02.04.01 - Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya Kawasan Strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1 Nilai	25.000,0	
			02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	5 Kawasan		
			03 - Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi	5	2 Jumlah Destinasi		
			04 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	1 Kawasan		
			05 - KI Prioritas dan KI Pengembangan	5	2 Jumlah KI		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.100 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.04.01 01 - Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Ketapang	01 - Terfasilitasinya Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Ketapang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat	5	>1 nilai	22.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PRO-P	02.04.01 02 - Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang	01 - Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat	5	>1 nilai	-	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRO-P	02.04.01.03 - Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Surya Borneo	01 - Terfasilitasinya Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Surya Borneo	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Tengah	5	>1 nilai	-	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PRO-P	02.04.01.04 - Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau	01 - Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi	5	>1 nilai	-	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PRO-P	02.04.01.05 - Percepatan Peningkatan Investasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	01 - Terlaksananya Percepatan Peningkatan Investasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh	5	>1 nilai	3.000,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KPBU)
KP	02.04.02 - Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya Sektor Unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Kopi	5	1 - 2 %	-	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.101 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Karet	5	2 - 3 %		
			03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Cengkeh	5	4 - 6 %		
			04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Perikanan Tangkap	5	1 - 2 %		
			05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Perikanan Budidaya	5	4 - 6 %		
			06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Lada	5	1 - 2 %		
			07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Pala	5	2 - 4 %		
PRO-P	02.04.02.01 - Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat - Karet	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.04.02.02 - Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat - Lada, pala, cengkeh	5	3 - 5 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.04.02.08 - Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah - Karet	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.102 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.04.02.10 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah - Kopi	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.04.02.15 - Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan - Karet	5	4 - 6 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.04.02.19 - Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur - Lada, pala, cengkeh	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.04.02.23 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara - Kopi	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.04.02.25 - Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara - Lada, pala, cengkeh	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
KP	02.04.03 - Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pontianak (Angka perhitungan sementara)	5	46,28 Nilai	1.230.089,1	
			02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Singkawang (Angka perhitungan sementara)	5	40,70 Nilai		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.103 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palangkaraya (Angka perhitungan sementara)	5	47,81 Nilai		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Banjarmasin (Angka perhitungan sementara)	5	39,28 Nilai		
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Ibu Kota Negara (Angka perhitungan sementara)	5	39,70 Nilai		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Balikpapan (Angka perhitungan sementara)	5	52,04 Nilai		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Samarinda (Angka perhitungan sementara)	5	48,52 Nilai		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Tanjung Selor (Angka perhitungan sementara)	5	38,18 Nilai		
		09 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tarakan (Angka perhitungan sementara)	5	48,76 Nilai		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.104 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	6 Kota		
		03 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
		04 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM		
		05 - Terbangunnya Ibu Kota Negara	01 - Luas area pembangunan Ibu Kota Negara	5	5.600 Hektar		
		06 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 Kota		
PRO-P	02.04.03.02 - Pembangunan Kota Baru di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 Kota	99.505,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PRO-P	02.04.03.03 - Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM	236.311,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	02 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.105 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.04.03.04 - Pembangunan Ibu Kota Negara	01 - Terbangunnya Ibu Kota Negara	01 - Luas area pembangunan Ibu Kota Negara	5	5.600 Hektar	510.799,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PRO-P	02.04.03.05 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota	1.735,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PRO-P	02.04.03.06 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	5.539,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PRO-P	02.04.03.07 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota	374.697,9	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.106 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.04.03.08 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	1.500,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KP	02.04 04 - Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi	04 - Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Kalimantan	5	54,64 Nilai Indeks	701.819,3	
			01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Wilayah Kalimantan	1 dan 5	56,84 Nilai Indeks		
			03 - Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1 dan 5	52,25 Nilai Indeks		
		02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,44 IPKP		
			02 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	10 Kecamatan		
PRO-P	02.04 04 06 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Barat	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Barat	1 dan 5	56,38 Nilai Indeks	80,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.107 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
							DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.04.04.07 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas	1 dan 5	58,92 Nilai Indeks	40 086,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.04.04.08 - Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Gerbang Mas Perkasa, dan Subah	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Gerbang Mas Perkasa, dan Subah	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Barat	5	60,34 Nilai Indeks	5.655,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.04.04.09 - Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kalimantan Barat	5	4 Kecamatan	135.165,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.04.04.10 - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk	5	0,47 IPKP	110.893,4	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP), KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PRO-P	02.04.04.11 - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jagoi Babang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jagoi Babang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jagoi Babang	5	0,36 IPKP	62.700,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.108 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
							DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.04.04.12 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Tengah	1 dan 5	59,92 Nilai Indeks	30.677,7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.04.04.13 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kotawaringin Barat	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kotawaringin Barat	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Kotawaringin Barat	1 dan 5	59,60 Nilai Indeks	27.044,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.04.04.14 - Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, serta Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup dan Pulang Pisau yang Mendukung Pengembangan <i>Food Estate</i> sesuai Direktif Presiden dalam Rangka Penguatan Ketahanan Pangan Nasional	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, serta Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup dan Pulang Pisau yang Mendukung Pengembangan <i>Food Estate</i> sesuai Direktif Presiden dalam Rangka Penguatan Ketahanan Pangan Nasional	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Tengah	5	26,50 Nilai Indeks	21.282,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
			02 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Mendukung <i>Food Estate</i> Provinsi Kalimantan Tengah	5	52,94 Nilai Indeks		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.109 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.04.04.15 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Selatan	1 dan 5	63,32 Nilai Indeks	37.977,7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.04.04.16 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barito Kuala dan Banjar	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barito Kuala dan Banjar	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Barito Kuala dan Banjar	1 dan 5	66,90 Nilai Indeks	1 942,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.04.04.17 - Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Kalimantan Selatan	5	68,06 Nilai Indeks	705,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.04.04.18 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Timur	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Timur	1 dan 5	62,02 Nilai Indeks	18.524,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.04.04.19 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Berau dan Kutai Timur	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Berau dan Kutai Timur	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Berau dan Kutai Timur	1 dan 5	58,92 Nilai Indeks	2 922,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.04.04.20 - Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kerang dan Maloy Kaliorang	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kerang dan Maloy Kaliorang	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Timur	5	55,60 Nilai Indeks	10.653,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.110 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.04.04.21 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Utara	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Utara	1 dan 5	49,11 Nilai Indeks	120,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.04.04.22 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulungan dan Nunukan	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulungan dan Nunukan	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Bulungan dan Nunukan	1 dan 5	52,75 Nilai Indeks	1.803,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.04.04.23 - Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Seimenggaris	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Seimenggaris	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Utara	5	52,50 Nilai Indeks	6.250,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.04.04.24 - Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kalimantan Utara	5	5 Kecamatan	9.942,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.04.04.25 - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan	5	0,40 IPKP	13.973,9	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.04.04.26 - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long Midang	5	0,40 IPKP	83.417,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.111 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.04.04.27 - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tou Lumbis	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tou Lumbis	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tou Lumbis	5	0,40 IPKP	-	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.04.04.28 - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Nawang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Nawang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long Nawang	5	0,63 IPKP	80.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.04.04.29 - Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kalimantan Timur	5	1 Kecamatan	-	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
KP	02.04.05 - Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,2 Nilai	238 721,3	
		02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	30,8 %		
		03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	48 Daerah		
		04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	39 Daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.112 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	3.558 Dokumen		
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	9 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	39 Daerah		
	08 - Meningkatnya Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	4	4 Daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	81,8 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 Daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	2.640.594 Hektar		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.113 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	2.590.611 Hektar		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	44 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR		
		04 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	16 Persetujuan Substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	13 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
		06 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	10 Persetujuan Substansi RTRW		
		07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah	5	5 Nilai		
		08 - Jumlah Materi Teknis PK/Revisi RTRWN	5	1 Materi Teknis dan RPP		
		09 - Jumlah Materi Teknis RDTR Rencana IKN	5	1 Materi Teknis dan Raperpres		
		10 - Jumlah Dokumen Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundangan RDTR Calon IKN	5	4 Raperpu RDTR IKN		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.114 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		12 - Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	137.014 Km ²		
			02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	502.885 Km ²		
PRO-P	02.04 05.04 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1 177 Dokumen	2 684,1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 Daerah		
		03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	78,07 %		
		04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	24 %		
		05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	13 Daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.115 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	9 Daerah		
		07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	9 Daerah		
		08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		
PRO-P	02.04.05 05 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	17.320 Bidang	39 252,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	11.660 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	189.340 Bidang		
PRO-P	02.04.05.06 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	13 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	2.689,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	4 Persetujuan Substansi RDTR		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.116 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 Materi Teknis dan Ranperda RTRW			
		04 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 Persetujuan Substansi RTRW			
PRO-P	02 04.05.07 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.019 Dokumen	2.542,8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 Daerah		
		03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	80,51 %		
		04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	31 %		
		05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	12 Daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.117 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	9 Daerah		
		07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	9 Daerah		
		08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		
PRO-P	02.04.05.08 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	20.560 Bidang	30 928,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	2 550 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	9.240 Bidang		
PRO-P	02.04.05.09 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	9 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	3 636,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	4 Persetujuan Substansi RDTR		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.118 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 Materi Teknis dan Ranperda RTRW			
PRO-P	02.04.05.10 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1 005 Dokumen	3.356,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	82,08 %		
		03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	24 %		
		04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	11 Daerah		
		05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	9 Daerah		
		06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	9 Daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.119 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		
PRO-P	02.04.05 11 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	44.900 Bidang	50 022,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	18.410 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	15.440 Bidang		
PRO-P	02.04.05 12 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	8 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	3.014,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	3 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	6 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
			04 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 Persetujuan Substansi RTRW		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.120 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	02.04.05.13 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	71 Dokumen	2.466,8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 Daerah		
		03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	86,91 %		
		04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	51 %		
		05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	7 Daerah		
		06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	7 Daerah		
		07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	7 Daerah		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.121 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		
PRO-P	02.04.05.14 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	47.900 Bidang	91.149,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	37.740 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	239.600 Bidang		
PRO-P	02.04.05.15 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	10 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	2.244,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	4 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.122 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			04 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 Persetujuan Substansi RTRW		
			05 - Jumlah Materi Teknis PK/Revisi RTRWN	5	1 Materi Teknis dan RPP		
			06 - Jumlah Materi Teknis RDTR Rencana IKN	5	1 Materi Teknis dan Raperpres		
			07 - Jumlah Dokumen Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundangan RDTR Calon IKN	5	4 Raperpu RDTR IKN		
PRO-P	02.04.05.16 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	286 Dokumen	2.624,5	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 Daerah		
		03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	81,42 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.123 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	24 %		
		05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	5 Daerah		
		06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	5 Daerah		
		07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	5 Daerah		
		08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		
PRO-P	02.04.05.18 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	4 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	2.108,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	1 Persetujuan Substansi RDTR		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.124 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	4 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
			04 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	4 Persetujuan Substansi RTRW		
PRO-P	02.04.05.19 - Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1.5.000 yang diakuisisi	2	146.364 Km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
PRO-P	02.04.05.20 - Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	408 Km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
			02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	147 188 Km ²		
PRO-P	02.04.05.21 - Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1 5 000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	4 Km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
			02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	29 522 Km ²		
PRO-P	02.04.05.22 - Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	1.393 Km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.125 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	112 451 Km ²		
PRO-P	02.04.05.23 - Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	67.360 Km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
PP	02.05 - Pembangunan Wilayah Sulawesi	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi	5	6,57—7,55 % per tahun	16.306.161,0	
			02 - IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi	1	67,72—74,48 nilai minimum—nilai maksimum		
			03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Sulawesi	1	9,58 %		
KP	02.05.01 - Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya Kawasan Strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1 Nilai	448.399,0	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.126 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahannya Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	7 Kawasan		
			03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 Jumlah Destinasi		
			04 - Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi	5	1 Jumlah Destinasi		
			05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	3 Kawasan		
			06 - KI Prioritas dan KI Pengembangan	5	1 Jumlah KI		
PRO-P	02.05.01.01 - Percepatan Peningkatan Investasi KEK Bitung	01 - Terlaksananya Percepatan Peningkatan Investasi KEK Bitung	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara	5	>1 nilai	-	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
PRO-P	02.05.01.02 - Percepatan Operasionalisasi KEK Likupang/Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang	01 - Terlaksananya Percepatan Operasionalisasi KEK Likupang/Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara	5	>1 nilai	25 000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.127 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	02.05.01.03 - Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Palu	01 - Terlaksananya Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Palu	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Tengah	5	>1 nilai	100 000,0	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PRO-P	02.05.01.04 - Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar	01 - Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Selatan	5	>1 nilai	95 572,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRO-P	02.05.01.05 - Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi	01 - Terlaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Tenggara	5	>1 nilai	227.826,6	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
KP	02.05.02 - Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya Sektor Unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Kakao	5	1 - 3 %	43.000,0	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.128 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Kopi	5	2 - 4 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Kelapa	5	1 - 2 %		
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Lada	5	1 - 2 %		
		05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Pala	5	1 - 2 %		
		06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Cengkeh	5	4 - 6 %		
		07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Perikanan Tangkap	5	2 - 4 %		
		08 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Perikanan Budidaya	5	1 - 2 %		
		09 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Garam	5	10 - 12 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.129 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.05.02.01 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - Kelapa	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.05.02.02 - Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - Lada, pala, cengkeh	5	5 - 7 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.05.02.03 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - Kopi	5	1 - 3 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.05.02.04 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - Kakao	5	4 - 6 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.05.02.05 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah - Kakao	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.05.02.06 - Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah - Lada, pala, cengkeh	5	1 - 3 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.05.02.07 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah - Kopi	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.130 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.05.02.08 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah - Kelapa	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.05.02.09 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - Kakao	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.05.02.10 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - Kopi	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.05.02.11 - Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - Lada, pala, cengkeh	5	4 - 6 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.05.02.12 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - Kelapa	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.05.02.14 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - Kakao	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.05.02.15 - Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - Lada, pala, cengkeh	5	5 - 7 %	15.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.131 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.05.02.16 - Pengembangan Komoditas Kopi di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - Kopi	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.05.02.17 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - Kelapa	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.05.02.19 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo - Kelapa	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.05.02.21 - Pengembangan Komoditas Unggulan Pala di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo - Pala, lada, cengkeh	5	4 - 6 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.05.02.22 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat - Kopi	5	8 - 10 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.05.02.23 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat - Kakao	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.05.02.28 - Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah - Perikanan Tangkap	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.132 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.05.02.30 - Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - Perikanan Tangkap	5	4 - 6 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P	02.05.02.32 - Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - Perikanan Budidaya	5	4 - 6 %	28.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P	02.05.02.33 - Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - Perikanan Tangkap	5	5 - 7 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P	02.05.02.35 - Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo - Perikanan tangkap	5	5 - 7 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KP	02.05.03 - Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Manado (Angka perhitungan sementara)	5	48,40 Nilai	1.766.263,3	
			02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palu (Angka perhitungan sementara)	5	46,54 Nilai		
			03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Makassar (Angka perhitungan sementara)	5	48,40 Nilai		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.133 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Parepare (Angka perhitungan sementara)	5	50,62 Nilai		
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palopo (Angka perhitungan sementara)	5	44,11 Nilai		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kendari (Angka perhitungan sementara)	5	45,77 Nilai		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Gorontalo (Angka perhitungan sementara)	5	40,26 Nilai		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Mamuju (Angka perhitungan sementara)	5	35,04 Nilai		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	6 Kota		
	03 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 Wilayah Metropolitan		
	04 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	2 Wilayah Metropolitan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.134 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	02.05.03.03 - Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 Wilayah Metropolitan	48.585,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 Wilayah Metropolitan		
PRO-P	02.05.03.04 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	777.453,8	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.05.03.05 - Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 Wilayah Metropolitan	764.945,9	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPBU), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PRO-P	02.05.03.06 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota	8.445,8	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PRO-P	02.05.03.07 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	863,1	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.135 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	02.05.03.08 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Gorontalo	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	1.716,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PRO-P	02.05.03.09 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	164.253,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KP	02.05.04 - Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal	01 - Jumlah Daerah Tertinggal	5	N/A (Sesuai PP 78/2014, evaluasi penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 tahun sekali pada akhir RPJMN, sehingga jumlah daerah tertinggal 2022 belum dapat ditentukan) Kabupaten	13.842.352,7	
			02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,46 IPKP		
			03 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	15 Kecamatan		
		01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Wilayah Sulawesi	1 dan 5	61,67 Nilai Indeks		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.136 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			03 - Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1 dan 5	52,92 Nilai Indeks		
			04 - Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Sulawesi	5	57,24 Nilai Indeks		
PRO-P	02.05.04.02 - Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Sulawesi Utara	5	11 Kecamatan	33 632,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.05.04.08 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Utara	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Utara	1 dan 5	65,35 Nilai Indeks	40,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.05.04.09 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Minahasa Utara	1 dan 5	62,93 Nilai Indeks	2.510,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.05.04.10 - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tahuna	5	0,48 IPKP	2 700,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.137 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.05.04.11 - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Melonguane	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Melonguane	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Melonguane	5	0,44 IPKP	750,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P	02.05.04.12 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Tengah	1 dan 5	60,13 Nilai Indeks	39.520,2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.05.04.13 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morowali, Buol, dan Poso	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morowali, Buol, dan Poso	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Morowali, Buol, dan Poso	1 dan 5	52,4 Nilai Indeks	5.084,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.05.04.14 - Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo, Bungku, Air Terang, Tampolore, Padauloyo, dan Bahari Tomini Raya	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo, Bungku, Air Terang, Tampolore, Padauloyo, dan Bahari Tomini Raya	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Tengah	5	54,70 Nilai Indeks	7.383,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.05.04.15 - Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	1	15,0 - 15,5 %	12.510.346,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN SOSIAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.138 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	1	68,2 - 68,7 Nilai Indeks		
PRO-P	02.05.04.16 - Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Kota Palu dan Sekitarnya	01 - Pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	01 - Persentase pelayanan publik yang dipulihkan	2	90 %	994.627,8	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN SOSIAL
PRO-P	02.05.04.17 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Selatan	1	65,82 Nilai Indeks	58.972,3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.05.04.18 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	1 dan 5	55,13 Nilai Indeks	19 851,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.05.04.19 - Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Gilireng, Masamba, dan Mahalona	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Gilireng, Masamba, dan Mahalona	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan	5	53,75 Nilai Indeks	12.501,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.139 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.05.04.20 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Tenggara	1 dan 5	61,38 Nilai Indeks	43.839,7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.05.04.21 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	1 dan 5	48,54 Nilai Indeks	17.046,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.05.04.22 - Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tinanggea, Mutiara, dan Asinua/Routa	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tinanggea, Mutiara, dan Asinua/Routa	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Tenggara	5	53,93 Nilai Indeks	28.513,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.05.04.23 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Gorontalo	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Gorontalo	1 dan 5	66,61 Nilai Indeks	15.700,8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.05.04.24 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	1 dan 5	64,65 Nilai Indeks	8.984,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.05.04.25 - Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Sumalata, Paguyaman Pantai, Pawonsari, dan Pulubala	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Sumalata, Paguyaman Pantai, Pawonsari, dan Pulubala	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Gorontalo	5	61,28 Nilai Indeks	10.652,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.140 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	02.05.04.26 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Barat	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi	1	61,21 Nilai Indeks	14 656,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.05.04.27 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mamuju dan Mamuju Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mamuju dan Mamuju Tengah	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Mamuju dan Mamuju Tengah	1 dan 5	47,42 Nilai Indeks	3.360,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.05.04.28 - Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tobadak dan Sarudu Baras	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tobadak dan Sarudu Baras	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Barat	5	66,94 Nilai Indeks	11.679,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.05.04.29 - Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Sulawesi Tengah	5	3 Kecamatan	-	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.05.04.30 - Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Gorontalo	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Gorontalo	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Gorontalo	5	1 Kecamatan	-	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
KP	02.05.05 - Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,17 Nilai	206 145,9	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.141 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	31,5 %	
		03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	67 Daerah	
		04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	51 Daerah	
		05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	5.352 Dokumen	
		06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	10 Daerah	
		07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	51 Daerah	
		08 - Meningkatnya Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	4	5 Daerah	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.142 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	82,8 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 Daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	1.502 635 Hektar		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	831.820 Hektar		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	35 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR		
		04 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	14 Persetujuan Substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	11 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
		06 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	8 Persetujuan Substansi RTRW		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.143 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah	5	5 Nilai		
			08 - Jumlah Materi Teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	1 Materi Teknis dan Raperpres RTR		
			09 - Jumlah Penanganan Perkara Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	5	1 Perkara		
PRO-P	02.05 05.05 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.004 Dokumen	2.736,2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 Daerah		
		03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	85,25 %		
		04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	30 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.144 -

PN/PP/KP/Prop		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	15 Daerah		
		06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	9 Daerah		
		07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	9 Daerah		
		08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		
PRO-P	02.05.05.06 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	34 800 Bidang	43.973,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	25.040 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	13 280 Bidang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.145 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.05.05.07 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	3 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	1.812,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	4 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
			04 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 Persetujuan Substansi RTRW		
PRO-P	02.05.05.09 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.542 Dokumen	2 515,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 Daerah		
		03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	81,43 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.146 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	31 %		
		05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	8 Daerah		
		06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	9 Daerah		
		07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	9 Daerah		
		08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		
PRO-P	02 05.05 10 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	41.400 Bidang	21.046,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	32.400 Bidang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.147 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	43.920 Bidang		
PRO-P	02.05.05.11 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	4 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	2.129,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	2 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
			04 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 Persetujuan Substansi RTRW		
			05 - Jumlah Penanganan Perkara Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	5	1 Perkara		
PRO-P	02.05.05.12 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.204 Dokumen	2.917,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 Daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.148 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	82,07 %		
		04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	56 %		
		05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	17 Daerah		
		06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	13 Daerah		
		07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	13 Daerah		
		08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		
PRO-P	02.05.05 13 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	202.900 Bidang	65 171,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.149 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	115.800 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	115.640 Bidang		
PRO-P	02.05.05.14 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	19 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	3.618,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	2 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
			04 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 Persetujuan Substansi RTRW		
PRO-P	02.05.05.16 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	680 Dokumen	2.423,8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.150 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	81,96 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	24 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	14 Daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	10 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	10 Daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.151 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.05.05.17 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	56.190 Bidang	24 576,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	30.250 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	12.194 Bidang		
PRO-P	02.05.05.18 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	3 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	1.418,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	1 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
			04 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 Persetujuan Substansi RTRW		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.152 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	02.05.05.20 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Gorontalo	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	431 Dokumen	2.571,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 Daerah		
		03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	85,17 %		
		04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	24 %		
		05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	7 Daerah		
		06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	5 Daerah		
		07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	5 Daerah		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.153 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		
PRO-P	02.05.05.21 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	53.700 Bidang	9.636,2	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	17.240 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	17.880 Bidang		
PRO-P	02.05.05.22 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Gorontalo	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	3 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	2.601,2	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	2 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
			04 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 Persetujuan Substansi RTRW		
			05 - Jumlah Materi Teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	1 Materi Teknis dan Raperpres RTR		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.154 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	02.05.05.23 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	491 Dokumen	2.453,5	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	80,96 %		
		03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	24 %		
		04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	6 Daerah		
		05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	5 Daerah		
		06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	5 Daerah		
		07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.155 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.05.05 24 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	32.800 Bidang	13 195,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	17 470 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	65.240 Bidang		
PRO-P	02.05.05.25 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	3 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	1.346,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	3 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
			04 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 Persetujuan Substansi RTRW		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.156 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PP	02.06 - Pembangunan Wilayah Maluku	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku	5	6,67 - 7,37 % per tahun	827 984,9	
			02 - IPM Provinsi di Wilayah Maluku	1	70,92 - 71,08 nilai minimum—nilai maksimum		
			03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku	1	12,19 %		
KP	02.06.01 - Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya Kawasan Strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1 Nilai	270 764,7	
			02 - Jumlah Kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	3 Kawasan		
			03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	1 Jumlah Destinasi		
			04 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	1 Kawasan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.157 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		05 - KI Prioritas dan KI pengembangan	5	1 Jumlah KI			
PRO-P	02.06.01.01 - Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai/KEK Morotai	01 - Terlaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai/KEK Morotai	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Maluku Utara	5	>1 nilai	221.139,1	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PRO-P	02.06.01.02 - Fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan KI Teluk Weda	01 - Terlaksananya Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Teluk Weda	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Maluku Utara	5	>1 nilai	49 625,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
KP	02.06.02 - Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya Sektor Unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Kelapa	5	4 - 6 %	-	
			02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Pala	5	1 - 2 %		
			03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Cengkeh	5	2 - 4 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.158 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Perikanan Tangkap	5	2 - 4 %		
			06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Perikanan Budidaya	5	4 - 5 %		
PRO-P	02.06.02.01 - Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - Lada, pala, cengkeh	5	4 - 6 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.06.02.02 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - Kelapa	5	4 - 6 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.06.02.03 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara - Kelapa	5	4 - 6 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.06.02.04 - Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara - Lada, pala, cengkeh	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.06.02.05 - Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - Perikanan Tangkap	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.159 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.06.02.07 - Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara - Perikanan Tangkap	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KP	02 06.03 - Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Ambon (Angka perhitungan sementara)	5	63,43 Nilai	234.887,1	
			02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tual (Angka perhitungan sementara)	5	45,46 Nilai		
			03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Ternate (Angka perhitungan sementara)	5	45,86 Nilai		
			04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Sofifi (Angka perhitungan sementara)	5	39,07 Nilai		
		02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	3 Kota		
		03 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 Kota		
PRO-P	02.06.03 01 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Maluku	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	96.535,7	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.160 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
							ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PRO-P	02.06.03.02 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Maluku Utara	01 - Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	51.351,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PRO-P	02.06.03.03 - Pembangunan Kota Baru di Provinsi Maluku Utara	01 - Terbangunnya Kota Baru	01 - Jumlah Kota Baru yang dibangun	5	1 Kota	87 000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KP	02.06.04 - Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Wilayah Maluku	1 dan 5	52,82 Nilai Indeks	287.298,3	
			03 - Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1 dan 5	56,59 Nilai Indeks		
			04 - Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Maluku	5	34,52 Nilai Indeks		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.161 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal	01 - Jumlah Daerah Tertinggal	5	N/A (Sesuai PP 78/2014, evaluasi penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 tahun sekali pada akhir RPJMN, sehingga jumlah daerah tertinggal 2022 belum dapat ditentukan) Kabupaten		
			02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,49 IPKP		
			03 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	16 Kecamatan		
PRO-P	02.06.04.02 - Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Maluku	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Maluku	5	11 Kecamatan	26.941,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.06.04.11 - Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Maluku	01 - Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku	1	21,9 - 22,4 %	4 450,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.162 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku	1	65,2 - 65,7 Nilai Indeks		
PRO-P	02.06.04.12 - Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Maluku Utara	01 - Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku Utara	1	6,8 - 7,3 %	1.800,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
			02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku Utara	1	63,5 - 64 Nilai Indeks		
PRO-P	02.06.04.14 - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Saumlaki	5	0,47 IPKP	750,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P	02.06.04.15 - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Daruba	5	0,50 IPKP	750,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P	02.06.04.16 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Maluku	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Maluku	1 dan 5	53,92 Nilai Indeks	218 122,3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P	02.06.04.17 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Maluku Utara	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Maluku Utara	1	55,67 Nilai Indeks	23 507,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.163 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
							DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.06.04.18 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Maluku Tengah	1 dan 5	54,62 Nilai Indeks	2.369,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.06.04 19 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morotai	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morotai	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Morotai	1 dan 5	60,04 Nilai Indeks	1.014,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.06.04 20 - Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobisonta	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobisonta	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Maluku	5	42,61 Nilai Indeks	45,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.06.04.21 - Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Pulau Mangoli dan Pulau Morotai	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Pulau Mangoli dan Pulau Morotai	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Maluku Utara	5	30,48 Nilai Indeks	1.547,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.06.04.22 - Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Maluku Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Maluku Utara	5	5 Kecamatan	6.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.164 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
KP	02.06.05 - Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	2,95 Nilai	35.034,8	
		02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	24 %		
		03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	18 Daerah		
		04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	15 Daerah		
		05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1 432 Dokumen		
		06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	2 Daerah		
		07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	15 Daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.165 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	08 - Meningkatnya Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	4	2 Daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	81,38 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 Daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	294.231 Hektar		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	206.930 Hektar		
		07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah	5	5 Nilai		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	19 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR		
		04 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	4 Persetujuan Substansi RDTR		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.166 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	6 Materi Teknis dan Ranperda RTRW		
			06 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	4 Persetujuan Substansi RTRW		
PRO-P	02.06.05 11 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Maluku	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	391 Dokumen	2.742,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 Daerah		
		03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	82,03 %		
		04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	24 %		
		05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	9 Daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.167 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	8 Daerah		
		07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	8 Daerah		
		08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		
PRO-P	02.06.05 12 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Maluku Utara	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1 041 Dokumen	2.644,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 Daerah		
		03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	80,73 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.168 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	24 %		
		05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	9 Daerah		
		06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	7 Daerah		
		07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	7 Daerah		
		08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		
PRO-P	02.06.05.13 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	11.360 Bidang	12.369,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	8.700 Bidang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.169 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	16.340 Bidang		
PRO-P	02.06.05.14 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	19.950 Bidang	11.977,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	11.990 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	1.704 Bidang		
PRO-P	02.06.05.15 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Maluku	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	9 Materi Teknis dan Ranperkada	2.565,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	2 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 Materi Teknis dan Ranperda		
			04 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 Persetujuan Substansi RTRW		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.170 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.06.05.16 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Maluku Utara	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	10 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	2.734,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	2 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 Materi Teknis dan Ranperda		
			04 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 Persetujuan Substansi RTRW		
PP	02.07 - Pembangunan Wilayah Papua	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua	5	5,92—6,48 % per tahun	3.775.567,0	
			02 - IPM Provinsi di Wilayah Papua	1	62,06—65,92 nilai minimum—nilai maksimum		
			03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Papua	1	23,84 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.171 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
KP	02.07.01 - Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya Kawasan Strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1 Nilai	828.898,1	
			02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	4 Kawasan		
			03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	1 Jumlah Destinasi		
			04 - Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi	5	1 Jumlah Destinasi		
			05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	1 Kawasan		
			06 - KI Prioritas dan KI Pengembangan	5	1 Jumlah KI		
PRO-P	02.07.01.01 - Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih	01 - Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua	5	>1 nilai	1.675,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PRO-P	02.07.01.02 - Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat	01 - Terlaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua Barat	5	>1 nilai	724.489,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.172 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
							INDONESIA, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.07.01.03 - Percepatan Peningkatan Investasi KEK Sorong	01 - Terlaksananya Percepatan Peningkatan Investasi KEK Sorong	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua Barat	5	>1 nilai	30.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRO-P	02.07.01.04 - Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Teluk Bintuni	01 - Terlaksananya Percepatan Peningkatan Investasi KI Teluk Bintuni	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua Barat	5	>1 nilai	72.734,1	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (KPBU)
KP	02.07.02 - Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya Sektor Unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Kakao	5	1 - 2 %	34.948,2	
			02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Kopi	5	2 - 4 %		
			03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Kelapa	5	1 - 2 %		
			04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Lada	5	1 - 2 %		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.173 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahannya Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Pala	5	1 - 2 %		
			06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Cengkeh	5	1 - 2 %		
			07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Perikanan Tangkap	5	2 - 4 %		
PRO-P	02.07.02.01 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua - Kakao	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.07.02.02 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua - Kopi	5	5 - 7 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.07.02.06 - Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat - Lada, pala, cengkeh	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P	02.07.02.07 - Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat - Kakao	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.174 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.07.02 10 - Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat - Perikanan Tangkap	5	4 - 6 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P	02.07.02.12 - Transformasi Ekonomi Berbasis Wilayah Adat dari Hulu ke Hilir	01 - Meningkatnya pengembangan komoditas unggulan di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Jumlah populasi ternak sapi	5	N/A Ekor	34.948,2	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
			02 - Jumlah hasil produksi tanaman hortikultura (sayur) Provinsi Papua	5	9,5 Ton		
			03 - Luas areal tanaman perkebunan	5	200 Hektar		
			04 - Jumlah hasil produksi tanaman perkebunan	5	126.215 Ton		
			05 - Nilai Tukar Petani subsektor tanaman pangan Provinsi Papua	5	97,58 Nilai indeks		
			06 - Nilai Tukar Petani subsektor hortikultura Provinsi Papua	5	N/A		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.175 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		07 - Nilai Tukar Petani subsektor Peternakan Provinsi Papua	5	99,98 Nilai indeks		
		08 - Nilai Tukar Petani subsektor tanaman perkebunan rakyat Provinsi Papua	5	99,98 Nilai indeks		
		09 - Nilai Tukar Petani subsektor perikanan Provinsi Papua	5	100,89 Nilai indeks		
		10 - Nilai Tukar Petani subsektor peternakan Provinsi Papua Barat	5	102,14 Nilai indeks		
		11 - Nilai Tukar Petani subsektor perkebunan rakyat Provinsi Papua Barat	5	121,11 Nilai indeks		
		12 - Nilai Tukar Petani subsektor hortikultura Provinsi Papua Barat	5	120,98 Nilai indeks		
		13 - Nilai Tukar Petani subsektor tanaman pangan Provinsi Papua Barat	5	109,15 Nilai indeks		
		14 - Nilai Tukar Nelayan Provinsi Papua Barat	5	111,84 Nilai indeks		
	02 - Meningkatnya ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Papua Barat	5	113,21 Nilai indeks		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.176 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Papua	5	99,61 Nilai indeks		
		03 - Persentase pengeluaran makanan berpendapatan rendah Provinsi Papua	5	N/A%		
		04 - Persentase rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan Provinsi Papua	5	N/A%		
		05 - Persentase rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan Provinsi Papua Barat	5	49,30%		
		06 - Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari Provinsi Papua	5	N/A Gram		
		07 - Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari Provinsi Papua Barat	5	57 Gram		
	03 - Meningkatnya sektor ekonomi wilayah adat dan kawasan strategis di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB	5	4 - 4,4%		
		02 - Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	5	5 - 7%		
		03 - Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat	5	7%		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.177 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 – Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	5	7 – 10,2%		
		05 – Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB	5	5-6%		
		06 - Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua	5	5-6,5 Nilai minimum - nilai maksimum		
		07 – Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi	5	>1 Nilai indeks		
	04 - Meningkatnya sektor Pariwisata di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 – Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)		1 Jumlah Destinasi		
		02 - Proporsi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB	5	N/A %		
KP	02.07.03 - Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	5	45,40 Nilai	24.641,8	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Sorong (Angka perhitungan sementara)	5	38,99 Nilai		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.178 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota		
		03 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 Kota		
PRO-P	02.07.03.01 - Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Papua	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	1.775,4	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.07.03.02 - Pembangunan kota baru di Provinsi Papua Barat	01 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 Kota	22 866,4	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KP	02.07.04 - Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi	04 - Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Papua	5	36,28 Nilai Indeks	2.827.693,7	
			01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Wilayah Papua	1 dan 5	34,22 Nilai Indeks		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.179 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			03 - Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1 dan 5	40,36 Nilai Indeks		
		02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal	01 - Jumlah Daerah Tertinggal	5	N/A (Sesuai PP 78/2014, evaluasi penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 tahun sekali pada akhir RPJMN, sehingga jumlah daerah tertinggal 2022 belum dapat ditentukan) Kabupaten		
			02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,52 IPKP		
			03 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	17 Kecamatan		
PRO-P	02.07.04 01 - SDM Unggul, Inovatif, Berkarakter dan Kontekstual Papua	01 - Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Jumlah sekolah berpola asrama yang beroperasi	1	3 unit	400.008,7	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			02 - Jumlah pelajar Papua menerima bantuan biaya pendidikan	1	34.370 orang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.180 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah guru yang terpenuhi di Wilayah Papua	1	4.487 orang		
	02 - Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Kesehatan di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Jumlah Kab/Kota yang mencapai API < 1/1.000 penduduk	1	42 Kabupaten/Kota		
		02 - Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat	1	89 %		
		03 - Jumlah Kabupaten/Kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1%	1	42 Kabupaten/Kota		
		04 - Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	1	80%		
		05 - Persentase rumah sakit terakreditasi	1	90%		
	03 - Meningkatnya perlindungan anak, perempuan, keluarga miskin dan partisipasi pemuda di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran	1	361.305 Keluarga		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.181 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh layanan psikososial	1	3.000 Jiwa		
PRO-P	02.07.04.02 - Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Papua	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Papua	5	15 Kecamatan	121.143,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P	02.07.04.04 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Papua	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Papua	1 dan 5	37,02 Nilai Indeks	360,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.07.04.07 - Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	01 - Meningkatnya konektivitas di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Panjang jalan yang ditingkatkan	2	76,5 Km	1.909.571,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
			02 - Jumlah pelabuhan laut yang dikembangkan	2	2 Lokasi		
			03 - Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dikembangkan	2	5 Lokasi		
			04 - Jumlah bandara yang dikembangkan	2	6 Lokasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.182 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Meningkatnya akses infrastruktur dasar di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	01 - Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Papua dan Papua Barat	2	91 %		
			02 - Persentase Akses Sanitasi Layak di Provinsi Papua dan Papua Barat	2	60 %		
			03 - Persentase Akses Rumah Layak Huni di Provinsi Papua dan Papua Barat	2	49 %		
			04 - Rasio Elektrifikasi di Provinsi Papua dan Papua Barat	2	100 %		
PRO-P	02.07.04.08 - Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	01 - Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	01 - Indeks Kualitas Air	1	55,3 IKA	162.511,9	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			02 - Indeks Kualitas Air Laut	1	59,5 IKAL		
			03 - Indeks Kualitas Udara	1	84,3 IKU		
			04 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut	1	63,5 IKTL		
		02 - Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Perubahan Iklim	01 - Indeks Risiko Bencana	1	135, 38 Nilai Indeks		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.183 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	1	4 Menit		
		03 - Meningkatnya Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Terhadap <i>Baseline</i>	01 - Persentase penurunan emisi GRK nasional terhadap <i>baseline</i>	1	26,6 %		
			02 - Persentase penurunan intensitas emisi GRK nasional terhadap <i>baseline</i>	1	29,3 %		
PRO-P	02 07 04 26 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Jayapura dan Merauke	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Jayapura dan Merauke	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Jayapura dan Merauke	1 dan 5	43,25 Nilai Indeks	56 511,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PRO-P	02.07.04.27 - Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Senggi, Salor, dan Muting	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Senggi, Salor, dan Muting	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Papua	5	38,85 Nilai Indeks	2.158,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.07.04.29 - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura	5	0,41 IPKP	38.840,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.184 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.07.04.30 - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Merauke	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Merauke	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke	5	0,61 IPKP	800,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.07.04.31 - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tanah Merah	5	0,53 IPKP	98.100,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	02.07.04.33 - Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Raja Ampat dan Manokwari	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Raja Ampat dan Manokwari	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Raja Ampat dan Manokwari	1 dan 5	36,45 Nilai Indeks	701,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PRO-P	02.07.04.34 - Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur dan Bomberay - Tomage	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur dan Bomberay - Tomage	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Papua Barat	5	32,44 Nilai Indeks	5.570,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PRO-P	02.07.04.36 - Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Papua Barat	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Papua Barat	1 dan 5	41,21 Nilai Indeks	31.316,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.185 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.07.04 37 - Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua Barat	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Papua Barat	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Papua Barat	5	2 Kecamatan	100,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
KP	02.07.05 - Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	2,5 Nilai	59.385,2	
		02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	24 %		
		03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	29 Daerah		
		04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	25 Daerah		
		05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.097 Dokumen		
		06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	2 Daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.186 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	25 Daerah		
	08 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	77,79 %		
	09 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 Daerah		
	10 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	459.916 Hektar		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	531.640 Hektar		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	22 Materi Teknis dan Ranperkada		
		04 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	8 Persetujuan Substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	5 Materi Teknis dan Ranperda		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.187 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			06 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 Persetujuan Substansi RTRW		
			07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah	5	5 Nilai		
			08 - Jumlah Materi Teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	1 Materi Teknis dan Raperpres RTR		
			09 - Jumlah Penanganan Perkara Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	5	1 Perkara		
PRO-P	02.07.05.04 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Papua Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	650 Dokumen	4.320,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	78,31 %		
		03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	24 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.188 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	10 Daerah		
		05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	9 Daerah		
		06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	9 Daerah		
		07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		
		08 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	4	2 Rekomendasi		
PRO-P	02.07.05.05 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	3.600 Bidang	3.318,2	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.189 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	1.600 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	3.900 Bidang		
PRO-P	02.07 05 06 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Papua Barat	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	8 Materi Teknis dan Ranperkada	3.900,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	3 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 Materi Teknis dan Ranperda		
			04 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 Persetujuan Substansi RTRW		
			05 - Jumlah Materi Teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	1 Materi Teknis dan Raperpres RTR		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.190 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	02.07.05.07 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Papua	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	447 Dokumen	3.056,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	77,26 %		
		03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	24 %		
		04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	19 Daerah		
		05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	16 Daerah		
		06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	16 Daerah		
		07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 Rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.191 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		08 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	4	2 Rekomendasi		
PRO-P	02.07.05 08 - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah	5	12 130 Bidang	28 872,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	2.600 Bidang		
		03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	13.740 Bidang		
PRO-P	02.07.05.09 - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Papua	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	14 Materi Teknis dan Ranperkada	4 230,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
			02 - Jumlah Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	5	5 Persetujuan Substansi RDTR		
			03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	4 Materi Teknis dan Ranperda		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.192 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			04 - Jumlah Penanganan Perkara Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	1 Perkara		
PRO-P	02.07 05 10 - Tata Kelola Pemerintahan, dan Keamanan dengan Tetap Menghormati HAM	01 - Meningkatnya afirmasi ASN melalui Manajemen Talenta ASN di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Jumlah SDM ASN Orang Asli Papua di K/L	250 Orang	11.686,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
			02 - Jumlah SDM Orang Asli Papua di Sekolah Kedinasan	250 Orang		
	02 - Narasi Tunggal Papua	01 - Jumlah Narasi Pembangunan Papua	1, 2, dan 5	207 Nilai		
	03 - Diseminasi Internasional Pembangunan Papua	01 - Jumlah diseminasi Internasional terkait dengan pembangunan Internasional	1, 2, dan 5	1 Nilai		

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- 2) Rincian pada masing-masing prioritas nasional masih terus akan dilakukan penajaman dan pendalaman kesiapan pelaksanaan. Beberapa proyek yang masih terpusat (alokasi dan lokusnya) akan terus dipertajam alokasi dan distribusi lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota nya. Untuk proyek yang mendukung lintas PP/KP/ProP dalam 1 PN, alokasi hanya di munculkan 1 (satu) kali;
- 3) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L dan KPBU, belum mencakup dukungan Transfer Ke Daerah dan Badan Usaha (BUMN/Swasta). Identifikasi dan integrasi antar instansi dan sumber pendanaan (K/L, Transfer Ke Daerah, KPBU dan Badan Usaha) akan terus dilakukan sampai dengan Pemutakhiran RKP dan APBN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.1 -

PRIORITAS NASIONAL 3 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana		
PN	03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	01 - Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	01 - Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)		2,21 per wanita usia subur usia 15-49 tahun	237 152.086,2		
			02 - Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)		99,00 %			
		02 - Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	01 - Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial		87,00 %			
			02 - Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah		75,00 %			
			03 - Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	01 - Angka Kematian Ibu (AKI)		205 per 100.000 kelahiran hidup		
				02 - Angka Kematian Bayi (AKB)		18,6 per 1.000 kelahiran hidup		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.2 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita		18,40 %		
		04 - Insidensi <i>tuberkulosis</i>		231 per 100.000 penduduk		
		05 - Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun		21,80 %		
		06 - Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun		8,90 %		
		07 - Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca		394 nilai		
		08 - Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika		385 nilai		
		09 - Nilai rata-rata hasil PISA: Sains		399 nilai		
		10 - Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas		9,13 tahun		
		11 - Harapan lama sekolah		13,57 tahun		
	04 - Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	01 - Indeks Perlindungan Anak (IPA)		69,87 nilai		
		02 - Indeks Pembangunan Gender (IPG)		91,30 nilai		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.3 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		55,61 nilai		
	05 - Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	01 - Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif		36 %		
	06 - Meningkatnya produktivitas dan daya saing	01 - Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas		46,87 %		
		02 - Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>world class university</i> Top 200		0 PT		
		03 - Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>world class university</i> Top 300		1 PT		
		04 - Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>world class university</i> Top 500		2 PT		
		05 - Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi		41,92 %		
		06 - Peringkat <i>Global Innovation Index</i>		80 - 85 Peringkat		
PP	03.01 - Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	01 - Meningkatnya cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan	1	78 %	4.735.709,8	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.4 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan <i>monitoring</i> evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	1	60 %		
			03 - Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	1	80 %		
			04 - Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	1	97 %		
			05 - Persentase Kementerian/Lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan	1	20 %		
KP	03.01.01 - Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	01 - Meningkatnya percepatan cakupan administrasi kependudukan	01 - Jumlah Pedoman/Kebijakan/SOP Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang disusun	1	40 pedoman/kebijakan/SOP	7.763,6	
PRO-P	03.01.01.01 - Perluasan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan	01 - Terlaksananya perluasan jangkauan layanan administrasi kependudukan	01 - Jumlah inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan Reformasi Birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1	1.542 inovasi	5.763,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, MAHKAMAH AGUNG
			02 - Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	1	100 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.5 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			03 - Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	1	100 %		
			04 - Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan	1	100 %		
PRO-P	03.01.01.02 - Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Kelompok Khusus	01 - Terlaksananya percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus	01 - Jumlah daerah di wilayah 3T yang mendapatkan peningkatan layanan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil yang mudah dan inovatif	1	50 daerah	2 000,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
			02 - Persentase Penduduk rentan yang terselesaikan pengurusan dokumennya	1	60 %		
KP	03.01.02 - Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan	01 - Menguatnya Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan	01 - Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikembangkan dan diintegrasikan	1	1 sistem	75.495,9	
PRO-P	03.01.02.01 - Penguatan Integrasi Data Administrasi Kependudukan	01 - Menguatnya integrasi data administrasi kependudukan	01 - Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerja sama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1	3.000 lembaga pengguna	4 013,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
			02 - Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1	900 lembaga pengguna		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.III.6 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	03.01.02.02 - Pengembangan Data dan Informasi Kependudukan (Statistik Hayati) yang Akurat, Lengkap dan Tepat Waktu	01 - Terlaksananya pengembangan data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap dan tepat waktu	01 - Jumlah <i>database</i> kependudukan yang <i>update</i>	1	1 database	71.482,3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN PUSAT STATISTIK, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
KP	03.01.03 - Pendampingan dan Layanan Terpadu	01 - Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Layanan Terpadu	01 - Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	1	78 Kabupaten/Kota	4.437.335,3	
			02 - Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan <i>monitoring</i> evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan (%)	1	60 Provinsi/Kabupaten/Kota		
			03 - Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	1	80 Kabupaten/Kota		
			04 - Persentase pengembangan standar nasional pendamping pembangunan (%)	1	100 %		
			05 - Persentase penyetaraan jenjang kualifikasi pendamping pembangunan yang dikembangkan (%)	1	40 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.7 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			06 - Persentase skema sertifikasi kompetensi pendamping pembangunan yang dikembangkan (%)	1	40 %		
PRO-P	03.01.03.01 - Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	01 - Terlaksananya dan rujukan bagi penduduk miskin dan rentan	01 - Jumlah Kabupaten/ Kota yang mengembangkan SLRT (Kabupaten/Kota)	1	514 Kabupaten/Kota	2.620.265,5	KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
			02 - Jumlah desa/kelurahan yang mengembangkan Pusat Kesejahteraan Sosial	1	3.000 Desa/Kelurahan		
PRO-P	03.01.03.02 - Penguatan Pendampingan Masyarakat	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pendamping pembangunan	01 - Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitas dan kemampuannya (orang)	1	22.000 Orang	1.817 069,8	KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN DALAM NEGERI
			02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi	1	6.000 Lembaga		
		02 - Terlaksananya pendampingan melalui pendamping desa	01 - Jumlah pendamping desa yang diberdayakan	1	36.000 Orang		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.III.8 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
KP	03 01.04 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	01 - Meningkatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	01 - Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan	1	52,6 %	215.115,0	
PRO-P	03.01.04.01 - Sinergitas Kebijakan Pengendalian Penduduk dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang	01 - Meningkatnya sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang	01 - Persentase Pemerintah Daerah yang mempergunakan <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah	1	60 %	1.287,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
PRO-P	03.01.04.02 - Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Kelembagaan Kependudukan	01 - Menguatnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan kependudukan	01 - Persentase Pemerintah Daerah yang memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	4	60 %	1.831,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
PRO-P	03.01.04.03 - Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan	01 - Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan	01 - Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangsa Kencana	4	63,41 indeks	211.997,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
PP	03.02 - Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	01 - Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan	01 - Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1	87 %	153.722.357,8	
			02 - Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas	1	13 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.9 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		03 - Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia	1	10,50 %			
		04 - Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif (%)	1	11,65 %			
		05 - Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Formal	1	32,27 %			
		06 - Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Informal	1	21,73 (dengan PBI); 5,43 (tanpa PBI) %			
KP	03.02.01 - Sistem Jaminan Sosial Nasional	01 - Terwujudnya sistem jaminan sosial nasional	01 - Jumlah kajian penguatan dan harmonisasi peraturan perundangan terkait jaminan sosial	1	5 dokumen	46.493.900,0	
PRO-P	03.02.01.01 - Pengembangan Program Jaminan Sosial	01 - Terlaksananya pengembangan program jaminan sosial	01 - Jumlah strategi sosialisasi, advokasi, dan edukasi publik terpadu sistem jaminan sosial nasional	1	1 dokumen	46.487.400,0	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
			02 - Jumlah sistem <i>monitoring</i> dan evaluasi jaminan sosial terpadu berbasis digital	1	1 dokumen		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.10 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	03.02.01 02 - Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional	01 - Jumlah agen profesional penggerak jaminan sosial (Agenalis)	1	1.000 orang	6 500,0	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
		02 - Jumlah peserta BPJS kesehatan dan BP Jamsostek yang terintegrasi berbasis NIK	1	21 %		
KP	03.02.02 - Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	01 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan	1	50 %	96.704.436,2	
		02 - Rumah tangga miskin dan rentan dengan akses layanan keuangan	1	60 %		
		03 - Penyaluran Bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan	1	10.000 000 KPM		
		04 - Penyaluran Bantuan Pangan melalui Kartu Sembako Murah	1	18.800.000 KPM		
		05 - Penyaluran Bantuan LPG 3 KG	1	15.000.000 KPM		
		06 - Penyaluran Bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA	1	31.400.000 KPM		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.III.11 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	03.02.02.01 - Penyelenggaraan Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran	01 - Terselenggaranya Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran	01 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran	4	10.000.000 KPM	96.704.436,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
			02 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan pangan melalui program kartu sembako murah	1	18.800.000 KPM		
			03 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan subsidi listrik	1	31.400.000 KPM		
	02 - Tersedianya Pasokan Hilir Migas sesuai kebutuhan	01 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan energi LPG 3 kg	1	15.000.000 KPM			
		02 - Jumlah Volume Elpiji 3 kg yang Tepat Sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran	2	7.754-7.836 Ribu Ton			
KP	03.02.03 - Perlindungan Sosial Adaptif	01 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang adaptif	01 - Penduduk yang memperoleh bantuan sosial bencana dan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1	578.500 jiwa	9.748.755,2	
PRO-P	03.02.Q3.01 - Pelaksanaan Perlindungan Sosial yang Adaptif	01 - Terlaksananya perlindungan sosial bagi penduduk korban bencana	01 - Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh bantuan perlindungan sosial bencana alam	1	250.000 jiwa	9.748.755,2	KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN KOPERASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.12 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
						DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		02 - Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh bantuan perlindungan sosial bencana sosial	1	20.000 jiwa			
		03 - Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh layanan psikososial	1	3.000 Jiwa			
KP	03.02.04 - Kesejahteraan Sosial	01 - Meningkatnya kualitas kesejahteraan sosial penduduk rentan	01 - Persentase lanjut usia yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial	1	21,7 %	775.266,4	
			02 - Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial	1	16,62 %		
			03 - Jumlah kelompok rentan lain yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	43.000 Jiwa		
PRO-P	03.02.04.01 - Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas dan kelembagaan bagi penyandang disabilitas	01 - Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	60.000 Jiwa	341.006,1	KEMENTERIAN SOSIAL
			02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial penyandang disabilitas yang memperoleh penguatan kapasitas	1	200 lembaga		
			03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	800 Jiwa		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.13 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	03.02.04.02 - Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Kelanjutusiaan (Lansia Aktif dan Produktif)	01 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelanjutusiaan	01 - Jumlah lanjut usia yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	60 000 Jiwa	121.641,9	KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KESEHATAN
			02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia yang memperoleh penguatan kapasitas	1	200 Lembaga		
			03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	800 Jiwa		
PRO-P	03.02.04.03 - Pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang Berbasis Komunitas yang Terintegrasi (<i>Long-Term Care</i>)	01 - Terlaksananya Perawatan Jangka Panjang berbasis komunitas yang terintegrasi (<i>Long Term Care</i>)	01 - Jumlah lansia yang memperoleh layanan berbasis komunitas (jiwa)	1	59,5 %	20.000,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN SOSIAL
			02 - Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan sosial lanjut usia terintegrasi	1	10 Kab/Kota		
PRO-P	03.02.04.04 - Penguatan Pelayanan Sosial Kelompok Rentan Lainnya	01 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan bagi korban penyalahgunaan napza	01 - Jumlah korban penyalahgunaan napza yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	367.500 jiwa	292.618,3	KEMENTERIAN SOSIAL
			02 - Jumlah Institusi Penerima Wajib Lapori yang memperoleh penguatan kapasitas	1	150 Lembaga		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.14 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial bagi korban penyalahgunaan napza yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	3.500 Jiwa		
	02 - Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak	01 - Jumlah anak telantar yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	60.000 Jiwa		
		02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial anak yang memperoleh penguatan kapasitas	1	200 Lembaga		
		03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial anak yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	800 Jiwa		
	03 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan bagi tuna sosial dan korban tindak kekerasan perdagangan orang	01 - Jumlah tuna sosial dan korban tindak kekerasan perdagangan orang yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	7.000 Jiwa		
		02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial tuna sosial dan korban tindak kekerasan perdagangan orang yang memperoleh penguatan kapasitas	1	100 Lembaga		
		03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial tuna sosial dan korban tindak kekerasan perdagangan orang yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	40 Jiwa		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.15 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan bagi Orang dengan HIV	01 - Jumlah orang dengan HIV yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	4.000 Jiwa		
		05 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan bagi Komunitas Adat Terpencil	01 - Jumlah warga Komunitas Adat Terpencil yang memperoleh pemberdayaan sosial	1	5.000 Jiwa		
PP	03 03 - Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	01 - Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah	01 - Angka Kematian Neonatal (AKN)	1	11,6 per 1 000 kelahiran hidup	28.295.757,4	
			02 - Persentase persalinan di fasyankes	1	91,0 %		
			03 - Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern <i>Contraceptive Prevalance Rate</i> (mCPR)	1	62,50 %		
			04 - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	1	8,00 %		
			05 - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR 15-19)	1	21 kelahiran hidup per 1.000 perempuan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.16 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		06 - Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita	1	7,50 %		
		07 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	1	365 Kabupaten/kota		
		08 - Insidensi HIV	1	0,19 per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV		
		09 - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	1	71,00 %		
		10 - Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	1	85 %		
		11 - Persentase rumah sakit terakreditasi	1	95 %		
		12 - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	1	65 %		
		13 - Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	1	80 %		
		14 - Persentase obat memenuhi syarat	1	92,25 %		
		15 - Persentase makanan memenuhi syarat	1	83 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.17 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
KP	03.03.01 - Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi	01 - Meningkatnya kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	01 - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	1	71,00 %	699.883,8	
			02 - Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1	26,75 %		
PRO-P	03.03.01.01 - Penurunan Kematian Ibu dan Bayi	01 - Terwujudnya Penurunan Kematian Ibu dan Bayi	01 - Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	1	91,0 %	382.484,7	KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			02 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	1	452 Kab/Kota		
PRO-P	03.03.01.02 - Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi	01 - Meningkatnya KB dan Kesehatan Reproduksi	01 - Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (<i>Drop Out/DO</i>)	1	23,10 %	317.399,1	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KESEHATAN
KP	03.03.02 - Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	01 - Terlaksananya Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	01 - Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	1	50 %	4.590.690,1	
			02 - Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	1	13,0 %		
PRO-P	03.03.02.01 - Penurunan <i>Stunting</i>	01 - Terwujudnya penurunan <i>stunting</i>	01 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi	1	90 %	4.590.690,1	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.18 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
						KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PERTANIAN
KP	03.03.03 - Peningkatan Pengendalian Penyakit	01 - Meningkatnya Pengendalian Penyakit	01 - Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)	1	50 %	14 677.999,4
			02 - Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC <i>Success Rate</i>)	1	90 %	
			03 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	1	365 Kabupaten/Kota	
			04 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko	1	95 %	
			05 - Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	1	458 kabupaten/kota	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.19 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		06 - Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	1	106 kabupaten/kota			
		07 - Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	1	19 desa			
		08 - Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	1	232 kabupaten/kota			
		09 - Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1	424 kabupaten/kota			
PRO-P	03.03.03.01 - Pengendalian Penyakit Menular	01 - Terkendalinya penyakit menular	01 - Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	1	85 %	14.535.998,1	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT), KEMENTERIAN KESEHATAN, LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)
			02 - Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)	1	90 %		
			03 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API <1/1.000 penduduk	1	484 kabupaten/kota		
			04 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko	1	95 kabupaten/kota		
			05 - Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat	1	89 %		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.III.20 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			06 - Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1%	1	207 kabupaten/kota		
			07 - Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	1	19 desa		
PRO-P	03.03.03.02 - Pengendalian Penyakit Tidak Menular	01 - Terkendalinya penyakit tidak menular	01 - Jumlah kabupaten/kota yg melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% puskesmas	1	308 kabupaten/kota	142.001,3	KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
			02 - Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1	424 kabupaten/kota		
KP	03.03.04 - Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	01 - Terlaksananya Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat(Germas)	01 - Jumlah kabupaten/kota sehat	1	280 kabupaten/kota	909.122,9	
PRO-P	03.03.04.01 - Pengembangan Lingkungan Sehat	01 - Terlaksananya Pengembangan Lingkungan Sehat	01 - Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	1	60 %	656.273,3	KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
			02 - Jumlah kabupaten/kota sehat	1	280 kabupaten/kota		
PRO-P	03.03.04.02 - Penguatan Promosi Germas	01 - Terlaksananya Penguatan Promosi Germas	01 - Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas	1	40 kabupaten/kota	252.849,6	KEMENTERIAN KESEHATAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.21 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Persentase kabupaten/kota dengan minimal 80% posyandu aktif	1	50 kabupaten/kota		
KP	03.03.05 - Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	01 - Menguatnya Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	1	0 %	7.418.061,2	
		02 - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	1	59 %		
		03 - Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	1	80 %		
		04 - Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	1	80 %		
		05 - Persentase rumah sakit terakreditasi	1	90 %		
		06 - Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	1	92 %		
		07 - Jumlah kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan	1	45 %		
		08 - Persentase obat memenuhi syarat	1	86,60 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.22 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		09 - Persentase makanan memenuhi syarat	1	82 %			
PRO-P	03.03.05.01 - Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	01 - Terlaksananya Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	01 - Persentase RS milik pemerintah daerah yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	1	90 %	5.618.136,3	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PERTAHANAN
		02 - Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	1	90 %			
		03 - Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi	1	4.720 FKTP			
		04 - Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi	1	1.195 FKRTL			
PRO-P	03.03.05.02 - Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	01 - Terlaksananya Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	01 - Persentase puskesmas tanpa dokter	1	0 %	551.402,3	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.III.23 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		02 - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	1	59 %			
		03 - Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	1	80 %			
PRO-P	03.03.05 03 - Pemenuhan dan Peningkatan Daya Saing Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	01 - Terlaksananya Pemenuhan dan Peningkatan Daya Saing Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	01 - Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	1	92 %	308.465,2	KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT), LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)
		02 - Persentase alat kesehatan memenuhi syarat	1	93 %			
PRO-P	03.03.05 04 - Penguatan Tata Kelola, Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	01 - Terlaksananya Penguatan Tata Kelola, Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	01 - Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan	1	45 lokasi	440.458,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
		02 - Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan yang disusun	1	2 dokumen			
		03 - Persentase rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan yang dimanfaatkan untuk perbaikan pelaksanaan prioritas nasional	1	100 %			
PRO-P	03.03.05.05 - Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan	01 - Terlaksananya Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase obat memenuhi syarat	1	86,60 %	499.598,5	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.24 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Persentase makanan memenuhi syarat	1	82 %		
PP	03.04 - Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	01 - Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas	01 - Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya : SMA/SMK/MA Sederajat	1	0,81 Rasio	36.840.297,8
		02 - Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya . Pendidikan Tinggi	1	0,24 Rasio		
		03 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%): Membaca	1	33 %		
		04 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%): Matematika	1	30 %		
		05 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%): Sains	1	42,6 %		
		06 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi : Literasi	1	59,20 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.25 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		07 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi : Numerasi	1	28,30 %		
		08 - Tingkat penyelesaian pendidikan SD/MI/ sederajat	1	97,93 %		
		09 - Tingkat penyelesaian pendidikan SMP/MTs/ sederajat	1	90,54 %		
		10 - Tingkat penyelesaian pendidikan SMA/SMK/MA/sederajat	1	69,08 %		
		11 - Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini	1	69,63 %		
		12 - Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT)	1	31,52 %		
KP	03.04.01 - Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	01 - Meningkatnya kualitas pengajaran dan pembelajaran	01 - Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku	100 %	1.568 600,1	
			02 - Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran	100 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.26 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	03.04.01 01 - Penerapan Kurikulum dan Pola Pembelajaran Inovatif	01 - Terlaksananya penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	01 - Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan	1	9 Model Kurikulum	282.400,1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
			02 - Jumlah model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dan berbasis hasil asesmen	1	108 Model Pembelajaran		
PRO-P	03.04.01.02 - Peningkatan Kompetensi Pendidik	01 - Meningkatkan kompetensi pendidik	01 - Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	1	57.889 orang	692.010,1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
PRO-P	03.04.01 03 - Penguatan Kualitas Penilaian Pendidikan	01 - Menguatnya kualitas penilaian pendidikan	01 - Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan AKM	1	60 %	313.597,8	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
PRO-P	03.04.01.04 - Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	01 - Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satuan pendidikan	01 - Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK	1	7,25 %	195.549,0	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PRO-P	03.04.01 05 - Integrasi <i>Softskill</i> dalam Pembelajaran	01 - Terwujudnya integrasi <i>softskill</i> dalam pembelajaran	01 - Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran	1	100 %	85.043,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
KP	03.04.02 - Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	01 - Terwujudnya pemerataan akses dan Wajib Belajar 12 Tahun	01 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	1	108,37 %	18.770.479,1	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.27 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		02 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	1	94,79 %			
		03 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA / SMK / MA / SMLB / Sederajat	1	89,36 %			
		04 - Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/RA/BA	1	37 %			
PRO-P	03.04.02.01 - Sarana dan Prasarana Pendidikan	01 - Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan	01 - Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana prasarananya	1	25.087 Lembaga	7.924.018,7	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	03.04.02.02 - Bantuan Pendidikan bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi, dan Berbakat	01 - Terlaksananya bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	01 - Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	1	100 %	9.892.849,0	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PRO-P	03.04.02.03 - Penanganan Anak Tidak Sekolah	01 - Terlaksananya penanganan anak tidak sekolah	01 - Jumlah kabupaten/kota dengan APK SD/MI/SDLB sekurang-kurangnya 100%	1	411 Kabupaten/Kota	125.388,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
		02 - Jumlah kabupaten/kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang-kurangnya 100%	1	337 Kabupaten/Kota			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.28 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah kabupaten/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%	1	239 Kabupaten/Kota		
PRO-P	03.04.02.04 - Penguatan Pelayanan 1 Tahun Prasekolah	01 - Terlaksananya penguatan pelayanan 1 tahun prasekolah	1	206 Kabupaten/Kota	828.223,1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
KP	03.04.03 - Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	01 - Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan	1	18,46 %	15.252 687,4	
		02 - Persentase guru yang sesuai standar pendidik	1	91,41 %		
PRO-P	03.04.03.01 - Pendidikan Profesi Guru dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik	01 - Terlaksananya pendidikan profesi guru dan peningkatan kualifikasi pendidik	1	91,41 %	710.365,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
		02 - Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	1	89,21 %		
PRO-P	03.04.03.02 - Pemenuhan dan Distribusi Tenaga Pendidik Berbasis Kebutuhan	01 - Terlaksananya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	1	2.266 Satuan Pendidikan	483.660,7	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.29 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	6 797 Satuan Pendidikan		
			03 - Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	6.117 Satuan Pendidikan		
PRO-P	03.04.03.03 - Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Berbasis Kinerja	01 - Terlaksananya peningkatan kesejahteraan pendidik berbasis kinerja	01 - Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerjanya	1	42,60 %	14.058.661,4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
KP	03.04.04 - Penjaminan Mutu Pendidikan	01 - Terwujudnya mutu pendidikan	01 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SD/MI)	1	81,19 %	1.091.250,9	
			02 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SMP/MTS)	1	76,01 %		
			03 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SMA/MA)	1	74,53 %		
			04 - Perguruan Tinggi Terakreditasi A (PT)	1	160 PT		
PRO-P	03.04.04.01 - Penguatan Kapasitas dan Akselerasi Akreditasi	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi	01 - Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP	1	66.914 Satuan Pendidikan	146.901,9	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.30 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	03.04.04.02 - Perluasan Budaya Mutu Pendidikan	01 - Terwujudnya perluasan budaya mutu pendidikan	01 - Jumlah SNP yang dikembangkan untuk penyusunan kebijakan peningkatan mutu pendidikan	1	8 Dokumen	944.349,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
KP	03.04.05 - Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	01 - Meningkatnya tata kelola pendidikan	01 - Persentase kab/kota memenuhi SPM pendidikan	1	100 %	157.280,3	
PRO-P	03.04.05.01 - Penguatan Tata Kelola Pemenuhan SPM Pendidikan	01 - Terlaksananya penguatan tata kelola pemenuhan SPM pendidikan	01 - Jumlah provinsi memenuhi SPM Pendidikan	1	34 Provinsi	35.600,0	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRO-P	03.04.05.02 - Penguatan Strategi Pembiayaan dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pendidikan	01 - Menguatnya strategi pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	01 - Menguatnya strategi pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	1	243 Lembaga	65.120,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PRO-P	03.04.05.03 - Peningkatan Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan	01 - Meningkatnya sinkronisasi data pokok pendidikan	01 - Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	1	95,4 %	28.602,4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
PRO-P	03.04.05.04 - Sinkronisasi Pelaksanaan PAUD-HI	01 - Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan PAUD-HI	01 - Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	1	47 %	27.958,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.31 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PP	03.05 - Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	01 - Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha	01 - Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	1	9,44 %	82.972,1	
			02 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	1	Menurun %		
			03 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	1	75,57 - 76,63 Nilai		
			04 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	1	53,76 %		
			05 - Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	1	Menurun %		
			06 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	1	Meningkat %		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.III.32 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		07 - Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir	1	Meningkat %			
		08 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan <i>white collar</i>	1	0,55 %			
KP	03.05.01 - Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	01 - Terpenuhi Hak dan Perlindungan Anak	01 - Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	1	77,77 Indeks	31.753,8	
			02 - Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	1	67,60 Indeks		
PRO-P	03.05.01.01 - Penjaminan Pemenuhan Hak Anak secara Universal	01 - Terjaminnya pemenuhan hak anak secara universal	01 - Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak	1	3,55 %	9.160,0	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
			02 - Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang memperoleh peringkat KLA	1	290 Provinsi/Kab/Kota		
PRO-P	03.05.01.02 - Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya	01 - Terlaksananya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	01 - Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja	1	5,02 %	22 593,8	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, MAHKAMAH AGUNG, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.33 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		02 - Persentase anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus (MPK) yang mendapat layanan komprehensif	1	70 %			
KP	03.05.02 - Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	01 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	01 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	1	53,76 %	31.228,5	
PRO-P	03.05.02.01 - Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG	01 - Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG	01 - Indeks PUG Nasional	1	71,03 Indeks	12.350,0	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRO-P	03.05.02.02 - Perlindungan Perempuan, termasuk Pekerja Migran dari Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan orang	01 - Terwujudnya Perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang	01 - Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	1	85 %	18.878,5	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KP	03.05.03 - Kualitas Pemuda	01 - Terwujudnya pemuda yang berkarakter dan berdaya saing	01 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir	1	81,97 %	19.989,8	
PRO-P	03.05.03.01 - Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan	01 - Terwujudnya penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan	01 - Persentase provinsi yang melakukan penyusunan RAD kepemudaan	1	50 %	7.639,8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.34 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Persentase tim koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan di tingkat pusat dan provinsi yang terbentuk	1	50 %		
PRO-P	03.05.03.02 - Pencegahan Perilaku Berisiko	01 - Terlindunginya pemuda dari perilaku berisiko	01 - Angka kesakitan pemuda	1	7,24 Nilai	520,0	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PRO-P	03.05.03 03 - Partisipasi Aktif Sosial dan Politik Pemuda	01 - Meningkatnya partisipasi sosial dan politik pemuda	01 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	1	Meningkat Nilai	11.830,0	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PP	03.06 - Pengentasan Kemiskinan	01 - Memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	01 - Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (persen)	1	40 %	730.357,3	
			02 - Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh akses kepemilikan tanah (rumah tangga)	1	482.521 Rumah Tangga		
KP	03.06.01 - Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga	01 - Terakselerasinya penguatan ekonomi keluarga miskin	01 - Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh modal usaha ultra mikro (%)	1	0,11 %	23.955,8	
PRO-P	03.06 01 01 - Fasilitasi Modal Usaha	01 - Terfasilitasinya Modal Usaha Bagi Keluarga Miskin dan Rentan	01 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh modal usaha ultra mikro (KK)	1	3.328.071 KK	23 955,8	KEMENTERIAN KEUANGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.35 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
KP	03.06.02 - Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial		01 - Terlaksananya pengembangan keperantaraan usaha dan pemberdayaan sosial	01 - Jumlah lembaga yang mengembangkan keperantaraan usaha (lembaga)	1	3.900 Lembaga	45.484,3	
				02 - Jumlah pendamping kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	1	2.000 Orang		
PRO-P	03.06.02.01 - Fasilitas Keperantaraan Usaha Produktif	01 - Meningkatnya lembaga yang memperoleh fasilitas keperantaraan usaha	01 - Jumlah BUMDes yang dikembangkan	1	500 Badan Usaha	33.775,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	
PRO-P	03.06.02.02 - Penguatan Pemberdayaan Berdampak Sosial	01 - Menguatnya pemberdayaan berdampak sosial	01 - Jumlah kelompok yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial dari dunia usaha (kelompok)	1	200 Kelompok	4.422,8	KEMENTERIAN SOSIAL	
PRO-P	03.06.02.03 - Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan		01 - Terlaksananya Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan	01 - Jumlah KTH Mandiri (unit)	1	300 Kelompok	7.286,4	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				02 - Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS (pembentukan wanawiyata widyakarya) (unit)	1	210 Kelompok Masyarakat		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.36 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		03 - Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang andal (Perhutanan Sosial, RHL, KPH, Gambut, dan Kemitraan Konservasi) (orang)	1	6.500 Orang			
KP	03.06.03 - Reforma Agraria	01 - Terlaksananya Reforma Agraria	01 - Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah	5	0,0025 Indeks	531.594,5	
		02 - Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat Penerima Reforma Agraria	5	15 %			
PRO-P	03.06.03.01 - Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	01 - Terlaksananya penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)	01 - Luas sumber TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan) (Ha)	5	626.400 Hektar	138.124,5	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PRO-P	03.06.03.02 - Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dan Legalisasi atas Tora	01 - Terlaksananya Legalisasi atas TORA dan Meningkatnya Kualitas Data Pertanahan	01 - Jumlah bidang tanah yang didistribusikan dan dilegalisasi (Bidang)	5	423.421 Bidang	177.529,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PRO-P	03.06.03.03 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas TORA	01 - Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA	01 - Jumlah masyarakat yang menerima bantuan pemberdayaan dalam kerangka reforma agraria (KK)	5	129.600 Kepala Keluarga	215.940,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
KP	03.06.04 - Perhutanan Sosial	01 - Terwujudnya kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	01 - Luas Distribusi Akses Kelola dan Manfaat Kawasan Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan bagi Masyarakat (Ha)	1	1.684.968,12 Ha	129.322,7	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.37 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	03.06.04.01 - Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	01 - Terkelolanya kawasan hutan oleh masyarakat	01 - Luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (Ha)	1	1.684.968,12 Ha	129 322,7	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PP	03.07 - Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	01 - Meningkatnya produktivitas dan daya saing	01 - Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang)	1	2,4 juta orang	12.744.634,0	
			02 - Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	1	24,11 %		
			03 - Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	1	59,71 %		
			04 - Jumlah prototipe dari perguruan tinggi	5	219 prototipe		
			05 - Jumlah produk inovasi dari <i>tenant</i> Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina	5	400 produk		
			06 - Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha	5	150 inovasi		
			07 - Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik	5	2.500 paten		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.38 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		08 - Jumlah paten <i>granted</i> (domestik)	5	900 paten		
		09 - Persentase Sumber Daya Manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3	1	14,96 %		
		10 - Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan	1	126 PUI		
		11 - Jumlah pranata litbang yang terakreditasi (aktif)	1	65 lembaga		
		12 - Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan	2	12 infrastruktur		
		13 - Jumlah <i>Science Techno Park</i> yang ada yang dikembangkan berbasis perguruan tinggi	5	5 unit		
		14 - Jumlah <i>Science Techno Park</i> yang ada yang dikembangkan berbasis nonperguruan tinggi	2	3 unit		
		15 - Jumlah produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan	5	1 produk		
		16 - Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: Penerapan teknologi untuk berkelanjutan pemanfaatan sumber daya alam (teknologi)	5	15 teknologi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.39 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			17 - Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana (teknologi)	5	35 teknologi		
			18 - Peringkat pada Asian Games	1	12 besar Peringkat		
			19 - Peringkat pada Asian Para Games	1	8 besar Peringkat		
KP	03.07.01 - Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja sama Industri	01 - Terlaksananya pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri	01 - Lulusan pendidikan vokasi bersertifikat kompetensi	1	1.890.345 Orang	9 058 944,8	
			02 - PT Vokasi berakreditasi A	1	12 PT Vokasi		
			03 - Jumlah lulusan pendidikan menengah vokasi	1	1.997 944 orang		
			04 - Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi	1	67.767 Orang		
			05 - Jumlah lulusan pelatihan vokasi (pelaksanaan Kartu Pra-Kerja)	1	2,4 Juta Orang		
			06 - Jumlah pemagangan dalam negeri (SMK)	1	1.992.268 Orang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.40 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
			07 - Jumlah pemagangan luar negeri (SMK)	1	5.676 Orang		
PRO-P	03.07.01.01 - Peningkatan Peran dan Kerja sama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01 - Meningkatnya peran dan kerja sama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi	01 - Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran	1	840 Sekolah	2.802.122,4	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PRO-P	03.07.01.02 - Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01 - Terlaksananya reformasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi	01 - Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitasi pengembangan sarana prasarana	1	280 SMK	5.621.589,6	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.41 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
			02 - Persentase SMK yang menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>	1	11 %		
PRO-P	03.07.01.03 - Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi	01 - Meningkatnya kualitas pendidik vokasi	01 - Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri	1	7.800 Orang	331.906,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
			02 - Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> berstandar industri	1	2 160 Orang		
			03 - Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri	1	441 Orang		
PRO-P	03.07.01.04 - Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01 - Menguatnya tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi	01 - Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD	1	65 Sekolah	47.259,5	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRO-P	03.07.01.05 - Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi	01 - Menguatnya sistem sertifikasi kompetensi	01 - Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	1	1.890.345 Orang	256.067,4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.42 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
						KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
KP	03.07.02 - Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas	01 - Menguatnya pendidikan tinggi berkualitas	01 - Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional	1	24.536 artikel	17.423,8	
			02 - Jumlah sitasi di jurnal internasional	1	51.291 sitasi		
PRO-P	03.07.02.01 - Perguruan Tinggi sebagai Produsen Iptek Inovasi dan Pusat Keunggulan	01 - Terwujudnya perguruan tinggi sebagai produsen iptek inovasi dan pusat keunggulan	01 - Jumlah kekayaan intelektual (KI) yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi	1	1.392 KI	16.720,0	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)
PRO-P	03.07.02.03 - Peningkatan Kualitas Lulusan PT	01 - Meningkatnya kualitas lulusan PT	01 - Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun	1	242.000 Orang	703,8	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KEUANGAN
KP	03.07.03 - Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi	01 - Meningkatnya Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi	01 - Jumlah paten <i>granted</i> (domestik)	5	900 Paten	2.423.748,6	
PRO-P	03.07.03.01 - Pemanfaatan Iptek dan Penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	01 - Terlaksananya Pemanfaatan Iptek dan Penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	01 - Jumlah hasil inovasi <i>Flagship</i> PRN	1	2 produk	1.210.976,6	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN), LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN), BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT), LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI), BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN),



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.III.43 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
							BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)
PRO-P	03.07.03.02 - Pengembangan <i>Research Power-House</i>	01 - Terlaksananya Pengembangan <i>Research Power-House</i>	01 - Jumlah SDM Iptek yang ditingkatkan kualitasnya	1	850 orang	952.727,8	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN), BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN), LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI), BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)
PRO-P	03.07.03.03 - Penciptaan Ekosistem Inovasi	01 - Terlaksananya Penciptaan Ekosistem Inovasi	01 - Jumlah STP yang ditingkatkan kualitasnya	1	4 lembaga	260.044,2	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN), LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI), BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN), KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KP	03.07.04 - Prestasi Olahraga	01 - Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat internasional	01 - Jumlah perolehan medali emas Asian Games	1	8 Medali emas	1.244.516,9	
			02 - Jumlah perolehan medali emas Asian Para Games	1	20 Medali Emas		
PRO-P	03.07.04.01 - Penguatan dan Penataan Regulasi Keolahragaan	01 - Terlaksananya penguatan dan penataan regulasi keolahragaan	01 - Kebijakan yang disusun dan dimanfaatkan dalam rangka penguatan <i>Sport Big Data</i> dan <i>Sport Science</i>	1	1 NSPK	2.353,5	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
			02 - Kebijakan yang disusun dan dimanfaatkan terkait sinergi olahraga pendidikan dan olahraga prestasi serta standarisasi sekolah khusus keolahragaan dan sentra keolahragaan usia muda	1	1 NSPK		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.44 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			03 - Kebijakan yang disusun dan dimanfaatkan dalam rangka pembangunan pusat pelatihan atlet Olimpiade dan pelatihan nasional di daerah berbasis cabang olahraga Olimpiade	1	1 NSPK		
PRO-P	03.07.04 02 - Pengembangan Budaya Olahraga	01 - Terlaksananya pengembangan budaya olahraga di masyarakat	01 - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	1	36,39 %	55.050,1	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PRO-P	03.07.04.03 - Penataan Sistem Pembinaan Olahraga Berbasis Cabang Olahraga Olimpiade/Paralimpiade dan Potensi Daerah	01 - Terlaksananya penataan sistem pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade, Paralimpiade dan potensi daerah	01 - Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga Olimpik yang merupakan alumni PPLP	1	10 %	1.112.624,9	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
			02 - Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga Olimpik yang merupakan alumni Sekolah Khusus/Keberbakatan Olahraga (SKO)	1	10 %		
			03 - Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga Olimpik yang merupakan alumni PPLM	1	5 %		
			04 - Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahragawan Paralimpik yang merupakan alumni Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas Indonesia (SKODI)	1	20 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.45 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		05 - Persentase Sekolah Khusus/Keberbakatan Olahraga yang telah terstandarisasi dan fokus membina cabang olahraga prioritas sesuai desain manajemen talenta nasional bidang olahraga	1	25 %			
		06 - Persentase PPLP yang telah terstandarisasi dan fokus membina cabang olahraga prioritas sesuai desain manajemen talenta nasional bidang olahraga	1	10 %			
		07 - Persentase olahragawan muda cabang olahraga Olimpik pada olahragawan andalan nasional	1	30 %			
		08 - Persentase olahragawan muda cabang olahraga Paralimpik pada olahragawan andalan nasional	1	15 %			
		09 - Jumlah pusat pelatihan nasional yang terbentuk di daerah sesuai Desain Besar Olahraga	1	10 Provinsi			
PRO-P	03.07.04.04 - Penataan Kelembagaan Olahraga	01 - Terlaksananya penataan kelembagaan olahraga	01 - Organisasi keolahragaan berbasis Olimpik yang memenuhi standar minimal keolahragaan	1	22 Lembaga	12.577,1	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PRO-P	03.07.04.05 - Peningkatan Ketersediaan Tenaga Keolahragaan Berstandar Internasional	01 - Terlaksananya peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional	01 - Tenaga keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang bersertifikat internasional	1	150 Orang	14.924,1	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.46 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		02 - Tenaga keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang terbina dan berkembang	1	1.170 Orang			
PRO-P	03.07.04.06 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional	01 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional	01 - Jumlah prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi	1	4 Unit	46 654,2	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		02 - Jumlah fasilitas sarana olahraga rekreasi dan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpik	1	250 Lembaga			
PRO-P	03.07.04.07 - Pengembangan Peran Dunia Usaha dalam Pendampingan dan Pembiayaan Keolahragaan	01 - Terlaksananya pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan	01 - Kajian yang disusun dalam rangka pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan	1	1 Dokumen	333,0	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- 2) Rincian pada masing-masing prioritas nasional masih terus akan dilakukan penajaman dan pendalaman kesiapan pelaksanaan. Beberapa proyek yang masih terpusat (alokasi dan lokusnya) akan terus dipertajam alokasi dan distribusi lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota nya. Untuk proyek yang mendukung lintas PP/KP/ProP dalam 1 PN, alokasi hanya di munculkan 1 (satu) kali;
- 3) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L dan KPBU, belum mencakup dukungan Transfer Ke Daerah dan Badan Usaha (BUMN/Swasta). Identifikasi dan integrasi antar instansi dan sumber pendanaan (K/L, Transfer Ke Daerah, KPBU dan Badan Usaha) akan terus dilakukan sampai dengan Pemutakhiran RKP dan APBN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.1 -

PRIORITAS NASIONAL 4 : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PN	04 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	01 - Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	01 - Indeks Capaian Revolusi Mental	71,96 nilai	4.452.586,1	
		02 - Meningkatkan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	01 - Indeks Pembangunan Kebudayaan	59,71 nilai		
		03 - Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	01 - Indeks Pembangunan Masyarakat	0,64 nilai		
		04 - Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	01 - Indeks Kerukunan Umat Beragama	74,70 nilai		
		05 - Meningkatkan ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	01 - Indeks Pembangunan Keluarga	57,00 nilai		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.2 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		02 - Median Usia Kawin Pertama Perempuan		22,00 nilai			
	06 - Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	01 - Nilai Budaya Literasi		65,70 nilai			
PP	04.01 - Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	01 - Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	01 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani	1	79,22 nilai	402.622,8	
		02 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih	1	71,96 nilai			
		03 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib	1	77,64 nilai			
		04 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri	1	59,93 nilai			
		05 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu	1	71,06 nilai			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.3 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		02 - Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter	01 - Indeks Kerentanan Keluarga	1	11,00 nilai		
			02 - Indeks Karakter Remaja	1	68,92 nilai		
KP	04.01 01 - Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti	01 - Menguatnya nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	01 - Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	1	35 %	64.603,5	
PRO-P	04.01.01.01 - Pengembangan Budaya Belajar dan Lingkungan Sekolah yang Menyenangkan dan Bebas dari Kekerasan (<i>Bullying Free School Environment</i>)	01 - Berkembangnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	01 - Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan pembinaan pendidikan karakter	1	7.719 satuan pendidikan	15.944,1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PRO-P	04.01.01.02 - Penguatan Pendidikan Agama, Nilai Toleransi Beragama, dan Budi Pekerti dalam Sistem Pendidikan	01 - Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama, dan budi pekerti dalam sistem pendidikan	01 - Persentase guru pendidikan agama di sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dan ditingkatkan kualitasnya	1	100 %	13.636,9	KEMENTERIAN AGAMA
PRO-P	04.01.01.03 - Peningkatan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda, serta Pengembangan Pendidikan Kepramukaan	01 - Meningkatnya kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan berkembangnya pendidikan kepramukaan	01 - Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan dan kepramukaan	1	3.232 orang	35 022,5	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.4 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
KP	04.01.02 - Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Responsif	01 - Menguatnya budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif	01 - Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan secara cepat dan tidak bertele-tele	4	Meningkat %	23.268,6	
			02 - Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan dengan biaya yang jelas	4	Meningkat %		
			03 - Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan secara tanggap melayani keluhan atau permintaan masyarakat	4	Meningkat %		
PRO-P	04.01.02.01 - Peningkatan Budaya Kerja Pelayanan Publik yang Ramah, Cepat, Efektif, Efisien, dan Terpercaya	01 - Terlaksananya peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya	01 - Jumlah Instansi yang Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (IP) dalam rangka peningkatan kualitas kerja pelayanan publik		150 instansi	22.068,6	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, KEMENTERIAN AGAMA
PRO-P	04.01.02.02 - Penerapan Disiplin, <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> dalam Birokrasi	01 - Terlaksananya penerapan disiplin, <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam birokrasi	01 - Jumlah laporan tindaklanjut permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun PNS		25 laporan	1 200,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.5 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
KP	04.01.03 - Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter	01 - Menguatnya sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter	01 - Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	1	76,72 indeks	169 390,4	
			02 - Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga	1	34 indeks		
PRO-P	04.01.03.01 - Penyiapan Kehidupan Berkeluarga dan Kecakapan Hidup	01 - Terlaksananya kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup	01 - Persentase keluarga ikut pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)	1	33,46 %	128.771,3	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN AGAMA
PRO-P	04.01.03.02 - Peningkatan Ketahanan Keluarga Berdasarkan Siklus Hidup dengan Memperhatikan Kesenambungan Antargenerasi, Sebagai Upaya Penguatan Fungsi dan Nilai Keluarga	01 - Terlaksananya Peningkatan ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dengan memperhatikan kesinambungan antargenerasi, sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga	01 - Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikut BKB	1	50,5 %	35.265,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
PRO-P	04.01.03.03 - Pewujudan Lingkungan yang Kondusif melalui Penguatan Masyarakat, Kelembagaan, Regulasi, Penyediaan Sarana dan Prasarana, serta Partisipasi Dunia Usaha	01 - Terwujudnya lingkungan yang kondusif melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi duma usaha	01 - Persentase daerah yang Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakatnya (IPPM) (berkategori) Baik	1	8 Indeks	5.354,1	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.IV.6 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
KP	04.01.04 - Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental	01 - Terwujudnya penguatan pusat-pusat perubahan dan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental	01 - Jumlah pusat perubahan dan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental yang memperoleh penguatan	1	92 Lembaga	32.620,0	
PRO-P	04.01.04.01 - Pemantapan Pelaksanaan Lima Program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk Mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	01 - Terwujudnya penguatan Gugus Tugas GNRM dalam rangka pemantapan pelaksanaan lima program GNRM untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	01 - Jumlah Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental yang memperoleh penguatan	1	67 Lembaga	19.531,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PRO-P	04.01.04.02 - Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental di Daerah	01 - Terlaksananya penguatan pusat-pusat perubahan di tingkat daerah	01 - Jumlah pusat perubahan di tingkat daerah yang memperoleh penguatan	1	25 Lembaga	13.088,1	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
KP	04.01.05 - Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila	01 - Meningkatnya kualitas koperasi dan kewirausahaan	01 - Jumlah koperasi modern yang dikembangkan	5	200 Unit (Kumulatif)	42.526,0	
			02 - Jumlah Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	5	12.000 WUB		
PRO-P	04.01.05.01 - Membangun Budaya Ekonomi Nasional dengan Platform Koperasi dalam Kegiatan Usaha Produktif	01 - Terlaksana Pembinaan kepada koperasi	01 - Jumlah koperasi yang menerima pembinaan	5	500 koperasi	12.000,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.7 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	04.01.05.02 - Peningkatan Etos Kerja dan Kewirausahaan Berlandaskan Semangat Gotong Royong	01 - Terlaksananya pemasyarakatan kewirausahaan	01 - Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi kewirausahaan	5	28.000 orang	2.023,1	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PRO-P	04.01.05.03 - Penumbuhan Budaya Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri	01 - Terlaksananya edukasi cinta produk dalam negeri	01 - Jumlah konsumen yang diedukasi cinta produk dalam negeri	5	6.500 orang	28.502,9	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
KP	04.01.06 - Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	01 - Terwujudnya jiwa nasionalisme dan patriotisme pada setiap warga negara	01 - Persentase capaian proyek prioritas pada kegiatan prioritas pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme	1	100 %	70.214,3	
PRO-P	04.01.06.01 - Pembinaan Ideologi Pancasila, Penguatan Pendidikan Kewargaan, Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara	01 - Menguatnya pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara	01 - Persentase capaian proyek pada proyek prioritas pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara	1	100 %	38.886,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.IV.8 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	04.01.06.02 - Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	01 - Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	01 - Persentase capaian proyek pada proyek prioritas peningkatan peran dan fungsi BPIP	1	100 %	26.147,8	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
PRO-P	04.01.06.03 - Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang Bertentangan dengan Ideologi Pancasila.	01 - Terwujudnya harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila	01 - Jumlah rekomendasi rancangan produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	1	3 Dokumen	3.209,4	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
PRO-P	04.01.06.04 - Membersihkan Unsur-Unsur yang Mengancam Ideologi Negara	01 - Terwujudnya pembersihan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara	01 - Jumlah rekomendasi hasil evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggara negara dan ASN, ormas, organisasi asing, serta media yang terindikasi menentang ideologi negara	1	3 Dokumen	1.970,4	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
PP	04.02 - Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	01 - Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan	01 - Nilai Dimensi Warisan Budaya	1	52,11 nilai	391.972,7	
			02 - Nilai Dimensi Ekspresi Budaya	1	38,19 nilai		
			03 - Nilai Dimensi Ekonomi Budaya	1	43,52 nilai		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.9 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
KP	04.02.01 - Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	01 - Terwujudnya Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	01 - Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	1	30 %	106.153,8	
			02 - Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	1	30 %		
PRO-P	04.02.01.01 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Nilai Budaya, Tradisi, Sejarah dan Kearifan Lokal	01 - Terwujudnya Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal	01 - Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan muatan lokal nilai budaya dan objek pemajuan kebudayaan	1	100 satuan pendidikan	53.975,1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PRO-P	04.02.01.02 - Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Museum dan Arsip	01 - Terwujudnya Peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dan arsip	01 - Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya	1	60 %	31.624,5	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PRO-P	04.02.01.03 - Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Manuskrip dan Arsip Sebagai Sumber Nilai Budaya, Sejarah, dan Memori Kolektif Bangsa	01 - Terwujudnya Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa	01 - Persentase peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno	1	19,79 %	20.554,2	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KP	04.02.02 - Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat	01 - Terwujudnya Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat	01 - Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan	1	0,31 %	186 365,4	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.10 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Persentase masyarakat yang menggunakan produk tradisional	1	59,81 %		
PRO-P	04.02.02.01 - Pengembangan Produk Seni, Budaya, dan Film	01 - Terwujudnya Pengembangan produk seni, budaya, dan film	01 - Jumlah Karya Perfilman dan Musik Indonesia	1	22 judul	95.427,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PRO-P	04.02.02.02 - Penyelenggaraan Festival Budaya dan Membangun Opera Berkelas Internasional	01 - Terwujudnya Penyelenggaraan festival budaya dan membangun opera berkelas internasional	01 - Jumlah festival skala internasional (Mega Events) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan	1	9 festival	3.869,1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PRO-P	04.02.02.03 - Pengelolaan Cagar Budaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	01 - Terwujudnya pengelolaan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat	01 - Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda	1	50 %	85 269,4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PRO-P	04.02.02.04 - Pengembangan Budaya Bahari dan Sumber Daya Maritim	01 - Terwujudnya pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim	01 - Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya	1	3 komunitas	1.800,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KP	04.02.03 - Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif	01 - Terwujudnya pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim Terwujudnya pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	01 - Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat	1	22,58 %	25.250,0	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.11 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	04.02.03.01 - Pengembangan Wilayah Adat sebagai Pusat Pelestarian Budaya dan Lingkungan Hidup	01 - Terwujudnya pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup	01 - Wilayah Adat yang Dikembangkan Menjadi Ruang Interaksi Pemajuan Kebudayaan	1	7 wilayah adat	12.000,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PRO-P	04.02.03.02 - Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Komunitas Budaya	01 - Terwujudnya pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya	01 - Jumlah Penguatan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat	1	35 lembaga	12.250,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PRO-P	04.02.03.03 - Pelindungan Kekayaan Budaya Komunal dan Hak Cipta	01 - Terwujudnya pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta	01 - Persentase database KI Komunal yang terintegrasi pada Aplikasi	1	100 %	1.000,0	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KP	04.02.04 - Pengembangan Diplomasi Budaya untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia dalam Perkembangan Peradaban Dunia	01 - Terlaksananya pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia	01 - Jumlah SDM dan Lembaga Kebudayaan Yang Diapresiasi	1	2.490 orang	35.445,2	
PRO-P	04.02.04.01 - Pengembangan Diplomasi Budaya melalui Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional, Muhibah Seni Budaya, dan Kuliner Nusantara	01 - Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara	01 - Jumlah SDM dan Lembaga Kebudayaan Yang Diapresiasi	1	2.490 orang	35.445,2	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.12 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	04.02.04.02 - Penguatan Pusat Studi dan Rumah Budaya Indonesia di Luar Negeri	01 - Meningkatnya Partisipasi Indonesia dalam Forum Internasional Bidang Kebudayaan	01 - Jumlah SDM dan Lembaga Kebudayaan Yang Diapresiasi	1	2.490 orang	-	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
KP	04.02.05 - Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan	01 - Terwujudnya pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	01 - Persentase SDM kebudayaan yang ditingkatkan kapasitasnya	1	35 %	38.758,3	
PRO-P	04.02.05.01 - Pengelolaan Dana Perwalian Kebudayaan	01 - Terlaksananya pengelolaan dana perwalian kebudayaan	01 - Jumlah layanan pengelolaan dana perwalian kebudayaan	1	1 layanan	-	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PRO-P	04.02.05.02 - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kebudayaan	01 - Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia kebudayaan	01 - Jumlah SDM kebudayaan yang ditingkatkan kompetensinya	1	1.450 orang	31.497,1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PRO-P	04.02.05.03 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	01 - Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan	01 - Jumlah Fasilitas pemerintah bidang kebudayaan	1	60 kegiatan	-	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PRO-P	04.02.05.04 - Pengembangan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu	01 - Terlaksananya pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu	01 - Jumlah layanan data dan statistik kebudayaan	1	1 layanan	-	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PRO-P	04.02.05.05 - Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan dalam Pemajuan Kebudayaan	01 - Terlaksananya pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan	01 - Jumlah layanan umum, kerja sama dan kehumasan bidang kebudayaan	1	1 layanan	7.261,2	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.13 -

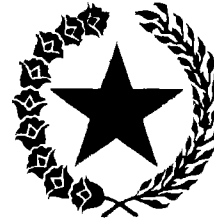
PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PP	04.03 - Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial	01 - Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama	01 - Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji	1	85,97 nilai	3.247.870,7	
			02 - Indeks Kepuasan Layanan KUA	1	82,00 nilai		
KP	04.03.01 - Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama	01 - Menguatnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama	01 - Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama (%)	1	89,58 %	1.180.824,9	
PRO-P	04.03.01.01 - Pengembangan Penyiaran Agama untuk Perdamaian dan Kemaslahatan Umat	01 - Terwujudnya pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat	01 - Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	1	1:5 nilai	804.414,4	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN AGAMA
PRO-P	04.03.01.02 - Penguatan Sistem Pendidikan yang Berperspektif Moderat Mencakup Pengembangan Kurikulum, Materi dan Proses Pengajaran, Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Rekrutmen Guru	01 - Menguatnya Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru	01 - Persentase siswa madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memperoleh nilai karakter minimal Baik (%)	1	76,75 %	251.699,3	KEMENTERIAN AGAMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.14 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	04.03.01.03 - Penguatan Peran Pesantren dalam Mengembangkan Moderasi Beragama melalui Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama untuk Kemaslahatan	01 - Menguatnya Penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan	01 - Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah, pendidikan Al-Qur'an dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama (%)	1	3,5 %	2.000,0	KEMENTERIAN AGAMA
PRO-P	04.03.01.04 - Pengelolaan Rumah Ibadah sebagai Pusat Syiar Agama yang Toleran	01 - Terwujudnya Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	01 - Persentase rumah ibadah yang ramah (%)	1	100 %	116.711,3	KEMENTERIAN AGAMA
PRO-P	04.03.01.05 - Pemanfaatan Ruang Publik untuk Pertukaran Ide dan Gagasan di Kalangan Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda Lintas Budaya, Lintas Agama, dan Lintas Suku Bangsa	01 - Terlaksananya Pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku	01 - Jumlah Aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama (orang)	1	5.886 orang	6.000,0	KEMENTERIAN AGAMA
KP	04.03.02 - Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	01 - Terwujudnya Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	01 - Persentase konflik antar umat beragama yang diselesaikan (%)	1	88 %	291.855,9	
PRO-P	04.03.02.01 - Pelindungan Umat Beragama untuk Menjamin Hak-Hak Sipil dan Beragama	01 - Terwujudnya Pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama	01 - Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti (%)	1	100 %	31.498,1	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.15 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	04.03.02.02 - Penguatan Peran Lembaga Agama, Organisasi Sosial Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai Perikat Persatuan dan Kesatuan Bangsa	01 - Terwujudnya Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	01 - Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi (%)	1	15 %	174.032,2	KEMENTERIAN AGAMA
PRO-P	04.03.02.03 - Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk Membangun Solidaritas Sosial, Toleransi, dan Gotong Royong	01 - Terwujudnya Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong	01 - Persentase FKUB yang aktif dalam membina kerukunan umat beragama (%)	1	100 %	86.325,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN AGAMA
KP	04.03.03 - Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya	01 - Terwujudnya Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya	01 - Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan (%)	1	75,83 %	88 152,4	
PRO-P	04.03.03.01 - Penghargaan atas Ekspresi Budaya Berbasis Nilai-Nilai Agama	01 - Terwujudnya Penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama	01 - Budaya keagamaan yang dibina dan dikembangkan	1	1.257 kegiatan	4 980,3	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PRO-P	04.03.03.02 - Pengembangan Literasi Khazanah Budaya Bernafas Agama	01 - Terwujudnya Pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama	01 - Persentase literasi khazanah budaya bernafas agama yang dihasilkan dan mudah diakses (%)	1	27,3 %	29.469,2	KEMENTERIAN AGAMA, PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.16 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	04.03.03.03 - Pelestarian Situs Keagamaan dan Pemanfaatan Perayaan Keagamaan dan Budaya untuk Memperkuat Toleransi	01 - Terwujudnya Pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi	01 - Persentase <i>event</i> keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan) yang difasilitasi (%)	1	100 %	53.703,0	KEMENTERIAN AGAMA
KP	04.03.04 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	01 - Terwujudnya Peningkatan Fasilitas Pelayanan Keagamaan	01 - Persentase layanan keagamaan yang memenuhi standar pelayanan	1	50 %	1.618.435,7	
PRO-P	04.03.04.01 - Peningkatan Fasilitas Pelayanan Keagamaan	01 - Terwujudnya pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga	01 - Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan keagamaan	1	80 %	773.489,0	KEMENTERIAN AGAMA
PRO-P	04.03.04.02 - Peningkatan Pelayanan Bimbingan Perkawinan dan Keluarga	01 - Terwujudnya pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga	01 - Persentase keluarga yang menerima layanan dan bimbingan perkawinan	1	50 %	19.762,0	KEMENTERIAN AGAMA
PRO-P	04.03.04.03 - Penguatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	01 - Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	01 - Persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	1	63 %	77.017,4	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PRO-P	04.03.04.04 - Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah	01 - Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah	01 - Persentase jemaah haji yang mendapatkan pelayanan haji sesuai standar	1	85,25 %	748.167,3	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN AGAMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.17 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
KP	04.03.05 - Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan	01 - Terwujudnya Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan	01 - Persentase penggunaan dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan	1	51 %	68.601,7	
PRO-P	04.03.05.01 - Pemberdayaan Dana Sosial Keagamaan	01 - Terwujudnya Pemberdayaan dana sosial keagamaan	01 - Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan	1	29,01 %	20.680,1	KEMENTERIAN AGAMA
PRO-P	04.03.05.02 - Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Umat	01 - Terwujudnya Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Umat	01 - Persentase partisipasi umat Islam dalam pangsa pasar keuangan syariah	1	12 %	47.921,6	KEMENTERIAN AGAMA
PRO-P	04.03.05.03 - Pengelolaan Dana Haji secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel	01 - Terwujudnya Pengelolaan Dana Haji secara profesional, transparan, dan akuntabel	01 - Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji	1	94 %	-	KEMENTERIAN AGAMA
PP	04.04 - Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter	01 - Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	01 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1	13,00 nilai	410.120,0	
KP	04.04.01 - Peningkatan Budaya Literasi	01 - Terwujudnya Peningkatan Budaya Literasi	01 - Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1	1:14 rasio	302.464,4	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.18 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1	1:18.000 rasio		
			03 - Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar	1	21,24 %		
PRO-P	04.04.01.01 - Pengembangan Budaya Kegemaran Membaca	01 - Terwujudnya Pengembangan budaya kegemaran membaca	01 - Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pengembangan budaya literasi	1	20.161 orang	77.947,0	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRO-P	04.04.01.02 - Pengembangan Sistem Perbukuan dan Penguatan Konten Literasi	01 - Terwujudnya Pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi	01 - Jumlah SDM Perbukuan yang tersertifikasi	1	300 orang	83.869,9	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
			02 - Jumlah Lembaga Perbukuan yang terakreditasi	1	20 lembaga		
PRO-P	04.04.01.03 - Peningkatan Akses dan Kualitas Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	01 - Terwujudnya Peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial	01 - Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial	1	1.048 perpustakaan	140.647,4	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN SOSIAL
KP	04.04.02 - Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah, serta Sastra	01 - Terwujudnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	01 - Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia	1	515 nilai	60.230,0	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.19 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	04.04.02.01 - Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional	01 - Terwujudnya Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional	01 - Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	165.014 kosakata	-	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
			02 - Jumlah Tenaga Profesional yang Mahir Berbahasa Indonesia	6.423 orang		
PRO-P	04.04.02.02 - Pengembangan Pendidikan Sastra di Satuan Pendidikan dan Komunitas	01 - Terwujudnya pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas	01 - Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	165.014 kosakata	50.869,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
			02 - Jumlah Tenaga Profesional yang Mahir Berbahasa Indonesia	6.423 orang		
PRO-P	04.04.02.03 - Revitalisasi Bahasa dan Aksara Daerah sebagai Khazanah Budaya Bangsa	01 - Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	01 - Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah kritis dan terancam punah	66.000 orang	9.360,6	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
KP	04.04.03 - Pengembangan Budaya Iptek, Inovasi, Kreativitas, dan Daya Cipta	01 - Terwujudnya pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta	01 - Produk Inovasi yang Dihasilkan Partisipan dalam Kompetisi/ Pembinaan Inovasi Ilmiah Remaja	20 produk	5.000,0	
PRO-P	04.04.03.01 - Peningkatan Budaya Riset dan Ekperimentasi Ilmiah Sejak Usia Dini	01 - Terwujudnya peningkatan budaya riset dan ekperimentasi ilmiah sejak usia dini	01 - Produk Inovasi yang Dihasilkan Partisipan dalam Kompetisi/ Pembinaan Inovasi Ilmiah Remaja	20 produk	3.000,0	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.20 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	04.04.03.02 - Pengembangan Budaya Produksi dan Kreativitas Berbasis Inovasi	01 - Terwujudnya budaya produksi dan kreativitas berbasis inovasi	01 - Layanan Literasi Iptek Berbasis Terbitan dan Multimedia yang Terdiseminasi kepada Stakeholder		1 layanan	2.000,0	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)
KP	04.04.04 - Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi	01 - Terwujudnya penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	01 - Persentase institusi perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	1	4,0 %	42.425,6	
PRO-P	04.04.04.01 - Pengembangan Mitra Perpustakaan (<i>Library Supporter</i>)	01 - Terwujudnya Pengembangan mitra perpustakaan (<i>library supporter</i>)	01 - Jumlah perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	1	500 perpustakaan	17.425,6	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PRO-P	04.04.04.02 - Pengembangan Inovasi Sosial yang Didukung dari Pendanaan Filantropi	01 - Terwujudnya Pengembangan inovasi sosial yang didukung dari pendanaan filantropi	01 - Jumlah Pojok Baca Digital di Daerah	1	100 lokasi	25.000,0	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- 2) Rincian pada masing-masing prioritas nasional masih terus akan dilakukan penajaman dan pendalaman kesiapan pelaksanaan. Beberapa proyek yang masih terpusat (alokasi dan lokusnya) akan terus dipertajam alokasi dan distribusi lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota nya Untuk proyek yang mendukung lintas PP/KP/ProP dalam 1 PN, alokasi hanya di munculkan 1 (satu) kali;
- 3) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L dan KPBU, belum mencakup dukungan Transfer Ke Daerah dan Badan Usaha (BUMN/Swasta). Identifikasi dan integrasi antar instansi dan sumber pendanaan (K/L, Transfer Ke Daerah, KPBU dan Badan Usaha) akan terus dilakukan sampai dengan Pemutakhiran RKP dan APBN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.1 -

PRIORITAS NASIONAL 5 : MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PN	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	01 - Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	01 - Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau	65,10 %	88.862.697,6	
			02 - Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010	60 %		
			03 - Persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif)	9,0 %		
			04 - Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif)	35 %		
		02 - Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	01 - Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	2,09 Jam/100 Km		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.2 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (<i>loop</i>)		26 %		
	03 - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	01 - Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan		6 (berlanjut) kota		
	04 - Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	01 - Rasio Elektrifikasi		~ 100 %		
		02 - Rata-Rata Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik		1.268 kWh/Kapita		
		03 - Penurunan Emisi GRK Sektor Energi		91 Juta ton		
	05 - Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	01 - Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pital lebar (4G)		98,5 %		
PP	05.01 - Infrastruktur Pelayanan Dasar	01 - Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	01 - Rasio KPR terhadap PDB	2	3,3 %	31.712.244,6
		02 - Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Kecukupan Luas Lantai per Kapita		2	94 %	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.3 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Ketahanan Bangunan (Atap, Lantai, Dinding)	2	84,08 %		
		04 - Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Perumahan	2	63,2 %		
	02 - Meningkatnya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman	01 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	2	95,1 %		
		02 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	2	13,45 %		
		03 - Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	2	25,57 %		
		04 - Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	2	69,53 %		
		05 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	2	82,07 akses layak (termasuk 11,5 akses aman) %		
		06 - Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka	2	2,98 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.4 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			07 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	2	75,28 penanganan, 9,13 pengurangan %		
			08 - Persentase PDAM dengan kinerja sehat	2	91,8 %		
		03 - Meningkatnya Layanan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	01 - Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan	2	180 Kabupaten/Kota		
		04 - Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi	01 - Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan	2	26 menit		
		05 - Meningkatnya Optimalisasi Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi	01 - Volume tampungan air per kapita	2	53,90 m ³ /kapita		
			02 - Persentase luas sawah benirigasi	2	55,50 %		
			03 - Luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi	2	568.747 hektar		
KP	05.01.01 - Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	01 - Tersedianya Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau	01 - Jumlah Hunian Baru Layak Huni yang Terbangun melalui peran pemerintah	2	4.423 Unit	4 803 530,6	
			02 - Jumlah Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas Pembiayaan Perumahan termasuk SMF dan TAPERA	2	119.000 Rumah Tangga		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.5 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		03 - Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah yang Menerima Bantuan/Subsidi Pembiayaan Perumahan berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	2	200 042 Rumah Tangga			
		04 - Jumlah Peningkatan Kualitas Hunian melalui Peran Pemerintah	2	101 000 Unit			
		05 - Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	2	696 Hektar			
		06 - Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan	2	48 Kabupaten/Kota			
		07 - Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan	2	48 Kabupaten/Kota			
PRO-P	05.01.01.01 - Peningkatan Fasilitas Penyediaan Hunian Baru	01 - Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Penyediaan Hunian Baru	01 - Jumlah Hunian Baru Layak yang Terbangun Melalui Fasilitas Pemerintah	2	4.423 Unit	1.555 787,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	05.01.01.02 - Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	01 - Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	01 - Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah yang Menerima Bantuan/Subsidi Pembiayaan Perumahan Berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	2	200.042 Rumah Tangga	23.508,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.6 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		02 - Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Dan Lembaga Keuangan	2	119.000 Rumah Tangga			
PRO-P	05.01.01.03 - Pengembangan Fasilitas Peningkatan Kualitas Rumah	01 - Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Peningkatan Kualitas Rumah	01 - Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas	2	101.000 rumah tangga	2.057.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	05.01.01.04 - Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	01 - Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	01 - Jumlah Rumah yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar	2	20.500 Unit	169.500,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	05.01.01.05 - Fasilitas Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim (IMB dan SLF)	01 - Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim (IMB dan SLF)	01 - Jumlah Kabupaten/Kota yang Menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	2	48 Kabupaten/Kota	82 608,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRO-P	05.01.01.06 - Fasilitas Penanganan Permukiman Kumuh	01 - Terlaksananya Fasilitas Penanganan Permukiman Kumuh	01 - Jumlah Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu	2	696 Hektar	915.126,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KP	05.01.02 - Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Tersedianya akses air minum dan sanitasi layak dan aman	01 - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	2	17.288.765 Sambungan Rumah	4.538.507,1	
		02 - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum Bukan Jaringan Perpipaan	2	47.011.647 Rumah Tangga			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.7 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman	2	9 094.012 Rumah Tangga		
		04 - Persentase PDAM dengan kinerja sehat	2	91,8 %		
		05 - Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota/regional (SR)	2	62.352 Sambungan Rumah		
		06 - Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman (SR)	2	284.145 Sambungan Rumah		
		07 - Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT (RT)	2	1.730.314 Rumah Tangga		
		08 - Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar <i>sanitary landfill</i> (RT)	2	4.470 423 Rumah Tangga		
		09 - Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)	2	316.629 Rumah Tangga		
		10 - Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)	2	308.845 Rumah Tangga		
		11 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja (Kab/Kota)	2	87 Kab/Kota		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.8 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		12 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik (Kab/Kota)	2	83 Kab/Kota		
		13 - Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)	2	2,98 %		
PRO-P	05.01.02.01 - Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Terlaksananya pengembangan sistem penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman	2	2.030 Liter/detik	3 911 588,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU)
		02 - Jumlah pembangunan dan peningkatan kapasitas SPAM	2	1.905 Liter/detik		
		03 - Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan perluasan SPAM	2	592.000 Sambungan Rumah (SR)		
		04 - Persentase <i>Non-Revenue Water</i> (NRW) PDAM	2	28 %		
		05 - Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala kota/regional (kab/kota)	2	28 Kab/Kota		
		06 - Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman (kab/kota)	2	168 Kab/Kota		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.9 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		07 - Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan baru dan rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (kab/kota)	2	74 Kab/Kota			
		08 - Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan TPA baru (kab/kota)	2	74 Kab/Kota			
		09 - Jumlah kab/kota yang memiliki TPS3R (kab/kota)	2	113 Kab/Kota			
		10 - Jumlah kab/kota yang memiliki TPST (kab/kota)	2	25 Kab/Kota			
PRO-P	05.01.02.02 - Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman	01 - Persentase PDAM yang memiliki <i>business plan</i> menuju akses 100% aman yang berlaku hingga tahun 2024	2	45 %	618.123,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
			02 - Persentase PDAM dengan Tarif <i>Full Cost Recovery</i>	2	75 %		
			03 - Persentase pengelola/operator air minum berkinerja sehat (PDAM,UPTD, KPSPAMS dll)	2	60 %		
			04 - Jumlah provinsi yang terfasilitasi pendampingan implementasi dokumen strategi sanitasi kabupaten/kota	2	33 Provinsi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.10 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Jumlah provinsi yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah dan air limbah domestik	2	33 Provinsi		
		06 - Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	2	70 %		
PRO-P	05.01.02.03 - Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Terlaksananya pengaturan penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman	2	34 Provinsi	500,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah NSPK terkait sanitasi yang tersusun	2	4 NSPK		
		03 - Jumlah NSPK terkait air minum yang tersusun	2	4 NSPK		
		04 - Jumlah Kab/Kota yang memiliki Jakstrada air minum	2	102 Kab/kota		
		05 - Jumlah Kab/Kota yang memiliki RISPAM	2	102 Kab/kota		
PRO-P	05.01.02.04 - Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi	01 - Terlaksananya pengawasan kualitas air minum dan sanitasi	2	102 Kab/kota	8.295,3	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN KESEHATAN
		02 - Jumlah kab/kota yang melakukan pengawasan kualitas air minum	2	514 Kab/kota		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.11 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah kab/kota yang memiliki <i>effluent</i> IPAL, IPLT, dan <i>leachate</i> TPA yang memenuhi syarat	2	40 Kab/kota		
KP	05.01.03 - Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	01 - Terkelolanya air tanah dan air baku berkelanjutan	2	88,87 m ³ /detik	1.673.497,5	
		02 - Persentase kesiapan implementasi pengelolaan SDA terpadu (aspek regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi)	2	65 %		
PRO-P	05.01.03.01 - Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah	01 - Terlaksananya penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	2	1,5 m ³ /det	1.672.297,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PRO-P	05.01.03.02 - Penataan Regulasi serta Perkuatan Kelembagaan SDA	01 - Terlaksananya penataan regulasi serta perkuatan kelembagaan SDA	2	34 Rekomendasi Kebijakan	1.200,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KP	05.01.04 - Keselamatan dan Keamanan Transportasi	01 - Terlaksananya pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi & SAR	1	1,09 Nilai	1.844.625,6	
		02 - Rasio kejadian kecelakaan penerbangan per 1 juta penerbangan	2	2,15 Nilai		
		03 - Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA	2	0,25 Nilai		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.12 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		04 - Rasio kejadian kecelakaan pelayaran darat per 10.000 pelayaran	2	0,09 Nilai			
PRO-P	05.01.04.01 - Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	01 - Terciptanya keselamatan dan keamanan transportasi	01 - Jumlah peralatan SAR yang disediakan	2	121 Unit	1.634.583,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, BADAN SAR NASIONAL
		02 - Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang dibangun	2	33 Unit			
		03 - Jumlah pengadaan dan pemasangan ATCS dan ITS	2	44 Unit			
		04 - Jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	2	1 Unit			
		05 - Jumlah kapal negara KPLP yang dibangun	2	30 Unit			
PRO-P	05.01.04.02 - Pembinaan dan Pendidikan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Pencarian dan Pertolongan	01 - Terlaksananya pembinaan dan pendidikan SDM keselamatan dan keamanan transportasi, pencarian dan pertolongan	01 - Jumlah SDM pencarian dan pertolongan yang berkompeten	1	5.000 Orang	210.041,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, BADAN SAR NASIONAL
		02 - Jumlah lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan <i>Safety and Security</i> SDM Transportasi	1	84.878 Orang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.13 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		02 - Jumlah pelaksanaan Promosi Keselamatan Jalan Nasional	01 - Promosi Keselamatan Jalan Nasional	1	26 Promosi		
KP	05.01.05 - Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	01 - Terwujudnya ketahanan kebencanaan infrastruktur	01 - Persentase penambahan jumlah korban bencana banjir	2	0 %	6.724.196,7	
			02 - Persentase penambahan jumlah korban bencana abrasi/pasang laut	2	0 %		
			03 - Persentase penambahan jumlah korban bencana lahar gunung api	2	0 %		
PRO-P	05.01.05.01 - Pengembangan Kebijakan Wilayah untuk Ketahanan Bencana dan Penguatan Infrastruktur Vital Tahan Bencana	01 - Terlaksananya pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana	01 - Jumlah wilayah sungai yang menetapkan peta risiko dan rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana hidrometeorologi dan hidrogeologi	2	8 wilayah sungai	1.200,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
			02 - Jumlah provinsi yang memiliki peta risiko dan rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana tsunami	2	3 provinsi		
PRO-P	05.01.05.02 - Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Ketahanan Bencana	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana	01 - Jumlah wilayah sungai dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pencegahan banjir	2	20 wilayah sungai	5.370.126,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.14 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		02 - Jumlah provinsi dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali bencana lumpur dan sedimen	2	5 provinsi			
		03 - Jumlah kawasan pesisir dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur ketahanan bencana wilayah pesisir	2	20 kawasan pesisir			
PRO-P	05.01.05.03 - Penyediaan Sistem Terpadu Peringatan Dini dan Tanggap Darurat Bencana	01 - Terlaksananya penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana	01 - Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah dan kegiatan pemantauan penurunan tanah	2	8 kabupaten/kota	1.636,9	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		02 - Jumlah cekungan air tanah dengan pemantauan penggunaan air tanah	2	15 CAT			
		03 - Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan peringatan dini bencana banjir	2	4 Wilayah sungai			
		04 - Jumlah lokasi dengan pengembangan sistem peringatan dini bencana longsor	2	6 lokasi			
		05 - Jumlah kegiatan tanggap darurat akibat bencana	2	65 kegiatan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.15 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	05.01.05.04 - Restorasi dan Konservasi Infrastruktur Alami	01 - Terlaksananya restorasi dan konservasi infrastruktur alami	01 - Jumlah danau/situ yang direstorasi dan dikonservasi	2	10 unit	1 351.233,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KP	05.01.06 - Waduk <i>Multipurpose</i> dan Modernisasi Irigasi	01 - Terbangunnya waduk <i>multipurpose</i> dan modernisasi irigasi	01 - Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air	2	16,1 miliar m ³	12.127.887,3	
			02 - Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya	2	9 unit		
			03 - Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko	2	10 unit		
			04 - Jumlah daerah irigasi yang melakukan modernisasi	2	9 Daerah irigasi		
			05 - Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan nonpadi	2	45.000 hektar		
PRO-P	05.01.06.02 - Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bendungan	01 - Jumlah bendungan multiguna yang selesai dibangun	2	13 unit	10.050 548,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	05.01.06.03 - Optimalisasi dan Pemanfaatan Tampungan	01 - Terlaksananya optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	01 - Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai fungsi rencananya	2	9 unit	1.027 451,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.16 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		02 - Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA	2	30 MW			
PRO-P	05.01 06.05 - Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	01 - Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	2	45.000 hektar	1.049.887,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	2	441.197 hektar			
PP	05.02 - Infrastruktur Ekonomi	01 - Meningkatnya konektivitas wilayah	01 - Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten/kota	2	94/72/60 %	32.160.900,9	
		02 - Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi	2	300 km			
		03 - Panjang jalan baru yang terbangun	2	695 km			
		04 - Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2	2	85 %			
		05 - Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif)	2	6.396 km			
		06 - Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar	2	3 (berlanjut) lokasi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.17 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		07 - Jumlah rute subsidi tol laut	2	26 rute		
		08 - Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi)	2	19 pelabuhan (10 selesai 9 berlanjut) pelabuhan		
		09 - Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif)	2	14 (berlanjut) lokasi		
		10 - Jumlah rute jembatan udara	2	42 (berlanjut) rute		
KP	05.02.01 - Konektivitas Jalan	01 - Terwujudnya konektivitas jalan	2	3 lokasi	21.141.812,6	
		02 - Jumlah lokasi jalan dan jembatan pada kawasan prioritas yang dibangun	2	9 lokasi		
		03 - Jumlah lokasi jalan yang dipreservasi	2	92 lokasi		
PRO-P	05.02.01.01 - Pembangunan Jalan Strategis	01 - Terlaksananya pembangunan jalan strategis	2	32 lokasi	6.865.240,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU)
		02 - Jumlah lokasi jembatan lintas utama pulau ditangani	2	20 lokasi		
PRO-P	05.02.01.02 - Pembangunan Jalan Tol	01 - Terlaksananya pembangunan jalan tol	2	3 lokasi	6.540.525,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.18 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	05.02.01.03 - Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, dan KSPN)	01 - Terlaksananya pembangunan jalan mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, dan KSPN)	01 - Jumlah lokasi jalan dan jembatan mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, dan KSPN) yang ditangani	2	9 lokasi	1.474.430,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	05.02.01.04 - Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (Pelabuhan, Bandara, Terminal)	01 - Terlaksananya pembangunan jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal) yang dibangun	01 - Jumlah lokasi jalan dan jembatan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal) yang dibangun	2	1 lokasi	100,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	05.02.01.05 - Preservasi Jalan Nasional (termasuk Peningkatan/Pelebaran)	01 - Terlaksananya preservasi jalan nasional (termasuk peningkatan/pelebaran)	01 - Jumlah lokasi jalan nasional yang di preservasi (termasuk peningkatan/pelebaran)	2	92 lokasi	5.964.277,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRO-P	05.02.01.06 - Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Daerah	01 - Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah	01 - Jumlah lokasi jalan daerah yang dibangun dan ditingkatkan	2	6 lokasi	297.238,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KP	05.02.02 - Konektivitas Kereta Api	01 - Terwujudnya konektivitas kereta api	01 - Panjang jalur kereta api yang dibangun (termasuk jalur ganda dan reaktivasi)	2	178,8 (berlanjut) Km	2.713.853,5	
			02 - Panjang Jalur Kereta Api yang ditingkatkan	2	123,4 (berlanjut) Km		
PRO-P	05.02.02.01 - Pembangunan Jalur Kereta Api Antarkota	01 - Terlaksananya pembangunan jalur kereta api antarkota	01 - Jumlah kegiatan pembangunan prasarana kereta api	2	9 lokasi	1.486.564,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.19 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Panjang jalur kereta api yang dibangun (termasuk jalur ganda dan reaktivasi)	2	123,4 (berlanjut) Km		
PRO-P	05.02.02.02 - Peningkatan, Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api	01 - Terlaksananya peningkatan, pemeliharaan, perawatan dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api	2	238 (berlanjut) Km	1.032.427,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Jumlah kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api	2	7 Lokasi		
		03 - Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api (IMO)	2	1 Paket		
PRO-P	05.02.02.04 - Penyediaan PSO dan Subsidi	01 - Terlaksananya penyediaan PSO dan Subsidi	2	8 Layanan	194.861,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Tersedianya Dana PSO Perkeretaapian	2	1 Paket (APBN Non Kemenhub)		
KP	05.02.03 - Konektivitas Laut	01 - Terwujudnya konektivitas laut	2	29 lokasi	3.465.440,6	
		02 - Jumlah layanan subsidi Tol Laut, perintis angkutan laut, dan angkutan ternak yang tetap dan teratur	2	154 rute		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.20 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	05.02.03.01 - Pengembangan Pelabuhan Utama (Hub)	01 - Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut Utama	01 - Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan	2	2 Lokasi	1 062 071,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPBU), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PRO-P	05.02.03 02 - Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut	01 - Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan laut	01 - Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan	2	21 lokasi	807.929,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPBU)
PRO-P	05.02.03.03 - Pelabuhan Mendukung Kawasan Strategis Prioritas Nasional	01 - Pelabuhan Mendukung Kawasan Strategis Prioritas Nasional	01 - Jumlah Pelabuhan Pendukung Kawasan Strategis Prioritas Nasional	2	6 lokasi	280.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PRO-P	05.02.03.04 - Penyelenggaraan Layanan Subsidi Tol Laut dan Perintis Angkutan Laut	01 - Terlaksananya Penyelenggaraan layanan subsidi Tol Laut dan perintis angkutan laut	01 - Jumlah layanan angkutan tol laut tetap dan teratur	2	30 rute	1.291.542,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
			02 - Jumlah layanan angkutan laut perintis	2	118 rute		
			03 - Jumlah layanan angkutan ternak	2	6 rute		
PRO-P	05.02.03.05 - Pengembangan Teknologi Informasi Pelayaran	01 - Terlaksananya pengembangan teknologi informasi pelayaran	01 - Jumlah teknologi informasi pelayaran yang dikembangkan	2	1 unit	23.896,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KP	05.02.04 - Konektivitas Udara	01 - Terwujudnya konektivitas udara	01 - Jumlah rute jembatan udara (rute)	2	39 Rute	2 915.311,9	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.21 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana	
		02 - Jumlah bandara yang dibangun dan dikembangkan	2	29 Lokasi			
		03 - Layanan Subsidi Angkutan Udara	2	1 Tahun			
PRO-P	05.02.04.01 - Jembatan Udara	01 - Terlaksananya pengembangan bandar udara pendukung jembatan udara	01 - Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan	2	3 Lokasi	210.725,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PRO-P	05.02.04.02 - Pembangunan Bandara Baru	01 - Terlaksananya pembangunan bandara baru	01 - Jumlah bandara yang dikembangkan	2	10 Lokasi	1.268.946,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPBU)
PRO-P	05.02.04.03 - Pengembangan Bandara Hub Primer	01 - Terlaksananya pengembangan bandara hub primer	01 - Jumlah bandara hub primer yang direhabilitasi/dikembangkan	2	19 Lokasi	885.639,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PRO-P	05.02.04.05 - Layanan Subsidi angkutan udara	01 - Terlaksananya Layanan Angkutan Udara Perintis	01 - Jumlah layanan angkutan udara perintis penumpang	2	212 Layanan	550.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Jumlah Layanan Angkutan Kargo Perintis	2	39 Layanan			
		03 - Angkutan BBM Angkutan Udara Perintis dan Kargo	2	12.314 Layanan			
KP	05.02.05 - Konektivitas Darat	01 - Terwujudnya konektivitas darat	01 - Jumlah pelabuhan penyeberangan, danau dan sungai yang dibangun dan dikembangkan	2	44 Lokasi	1.924.482,3	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.22 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		02 - Jumlah terminal penumpang dan barang antarnegara serta terminal Tipe A yang dibangun	2	13 Lokasi			
		03 - Jumlah kapal penyeberangan yang dibangun	2	4 Unit			
		04 - Jumlah layanan perintis angkutan penyeberangan	2	315 Layanan			
		05 - Jumlah layanan perintis angkutan jalan	2	330 Layanan			
PRO-P	05.02.05.01 - Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	01 - Terlaksananya pembangunan pelabuhan penyeberangan baru	01 - Jumlah pelabuhan penyeberangan, danau dan sungai pada jalur logistik yang dibangun	2	25 (berlanjut) Lokasi	638.951,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PRO-P	05.02.05.03 - Pembangunan Terminal Penumpang dan Barang Antarnegara	01 - Terlaksananya pembangunan terminal penumpang dan barang antarnegara	01 - Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan	2	4 (berlanjut) Lokasi	109.416,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PRO-P	05.02.05.04 - Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru	01 - Terlaksananya pembangunan kapal penyeberangan perintis baru	01 - Jumlah kapal penyeberangan perintis yang dibangun	2	4 (berlanjut) Unit	70.575,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PRO-P	05.02.05.05 - Penyediaan Layanan Perintis Angkutan Darat untuk Penumpang dan Barang	01 - Terlaksananya Penyediaan layanan perintis angkutan darat untuk penumpang dan barang	01 - Jumlah trayek perintis angkutan penyeberangan yang dilayani	2	315 Layanan	614.404,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.23 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		02 - Jumlah trayek perintis angkutan jalan yang dilayani	2	330 Layanan			
PRO-P	05.02.05.06 - Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A	01 - Terlaksananya peningkatan/revitalisasi terminal penumpang Tipe A	01 - Jumlah terminal penumpang Tipe A yang ditingkatkan/direvitalisasi	2	12 Lokasi	353.637,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PRO-P	05.02.05.02 - Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Angkutan Sungai Danau	01 - Terlaksananya Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Angkutan Sungai Danau	01 - Pelabuhan Angkutan Sungai Danau yang Dibangun/Dikembangkan	2	13 (berlanjut) Lokasi	137.497,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PP	05.03 - Infrastruktur Perkotaan	01 - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	01 - Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/ flyover/ underpass (kumulatif)(kota)	2	5 (berlanjut) Lokasi	3.001.776,6	
			02 - Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan (kumulatif) (kota)	2	5 (berlanjut) kota		
			03 - Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota	2	6 kawasan		
KP	05.03.01 - Transportasi Perkotaan	01 - Terwujudnya layanan angkutan umum massal perkotaan	01 - Jumlah angkutan massal berbasis rel yang dibangun (kota)	2	4 kota	2.908.313,1	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.24 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		02 - Jumlah angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang dibangun (kota)	2	16 kota			
PRO-P	05.03.01.01 - Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang)	01 - Terwujudnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	01 - Jumlah kota yang dibangun/dikembangkan angkutan massal berbasis rel	2	6 Kota	1.783.015,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Jumlah kota yang dibangun/dikembangkan angkutan massal berbasis jalan	2	6 kota			
PRO-P	05 03 01 02 - Pembangunan Fasilitas Alih Moda yang Terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Perekonomian, Permukiman dan Fasilitas Umum pada Simpul-simpul Transportasi	01 - Terwujudnya pembangunan fasilitas alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi	01 - Jumlah kawasan alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi yang terbangun	2	13 Lokasi	64 187,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Tersusunnya Rekomendasi Pembangunan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD)	01 - Rekomendasi Pembangunan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD)	2	9 Rekomendasi Kebijakan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.25 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahannya Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	05.03.01.03 - Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Perkotaan Besar Lainnya	01 - Terwujudnya layanan angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya	01 - Jumlah perkotaan lainnya yang dikembangkan sistem angkutan umum massal berbasis rel yang dibangun	2	1 Kota	109.829,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PRO-P	05.03.01.05 - Pembangunan Jalan Perkotaan	01 - Terlaksananya pembangunan jalan perkotaan	01 - Jumlah jalan perkotaan yang ditangani (termasuk jalan lingkar)	2	2 Lokasi	274.513,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
			02 - Jumlah lokasi <i>flyover/underpass</i> di perkotaan yang dibangun	2	3 Lokasi		
PRO-P	05.03.01.06 - Penyediaan Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan	01 - Terselenggaranya penyediaan subsidi angkutan umum massal perkotaan	01 - Subsidi angkutan umum massal perkotaan	2	19 Layanan	676.766,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KP	05.03.02 - Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan	01 - Terbangunnya infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan	01 - Persentase rumah tangga terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga	2	21 % (Kumulatif)	25.950,0	
PRO-P	05.03.02.01 - Pengembangan TIK Perkotaan	01 - Terlaksananya pengembangan TIK perkotaan	01 - Jumlah rumah tangga terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar	2	14.000.000 Rumah tangga (kumulatif)	25.950,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			02 - Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan masterplan <i>smart city</i>	5	100 Kab/Kota (Kumulatif)		
KP	05.03.03 - Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan	01 - Terlaksananya penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan	01 - Jumlah kawasan perkotaan prioritas dengan penyediaan dan penyelenggaraan akses air minum dan air limbah yang aman dan andal	2	7 Kab/Kota	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.26 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	05.03.03.01 - Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Andal dan Terintegrasi	01 - Terlaksananya penyediaan dan penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang andal dan terintegrasi	01 - Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP)	2	7 BUMD Air Minum	-	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
			02 - Jumlah PDAM yang menerapkan <i>Smart Grid Water Management</i>	2	3 BUMD Air Minum		
KP	05.03.04 - Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan	01 - Terlaksananya Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan	01 - Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan	2	3 Kawasan	67.513,5	
PRO-P	05.03.04.01 - Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	01 - Terlaksananya Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	01 - Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota	2	3 Kawasan	67.513,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PP	05.04 - Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga Listrik yang merata, andal, dan efisien	01 - Jumlah Produksi Tenaga Listrik	2	382.696,10 GWh	1.709.110,4	
			02 - Penurunan Emisi CO2 Pembangkit	2	5,36 Juta Ton		
			03 - Jumlah Pengguna Listrik	2	81.217 Ribu Rumah Tangga-kumulatif		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.27 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (kumulatif)	2	2.649.553 Sambungan Rumah		
		05 - Jumlah Kapasitas Kilang Minyak (kumulatif)	2	1.176.000 (Barrel per Calendar Day/BPCD)		
KP	05 04.01 - Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan	2	8,93 %	46 269,5	
		02 - Porsi Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT Terhadap Total Pembangkit	2	16 %		
PRO-P	05.04.01.01 - Perbaikan Efisiensi dan Emisi Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya Perbaikan Efisiensi dan Emisi Energi dan Ketenagalistrikan	2	1921,8 MW	46.269,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		02 - Jumlah Penambahan Transmisi	2	4.632,10/7.510 kms/MVA		
		03 - Jumlah Penambahan Sistem Distribusi	2	50.657/3.615 kms/MVA		
KP	05 04.02 - Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Meningkatnya akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	2	2.030 Ribu Pelanggan	1 650.943,5	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.28 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		02 - Jumlah Penyediaan Gas	2	194.869 Setara Bareil Minyak (SBM)			
PRO-P	05.04.02.01 - Perluasan Jaringan Gas Kota	01 - Terlaksananya Perluasan Jaringan Gas Kota	01 - Pembangunan Jaringan Gas Kota - APBN	2	10.000 Sambungan Rumah (SR)	100.000,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PRO-P	05.04.02.02 - Perluasan Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya perluasan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	01 - Jumlah Penambahan Sistem Distribusi	2	50.657/3.615 kms/MVA	1.550.943,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		02 - Jumlah Penambahan Penyalur BBM Satu Harga	2	72 Penyalur			
KP	05.04.03 - Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik	01 - Tersedianya pasokan energi dan tenaga listrik yang cukup	01 - Jumlah Cadangan Operasional BBM	2	23 Hari	11.897,4	
		02 - <i>System Average Interruption Duration Index</i> (SAIDI)	2	5 Jam/Pelanggan/Tahun			
		02 - Terlaksananya pembangunan pipa gas bumi	01 - Panjang Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi yang Difasilitasi (kumulatif)	2	16.300 km		
PRO-P	05.04.03.01 - Peningkatan Keandalan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya peningkatan keandalan infrastruktur energi	01 - Jumlah Rekomendasi Keprospekan Migas	2	4 Rekomendasi Kebijakan	11.360,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		02 - Terlaksananya peningkatan keandalan infrastruktur ketenagalistrikan	01 - Jumlah Penambahan Kapasitas Pembangkit	2	3.443 MW		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.29 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah Penambahan Transmisi	2	4.632,10/7 510 kms/MVA		
PRO-P	05.04.03.02 - Pembangunan Kilang Minyak Bumi	01 - Terlaksananya Pembangunan Kilang Minyak Bumi	01 - Jumlah peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (kumulatif)	2	1.176 Ribu BOPD	537,1 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PP	05.05 - Transformasi Digital	01 - Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	01 - Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK (%)	1, 2, dan 5	8,80 %	20.278 665,0
			02 - Persentase pengguna internet	2	79,20 %	
			03 - Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	2	73 %	
KP	05.05.01 - Penuntasan Infrastruktur TIK	01 - Terlaksananya penuntasan infrastruktur TIK	01 - Persentase desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan <i>mobile broadband</i>	2	99 % (Kumulatif)	16.291.534,7
			02 - Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik	2	42,85 % (Kumulatif)	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.30 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		03 - Persentase rasio harga layanan <i>fixed broadband</i> terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan <i>up to</i> 30 Mbps)	5	9 %			
		04 - Persentase rasio harga layanan <i>mobile broadband</i> terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB)	5	0,35 %			
		05 - Persentase populasi yang terlayani penyiaran radio publik	2	93 %			
		06 - Persentase jangkauan populasi penyiaran TV digital	2 dan 5	70 %			
PRO-P	05.05.01.01 - Pengembangan Infrastruktur Pitallebar	01 - Terlaksananya pengembangan infrastruktur pitallebar	01 - Jumlah desa di wilayah 3T yang mendapatkan akses seluler 4G	2	8.226 Desa (kumulatif)	13.943.450,3	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PRO-P	05.05.01.02 - Pengembangan Infrastruktur Penyiaran	01 - Terlaksananya pengembangan infrastruktur penyiaran	01 - Jumlah <i>transmitter</i> digital yang terbangun	2	15 Lokasi Satuan Transmisi	551.790,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
PRO-P	05.05.01.03 - Pengembangan Infrastruktur TIK Pemerintahan	01 - Terlaksananya pengembangan infrastruktur TIK pemerntahan	01 - Persentase K/L/D yang menggunakan/terhubung Jaringan Intra Pemerintah (JIP/ <i>Government Network</i>)	2	40 %	1.796.293,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.31 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
KP	05.05.02 - Pemanfaatan Infrastruktur TIK	01 - Terwujudnya pemanfaatan infrastruktur TIK	01 - Persentase kontribusi sektor TIK terhadap PDB	5	4,5-5,7 %	1.356.410,9	
			02 - Persentase K/L/D yang memiliki layanan publik terintegrasi	5	80 %		
PRO-P	05.05.02.01 - Pemanfaatan TIK Layanan Pemerintah	01 - Terlaksananya pemanfaatan TIK layanan pemerintah	01 - Jumlah aplikasi generik yang dikembangkan secara <i>multiplatform</i>	5	12 % (kumulatif)	932.227,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT), KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.32 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	05.05.02.02 - Pemanfaatan TIK Layanan Masyarakat dan Duma Usaha	01 - Terlaksananya pemanfaatan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha	01 - Jumlah <i>startup</i> aktif yang terbentuk	5	90 Start up	424.183,1	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN AGAMA, PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KP	05.05.03 - Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	01 - Tersedianya fasilitas pendukung transformasi digital	01 - Jumlah peserta pelatihan digital <i>skill</i> untuk menuju ekonomi digital	1	50.000 Peserta	2.630.719,4	
PRO-P	05.05.03 01 - Pengelolaan Informasi secara Aman dan Terintegrasi	01 - Terlaksananya pengelolaan informasi secara aman dan terintegrasi	01 - Jumlah konten negatif yang diblokir	1 dan 5	175.000 konten negatif	1 118 854,7	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, BADAN INTELIJEN NEGARA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERTAHANAN



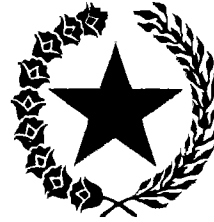
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.33 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	05.05.03 02 - Pengembangan Literasi dan Keahlian TIK	01 - Terlaksananya pengembangan literasi dan keahlian TIK	01 - Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	1	5.000.000 Orang	1.309.682,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PRO-P	05.05.03.03 - Pengembangan dan Fasilitas Industri TIK	01 - Terlaksananya pengembangan dan fasilitas industri TIK	01 - Persentase pengembangan laboratorium BBPPT sebagai pusat TIK	1	50 %	202.182,1	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional,
- 2) Rincian pada masing-masing prioritas nasional masih terus akan dilakukan penajaman dan pendalaman kesiapan pelaksanaan. Beberapa proyek yang masih terpusat (alokasi dan lokusnya) akan terus dipertajam alokasi dan distribusi lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota nya. Untuk proyek yang mendukung lintas PP/KP/ProP dalam 1 PN, alokasi hanya di munculkan 1 (satu) kali;
- 3) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L dan KPBU, belum mencakup dukungan Transfer Ke Daerah dan Badan Usaha (BUMN/Swasta). Identifikasi dan integrasi antar instansi dan sumber pendanaan (K/L, Transfer Ke Daerah, KPBU dan Badan Usaha) akan terus dilakukan sampai dengan Pemutakhiran RKP dan APBN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.1 -

PRIORITAS NASIONAL 6 : MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PN	06 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01 - Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	01 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,22 nilai	7.355.748,7	
		02 - Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim	01 - Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB	0,91 %		
		03 - Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap <i>baseline</i>	01 - Persentase penurunan emisi GRK	26,87 %		
			02 - Persentase penurunan intensitas emisi GRK	21,54 %		
PP	06 01 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut	01 - Indeks Kualitas Air (IKA)	55,30 nilai	2.453.622,5	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.2 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	5	59,50 nilai		
		03 - Indeks Kualitas Udara (IKU)	5	84,30 nilai		
		04 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	5	63,50 nilai		
KP	06.01 01 - Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Menurunnya potensi kejadian pencemaran dan kerusakan SDA dan LH	01 - Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan	5	1.141 Lokasi	1.424.349,8
		02 - Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terpantau memenuhi baku mutu lingkungan hidup	5	3.000 Perusahaan		
		03 - Luas area dengan nilai konservasi tinggi yang dipertahankan secara nasional	5	70 Juta Ha		
		04 - Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari <i>baseline</i>	5	2,0 %		
		05 - Luas kawasan konservasi	5	27 Juta Ha		
		06 - Luas kawasan konservasi perairan	5	25,1 Juta Ha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.3 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		07 - Akurasi Informasi meteorologi	5	78 %			
		08 - Akurasi Informasi klimatologi	5	77 %			
PRO-P	06.01.01.01 - Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	01 - Tersedianya data kualitas air, air laut, dan udara	01 - Jumlah penambahan alat pemantauan kualitas air sungai dan danau secara otomatis	5	175 unit	432 770,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
			02 - Jumlah penambahan alat pemantauan kualitas udara ambien secara otomatis	5	31 unit		
			03 - Jumlah lokasi pemantauan kualitas air laut secara manual	5	34 provinsi		
PRO-P	06.01.01.02 - Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	01 - Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	01 - Jumlah badan usaha yang terpantau memenuhi baku mutu emisi	5	3.000 Badan Usaha	11.600,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			02 - Jumlah badan usaha yang terpantau memenuhi baku mutu air limbah	5	3.000 Badan Usaha		
			03 - Jumlah pelabuhan yang terpantau melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut	5	30 Pelabuhan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.4 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		04 - Jumlah badan usaha tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya	5	90 Badan Usaha			
		05 - Jumlah badan usaha yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut	5	400 Badan Usaha			
		06 - Jumlah lokasi pengawasan terhadap <i>effluent</i> IPAL, IPLT, dan <i>leachate</i> TPA	5	40 Kab/Kota			
PRO-P	06.01.01.03 - Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim	01 - Tersedianya informasi cuaca dan iklim	01 - Persentase informasi meteorologi yang berkualitas	5	88 %	488.778,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
			02 - Persentase informasi klimatologi yang berkualitas	4 dan 5	80 %		
PRO-P	06.01.01.04 - Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	01 - Menurunnya angka kejadian kebakaran lahan dan hutan	01 - Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan	5	1.200 desa	401.748,8	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
			02 - Jumlah kawasan hidrologi gambut yang memiliki infrastruktur tata air adaptif kekeringan/neraca air yang semakin membaik dalam suatu KHG	5	150 KHG		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.5 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	06.01.01.05 - Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup	01 - Jumlah lembaga/komunitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	1	840 unit	9.260,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			02 - Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	5	15 Produk		
PRO-P	06.01.01.06 - Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	01 - Terlaksananya pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem	01 - Luas hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	5	65 juta hektar	67 808,8	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI), KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			02 - Luas kawasan konservasi	5	27 juta hektar		
			03 - Luas kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang operasional	5	17,5 juta hektar		
			04 - Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan	5	16 jenis		
			05 - Jumlah unit perlindungan kehati di luar kawasan konservasi yang dibentuk dalam rangka pencegahan kehilangan kehati dan kerusakan ekosistem	5	39 unit		
			06 - Jumlah Kebun Raya Daerah yang Dikembangkan	5	2 unit		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.6 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	06.01.01.07 - Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	01 - Tersedianya data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem	01 - Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	5	70 juta hektar	12.384,2	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI), KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERTANIAN
KP	06.01.02 - Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya respons cepat dalam mengurangi intensitas kerusakan SDA dan LH	01 - Jumlah sampah yang terkelola secara nasional	5	68,5 Juta Ton	366.323,3	
			02 - Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut dari <i>baseline</i>	5	40 %		
			03 - Jumlah limbah B3 yang terkelola	5	107,99 Juta Ton		
			04 - Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari <i>baseline</i> 4.546.946,30 kg BOD/hari	5	0,039 %		
PRO-P	06.01.02.01 - Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	01 - Tertanganinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	01 - Jumlah lokasi pengendalian pencemaran pesisir dan laut dari tumpahan minyak dan sumber pencemar lainnya	5	62 lokasi	44.253,7	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
			02 - Jumlah fasilitas pengolahan air limbah terbangun	5	70 unit		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.7 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	06.01.02.02 - Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	01 - Terkelolanya timbulan sampah rumah tangga dan sampah plastik melalui pengurangan dan penanganan timbulan sampah	01 - Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional	5	17,99 juta ton	48.041,7	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
			02 - Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional	5	50,52 juta ton		
PRO-P	06.01.02.03 - Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	01 - Meningkatnya kualitas lingkungan melalui pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri	01 - Persentase penghapusan merkuri dari <i>baseline</i> tahun 2019 sebanyak 50 ton di 180 kab/kota di 30 provinsi	5	20 %	32.022,6	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
			02 - Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin	5	12 unit		
PRO-P	06.01.02.04 - Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu	01 - Meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis	01 - Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 secara terpadu yang terbangun	5	1 unit	242.005,4	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KPBU), KEMENTERIAN KESEHATAN
			02 - Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan	5	8 unit		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.8 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
KP	06.01.03 - Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut	5	325.000 hektar	409.959,3	
			02 - Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan secara nasional	5	310.000 Ton		
			03 - Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan	5	22 Lokasi		
			04 - Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya	5	25 Jenis		
PRO-P	06.01.03.01 - Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	01 - Terlaksananya restorasi dan pemulihan lahan gambut	01 - Luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	5	300.000 hektar	22.000,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			02 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat	5	25.000 hektar		
PRO-P	06.01.03.02 - Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	01 - Terlaksananya pemulihan lahan bekas tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3	01 - Luas lahan bekas tambang yang dipulihkan dan direklamasi secara nasional	5	7.140 Hektar	85.566,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.9 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		02 - Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan industri yang terpulihkan	5	250.000 Ton			
PRO-P	06.01.03.03 - Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	01 - Terlaksananya pemulihan kerusakan lingkungan pesisir dan laut	01 - Jumlah kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang dipulihkan	5	22 lokasi	8.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PRO-P	06.01.03.04 - Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah	01 - Terlaksananya pemulihan habitat spesies terancam punah	01 - Jumlah luas kawasan konservasi yang ditangani permasalahannya	5	1,8 juta hektar	61.825,8	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)
PRO-P	06.01.03.05 - Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	01 - Terlaksananya peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar terancam punah	01 - Jumlah luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	5	39,7 juta hektar	232.567,2	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)
KP	06.01.04 - Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	5	65 %	252.990,0	
		02 - Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	5	427 Kasus			
		03 - Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	5	2.150.000 hektar			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.10 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		04 - Jumlah daerah yang memiliki Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5	7 Daerah			
PRO-P	06.01.04 01 - Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	01 - Terlaksananya penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah	01 - Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tervalidasi kelayakannya dan terjamin kualitasnya berbasis dokumen daya dukung daya tampung	5	30 kajian	12.458,6	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PRO-P	06.01.04.02 - Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Terlaksananya penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK	5	1.700 Badan Usaha	132.278,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah provinsi dan kab/kota yang mampu menerapkan sistem izin lingkungan yang berfokus pada penurunan beban pencemar lingkungan hidup dengan berbasis sistem informasi dalam rangka mendukung Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/OSS	5	100 provinsi/kab/kota			
		03 - Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	5	440 operasi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.11 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	06.01.04.03 - Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Terlaksananya penguatan mekanisme pidana, perdata, dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Jumlah kasus pidana LHK yang terselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	5	315 perkara	108.253,4	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, MAHKAMAH AGUNG, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
			02 - Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	5	112 perkara		
PP	06.02 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	01 - Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	01 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana	5	0,1 %	3.604.271,9	
			02 - Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	5	0,81 %		
			03 - Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	5	4 menit		
KP	06.02.01 - Penanggulangan Bencana	01 - Meningkatnya sistem dan respons peringatan dini yang didukung oleh upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana	01 - Rasio investasi PRB terhadap APBN	5	0,77 Rasio	2.191.396,3	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.12 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		02 - Persentase kelengkapan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologis dan tektonis	2	94 %			
PRO-P	06.02 01.01 - Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana	01 - Terlaksananya penguatan data, informasi, dan literasi bencana	01 - Jumlah layanan data dan informasi bencana yang akurat	4	5 layanan	513.304,6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KESEHATAN
		02 - Jumlah forum konsolidasi data, informasi, dan pengetahuan	4	15 kegiatan			
		03 - Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana	1	100 kegiatan			
PRO-P	06.02.01.02 - Penguatan Sistem, Regulasi, dan Tata Kelola Bencana	01 - Meningkatnya kualitas Sistem, Regulasi, dan Tata Kelola Bencana yang saling bersinergi	01 - Jumlah penyusunan kajian untuk regulasi dan tata kelola bencana	4	14 Kajian	4.000,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
		02 - Jumlah sistem kebencanaan yang dikembangkan	2	3 sistem			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.13 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	06.02.01.03 - Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan	01 - Meningkatnya kualitas sarana prasarana kebencanaan	01 - Jumlah kab/kota yang memiliki standar minimal peralatan dan logistik kebencanaan	3	250 Kab/Kota	147.078,2	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
			02 - Persentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai	2	75 %		
PRO-P	06.02.01.04 - Integrasi Kerja sama Kebijakan dan Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana	01 - Terlaksananya integrasi kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana	01 - Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana	1	50 kajian	3 145,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
			02 - Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana dan pascabencana	5	55 Dokumen		
PRO-P	06 02.01.05 - Penguatan Penanganan Darurat Bencana	01 - Terlaksananya penguatan penanganan darurat bencana	01 - Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana per 100.000 jiwa	1	0,2 jiwa	407.002,1	KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KESEHATAN
			02 - Persentase waktu respons penanganan darurat kurang dari 24 Jam	1	100 %		
PRO-P	06.02.01.06 - Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Terdampak Bencana	01 - Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana	01 - Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	2	90 %	15.409,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
			02 - Kenaikan ketahanan di daerah pascabencana	1	5 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.14 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	06.02.01.07 - Penguatan Sistem Mitigasi Multiancamanan Bencana Terpadu	01 - Menguatnya sistem mitigasi multiancamanan bencana terpadu	01 - Jumlah Sistem Mitigasi Multiancamanan Bencana (MHEWS) Terpadu	2	1 sistem	1.101.456,8	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI), KEMENTERIAN DALAM NEGERI
			02 - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana	1	200 kelompok		
			03 - Jumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi multi ancaman bencana	1	514 kab/kota		
			04 - Kenaikan Indeks Kesiapsiagaan Bencana	1	0,0048 indeks		
KP	06.02.02 - Peningkatan Ketahanan Iklim	01 - Menurunnya potensi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas	01 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kelautan dan pesisir	5	0,543 %	1.412.875,6	
			02 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor air	5	0,045 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.15 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		03 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor pertanian	5	0,156 %			
		04 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kesehatan	5	0,062 %			
PRO-P	06.02.02.01 - Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	01 - Meningkatnya ketahanan sektor kelautan dan pesisir terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Jumlah kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	5	12 kawasan	73.696,7	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
		02 - Jumlah pelabuhan yang memperoleh layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang dengan akurasi lebih dari 80 persen	5	20 pelabuhan			
		03 - Panjang tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan	2	37 km			
PRO-P	06.02.02.02 - Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	01 - Meningkatnya ketahanan sektor air terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Tambahan debit air baku di kawasan Rawan Air	2	4 m ³ /detik	1.147.565,5	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.16 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		02 - Jumlah wilayah sungai yang ditingkatkan ketahanan infrastruktur vitalnya terhadap risiko bencana dan perubahan iklim	2	20 Wilayah Sungai			
		03 - Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air	5	30.000 hektar			
PRO-P	06.02.02.03 - Perhdungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim	01 - Meningkatnya ketahanan sektor pertanian terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Jumlah unit bangunan konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian	2	200 unit	71.960,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Jumlah penyuluh pertanian dan petani yang meningkat pemahaman iklim melalui sekolah lapang iklim	5	1.450 orang			
PRO-P	06.02.02.04 - Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim	01 - Meningkatnya ketahanan sektor kesehatan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan Kabupaten/kota sehat (KKS)	1	280 Kab/Kota	119 653,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
PP	06.03 - Pembangunan Rendah Karbon	01 - Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan	01 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi	5	10,58 %	1.297.854,2	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.17 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		02 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor lahan	5	39,55 %			
		03 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor limbah	5	35,75 %			
		04 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor IPPU	5	17,87 %			
		05 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor pesisir dan kelautan	5	6,80 %			
KP	06.03.01 - Pembangunan Energi Berkelanjutan	01 - Meningkatnya keberlanjutan pengelolaan energi	01 - Porsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi nasional	5	15,7 %	77.854,8	
		02 - Intensitas energi primer	5	136,6 SBM/Rp Miliar			
		03 - Penurunan intensitas energi final	5	0,9 SBM/Rp Miliar			
PRO-P	06.03.01.01 - Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	01 - Meningkatnya pembangunan pembangkit dan penggunaan Energi Baru Terbarukan	01 - Kapasitas tambahan terpasang pembangkit EBT	2	1.921,8 MW	71.559,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		02 - Pemanfaatan <i>biofuel</i> untuk Domestik	5	14,2 Juta kilo liter			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.18 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	06.03.01.02 - Efisiensi dan Konservasi Energi	01 - Meningkatnya efisiensi dan konservasi energi	01 - Jumlah peralatan yang disusun SKEM-nya	5	1 Peralatan	6.295,8	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KP	06.03.02 - Pemulihan Lahan Berkelanjutan	01 - Meningkatnya keberlanjutan pemulihan lahan	01 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut	5	325.000 Hektar	1.013.297,6	
			02 - Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional	5	434.000 hektar		
			03 - Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	5	80 %		
PRO-P	06.03.02.01 - Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut	01 - Meningkatnya upaya restorasi dan pemulihan lahan gambut	01 - Luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	5	300.000 Hektar	-	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			02 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat	5	25.000 hektar		
PRO-P	06.03.02.02 - Rehabilitasi Hutan Lahan dan Reforestasi	01 - Meningkatnya upaya rehabilitasi hutan lahan dan reforestasi	01 - Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional	5	433.000 hektar	22.474,4	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PRO-P	06.03.02.03 - Pengurangan Laju Deforestasi	01 - Berkurangnya laju deforestasi	01 - Penurunan laju deforestasi	5	380.000 ha/tahun	210.325,2	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PRO-P	06.03.02.04 - Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	01 - Terlaksananya optimasi lahan pertanian	01 - Jumlah optimasi lahan pertanian	5	100.000 hektar	780.498,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
KP	06.03.03 - Pengelolaan Limbah	01 - Meningkatnya pengelolaan limbah	01 - Jumlah sampah yang dikelola secara nasional	5	68,5 juta ton	196.201,8	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.19 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	06 03.03.01 - Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	01 - Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga	01 - Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional	5	17,99 juta ton	196.201,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			02 - Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional	5	50,52 juta ton		
KP	06.03.04 - Pengembangan Industri Hijau	01 - Meningkatnya keberlanjutan industri	01 - Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	5	9 %	10.500,0	
PRO-P	06 03.04.01 - Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi	01 - Meningkatnya penerapan proses dan teknologi yang lebih hijau	01 - Jumlah rancangan standar penurunan emisi GRK dan limbah B3 sektor industri	5	24 rancangan standar (akumulasi)	10.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KP	06.03.05 - Rendah Karbon Pesisir dan Laut	01 - Meningkatnya pemulihan ekosistem pesisir dan kelautan	01 - Jumlah luas rehabilitasi hutan <i>mangrove</i>	5	11.250 hektar	-	
PRO-P	06.03.05.01 - Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan	01 - Meningkatnya upaya inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan	01 - Jumlah lokasi pemulihan kerusakan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil	5	22 lokasi	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- 2) Rincian pada masing-masing prioritas nasional masih terus akan dilakukan penajaman dan pendalaman kesiapan pelaksanaan. Beberapa proyek yang masih terpusat (alokasi dan lokusnya) akan terus dipertajam alokasi dan distribusi lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota nya. Untuk proyek yang mendukung lintas PP/KP/ProP dalam 1 PN, alokasi hanya di munculkan 1 (satu) kali;
- 3) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L dan KPBU, belum mencakup dukungan Transfer Ke Daerah dan Badan Usaha (BUMN/Swasta). Identifikasi dan integrasi antar instansi dan sumber pendanaan (K/L, Transfer Ke Daerah, KPBU dan Badan Usaha) akan terus dilakukan sampai dengan Pematuhiran RKP dan APBN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.1 -

PRIORITAS NASIONAL 7 : MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PN	07 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	01 - Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	01 - Indeks Demokrasi Indonesia	77,72 Nilai	38.945 643,6	
			02 - Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	75 %		
		02 - Optimalnya kebijakan luar negeri	01 - Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional	96,30 Nilai		
		03 - Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap	01 - Indeks Pembangunan Hukum	0,69 Nilai		
		04 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik	01 - Indeks Pelayanan Publik	4,29 Nilai		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.2 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	01 - Persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya	100 %		
PP	07.01 - Konsolidasi Demokrasi	01 - Terwujudnya stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif	01 - Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	5	75,40 Skor	1.749.149,8
			02 - Skor IDI Variabel Kebebasan	5	83,00 Skor	
			03 - Skor IDI Variabel Kesenjangan	5	78,82 Skor	
			04 - Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik (dokumen)	3	2 Dokumen	
KP	07.01.01 - Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	01 - Terwujudnya stabilitas politik yang kondusif melalui penguatan kapasitas lembaga demokrasi	01 - Kaderisasi oleh partai politik peserta pemilu	4	74,6 Skor	1.016.885,0
PRO-P	07.01.01.01 - Penguatan Penyelenggara Pemilu	01 - Terwujudnya penguatan penyelenggara pemilu	01 - Jumlah satker yang difasilitasi dalam penguatan penyelenggara pemilu	4	549 Satker	883.209,7 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.3 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	07.01.01.02 - Penguatan Peraturan Perundangan Bidang Politik	01 - Menguatnya peraturan perundangan bidang politik	01 - Jumlah rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri	3	2 Rekomendasi Kebijakan	1.100,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRO-P	07.01.01.03 - Peningkatan Bantuan Keuangan Partai Politik	01 - Meningkatnya bantuan keuangan partai politik	01 - Jumlah partai politik yang mendapat bantuan keuangan	1	9 Lembaga	126.376,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRO-P	07.01.01.04 - Penguatan Demokrasi Internal, Transparansi, dan Akuntabilitas Partai Politik	01 - Menguatnya demokrasi internal, transparansi, dan akuntabilitas partai politik	01 - Jumlah pengurus parpol yang mendapat pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila	1	100 Orang	4.498,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
			02 - Jumlah rekomendasi kebijakan terkait politik dalam negeri	4	4 Rekomendasi Kebijakan		
PRO-P	07.01.01.05 - Penguatan Demokrasi di Daerah	01 - Menguatnya demokrasi di daerah	01 - Jumlah fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	1	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.700,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KP	07.01.02 - Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan	01 - Terwujudnya stabilitas politik yang kondusif melalui penguatan kesetaraan dan kebebasan	01 - Terbebas dari ancaman dan/penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berkeyakinan	4	93,85 Skor	4.550,0	
			02 - Keterwakilan perempuan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif	4	60,8 Skor		
PRO-P	07.01.02.01 - Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih	01 - Terselenggaranya pendidikan politik dan pendidikan pemilih yang tepat sasaran dan berkelanjutan	01 - Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu	4	Skor	2.400,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.4 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	07.01.02.02 - Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kepemiluan	01 - Terselenggaranya penguatan pengawasan netralitas ASN	01 - Netralitas penyelenggara pemilu	4	Skor	1.500,0	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PRO-P	07.01.02.03 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	01 - Meningkatnya kapasitas organisasi kemasyarakatan	01 - Jumlah pengurus ormas yang mengikuti fasilitasi peningkatan kapasitas	1	250 Kelompok Masyarakat	650,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KP	07 01 03 - Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	01 - Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif	01 - Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	1	71 %	727.714,8	
			02 - Persentase konten informasi publik yang berkualitas	1	85 %		
			03 - Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional	1	50.000 Orang		
PRO-P	07.01.03.01 - Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah	01 - Terlaksananya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah	01 - Tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik	3	2 Dokumen	27.836,1	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PRO-P	07.01.03.02 - Penyediaan Konten dan Akses Informasi Publik secara Merata dan Berkeadilan terutama di Wilayah 3T	01 - Tersedianya konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan terutama di wilayah 3T	01 - Persentase tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap informasi publik	1	65 %	141.567,7	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.VII.5 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	07.01.03.03 - Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	01 - Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika	01 - Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional	1	50.000 Orang	506.595,7	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PRO-P	07.01.03.04 - Peningkatan Literasi TIK Masyarakat	01 - Terlaksananya peningkatan literasi TIK masyarakat	01 - Jumlah masyarakat yang mendapat pengenalan TIK	1	2.500 Orang	2.554,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PRO-P	07.01.03.05 - Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika	01 - Terlaksananya penelitian strategis bidang komunikasi dan informatika	01 - Jumlah penelitian strategis bidang komunikasi dan informatika	4	1 Dokumen	1.500,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PRO-P	07.01.03.06 - Penguatan Peran Lembaga Pers dan Jurnalis	01 - Terlaksananya penguatan peran lembaga pers dan jurnalis	01 - Indeks Kemerdekaan Pers	1	76 Nilai	23.106,7	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PRO-P	07.01.03.07 - Peningkatan Kualitas Lembaga Penyiaran	01 - Terlaksananya peningkatan kualitas lembaga penyiaran	01 - Jumlah lembaga penyiaran yang berkualitas	1	58 Lembaga Penyiaran	24.553,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PP	07.02 - Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	01 - Meningkatnya efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional	01 - Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral	5	13 Forum	357.468,8	
			02 - Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	1	3,90 Nilai		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.6 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		03 - Indeks Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI	1	88,00 Nilai			
KP	07.02.01 - Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	01 - Menguatnya integritas NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri	01 - Persentase penyelesaian kasus WNI dan BHI di luar negeri	1	35,20 %	260.771,4	
		02 - Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim	2	49,01 Nilai			
PRO-P	07.02.01 01 - Peningkatan dan Intensifikasi Efektivitas Penyelesaian Perbatasan dan Percepatan Pemetaan Batas Negara	01 - Terlaksananya penyelesaian perbatasan dan percepatan pemetaan batas negara	01 - Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang perundingan penegasan batas darat, peningkatan kerja sama perbatasan dan peningkatan kerja sama kelautan yang diselesaikan	2	100 %	17.633,7	KEMENTERIAN LUAR NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRO-P	07.02.01.02 - Penguatan Perlindungan WNI dan BHI di Tingkat Bilateral, Regional, Multilateral	01 - Terlaksananya penguatan perlindungan WNI dan BHI di tingkat bilateral, regional, multilateral	01 - Persentase kasus khusus yang diselesaikan	1	57,20 %	243.137,7	KEMENTERIAN LUAR NEGERI, BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI), KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
		02 - Persentase kasus umum yang diselesaikan	1	30,80 %			
KP	07.02.02 - Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional	01 - Terlaksananya penguatan kerja sama pembangunan internasional	01 - Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular	5	115 Program/Kegiatan	53.005,4	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.7 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	07.02.02.01 - Peningkatan Penggunaan Sumber-Sumber dan Mekanisme Pendanaan Baru Kerja Sama Pembangunan Internasional	01 - Terlaksananya peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru kerja sama pembangunan internasional	01 - Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSSST	5	154 Rp Miliar	50.305,4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, SEKRETARIAT NEGARA, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P	07.02.02.02 - Penciptaan Lingkungan yang Mendukung (<i>Enabling Environment</i>) Peningkatan Keterlibatan Swasta dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional	01 - Terciptanya lingkungan yang mendukung (<i>enabling environment</i>) peningkatan keterlibatan swasta dalam kerja sama pembangunan internasional	01 - Tingkat partisipasi aktor nonpemerintah dalam kegiatan kerja sama pembangunan internasional	5	2,65-2,74 %	2.700,0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS
KP	07.02.03 - Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional	01 - Meningkatnya citra positif di dunia internasional	01 - Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI	5	86 %	1.545,0	
PRO-P	07.02.03.01 - Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik dan Turunannya	01 - Tersusunnya kebijakan diplomasi publik dan turunannya	01 - Persentase dukungan konstituen internasional terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia	5	98 %	1.545,0	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
KP	07.02.04 - Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global	01 - Meningkatnya peran Indonesia di tingkat regional dan global	01 - Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri multilateral	5	97 %	42.147,0	
PRO-P	07.02.04.01 - Peningkatan Inisiatif/Posisi Indonesia yang Diterima	01 - Meningkatnya inisiatif/posisi Indonesia yang diterima	01 - Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan dalam forum kerja sama multilateral	5	270 Rekomendasi/Prakarsa	40.091,9	KEMENTERIAN LUAR NEGERI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.8 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	07.02.04.02 - Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB	01 - Terlaksananya optimalisasi kontribusi Indonesia dalam jajaran 10 besar negara kontributor MPP PBB	01 - Peringkat jumlah pasukan perdamaian (PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia	5	10 Peringkat	2.055,1	KEMENTERIAN LUAR NEGERI
PP	07.03 - Penegakan Hukum Nasional	01 - Meningkatnya penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan	01 - Indeks Perilaku Anti Korupsi (nilai)	4	4,06 Nilai	395.304,4	
KP	07.03.01 - Penataan Regulasi	01 - Terlaksananya penataan regulasi	01 - Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan MK dan MA	3	10,15 % dan 9,05 %	5.186,0	
PRO-P	07.03.01.01 - Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi	01 - Terbentuknya lembaga pengelola regulasi	01 - Persentase peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi	3	0,15 Nilai	1.000,0	MAHKAMAH KONSTITUSI RI
PRO-P	07.03.01.02 - Pembaruan Substansi Hukum	01 - Terlaksananya pembaruan substansi hukum	01 - Jumlah pengundangan rancangan undang-undang jangka menengah	3	1 UU	4.186,0	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KP	07.03.02 - Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	01 - Terlaksananya perbaikan sistem hukum pidana dan perdata	01 - Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek <i>enforcing contracts</i>	5	100 Peringkat	138.737,7	
			02 - Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek <i>resolving insolvency</i>	5	26 Peringkat		
			03 - Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek <i>getting credits</i>	5	26 Peringkat		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.9 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
			04 - Persentase pelaku residivis	5	7,56 %		
PRO-P	07.03.02.01 - Penyempurnaan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Kemudahan Berusaha	01 - Terlaksananya penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha	01 - Persentase eksekusi putusan perdata	5	15 %	7.735,9	MAHKAMAH AGUNG, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
PRO-P	07.03.02.02 - Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif	01 - Terlaksananya penerapan pendekatan keadilan restoratif	01 - Persentase peneanaan alternatif pemidanaan	1	15 %	81.639,4	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, MAHKAMAH AGUNG, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, KEMENTERIAN SOSIAL
PRO-P	07.03.02.03 - Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan	01 - Terwujudnya dukungan TI di bidang hukum dan peradilan	01 - Jumlah wilayah kerja instansi penegak hukum yang mengimplementasikan SPPT TI	5	212 Wilayah Kerja	30.062,4	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, MAHKAMAH AGUNG, BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN), KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK), KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
PRO-P	07.03.02.04 - Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim	01 - Terlaksananya peningkatan integritas dan pengawasan hakim	01 - Indeks Integritas Hakim	1	7,36 Nilai	19.300,0	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
KP	07.03.03 - Penguatan Sistem Anti Korupsi	01 - Terwujudnya penguatan sistem anti korupsi	01 - Survei penilaian integritas	5	72 Nilai	62.782,5	
PRO-P	07.03.03.01 - Penguatan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	01 - Terlaksananya penguatan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	01 - Persentase capaian aksi Stranas PK	5	100 %	43.345,3	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.10 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PRO-P	07.03.03.02 - Optimalisasi Mekanisme Pemulihan dan Pengelolaan Aset	01 - Terlaksananya optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset	01 - Jumlah Aparat Penegak Hukum yang mengikuti Diklat Pemulihan Aset	1	160 Orang	19.437,3	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK), KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK), KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KP	07.03.04 - Peningkatan Akses terhadap Keadilan	01 - Terlaksananya peningkatan akses terhadap keadilan	01 - Indeks Akses terhadap Keadilan (persen)	5	71-80 %	188.598,2	
PRO-P	07.03.04.01 - Penguatan Layanan Keadilan	01 - Terlaksananya penguatan layanan keadilan	01 - Aspek Bantuan Hukum pada Indeks Akses terhadap Keadilan (persen)	5	71-80 %	168.230,2	MAHKAMAH AGUNG, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
PRO-P	07.03.04.02 - Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat	01 - Terlaksananya pemberdayaan hukum bagi masyarakat	01 - Aspek Kemampuan Masyarakat pada Indeks Akses terhadap Keadilan	5	71-80 %	20.368,0	MAHKAMAH KONSTITUSI RI, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
PP	07.04 - Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	01 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah	01 - Indeks Reformasi Birokrasi Rata - Rata Nasional (K/L)	4	84,22 Nilai	276.779,7	
			02 - Indeks Reformasi Birokrasi Rata - Rata Nasional (Provinsi)	4	73,65 Nilai		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.11 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			03 - Indeks Reformasi Birokrasi Rata - Rata Nasional (Kab/Kota)	4	69,15 Nilai		
KP	07.04.01 - Penguatan Implementasi Manajemen ASN	01 - Terwujudnya penguatan implementasi manajemen ASN	01 - Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori Baik ke Atas (Kementerian)	4	100 %	41.200,0	
			02 - Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori Baik ke Atas (LPNK)	4	95 %		
			03 - Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori Baik ke Atas (Provinsi)	4	61,00 %		
			04 - Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori Baik ke Atas (Kabupaten/Kota)	4	20,00 %		
PRO-P	07.04.01.01 - Manajemen Talenta Nasional ASN	01 - Terbangunnya manajemen talenta nasional ASN	01 - Jumlah instansi yang menerapkan manajemen talenta ASN (K/L/Provinsi/Kab/Kota)	4	10 Instansi Pemerintah	16.200,0	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PRO-P	07.04.01.02 - Peningkatan Penerapan Sistem Merit ASN	01 - Terlaksananya peningkatan penerapan sistem merit ASN	01 - Jumlah Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori Baik ke Atas (IP)	4	162 Instansi Pemerintah	18.000,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.12 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	07.04.01.03 - Perluasan Implementasi Sistem Integritas	01 - Menurunnya pelanggaran disiplin ASN	01 - Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	4	15 %	7.000,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KP	07.04.02 - Transformasi Pelayanan Publik	01 - Terwujudnya transformasi pelayanan publik	01 - Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik (instansi)	4	150 per 587 Instansi Pemerintah	30.591,2	
PRO-P	07.04.02.01 - Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (E-Services) yang Terintegrasi	01 - Terlaksananya pelayanan publik berbasis elektronik (e-services) yang terintegrasi	01 - Tersedianya portal pelayanan publik pemerintah pusat dan daerah (portal pelayanan publik)	4	1 Sistem Informasi	2.500,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PRO-P	07.04.02.02 - Penguatan Pengawasan Masyarakat atas Kinerja Pelayanan Publik	01 - Terlaksananya penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik	01 - Jumlah laporan/ pengaduan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik yang diselesaikan	4	5.830 Laporan	24.841,2	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PRO-P	07.04.02.03 - Penguatan Ekosistem Inovasi	01 - Terlaksananya penguatan ekosistem inovasi	01 - Jumlah unit pelayanan publik (UPP) yang mereplikasi inovasi	4	500 Unit Pelayanan Publik	2.250,0	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PRO-P	07.04.02.04 - Penguatan Pelayanan Terpadu	01 - Terlaksananya penguatan pelayanan terpadu	01 - Jumlah Mal Pelayanan Publik	4	9 Mal Pelayanan Publik	1.000,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
KP	07.04.03 - Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis	01 - Tertatanya kelembagaan dan proses bisnis	01 - Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE Baik ke Atas (Kementerian/Lembaga)	4	80 %	55.252,1	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.13 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE Baik ke Atas (Provinsi)	4	60 %		
			03 - Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE Baik ke Atas (Kab/Kota)	4	30 %		
PRO-P	07.04.03.01 - Penataan Kelembagaan	01 - Terlaksananya penataan kelembagaan	01 - Jumlah instansi yang ditata kelembagaannya	4	21 Instansi Pemerintah	1.000,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PRO-P	07.04.03.02 - Penerapan SPBE Terintegrasi	01 - Meningkatnya nilai indeks domain tata kelola SPBE Nasional	01 - Nilai indeks domain tata kelola SPBE Nasional	4	2,1 Nilai Indeks	54.252,1	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KP	07.04.04 - Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	01 - Terwujudnya reformasi sistem akuntabilitas kinerja	01 - Persentase Instansi Pemerintah yang mendapatkan Opini WTP (Kementerian/Lembaga)	4	93 %	149.736,4	
			02 - Persentase Instansi Pemerintah yang mendapatkan Opini WTP (Provinsi)	4	93 %		
			03 - Persentase Instansi Pemerintah yang mendapatkan Opini WTP (Kabupaten)	4	82 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.14 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			04 - Persentase Instansi Pemerintah yang mendapatkan Opini WTP (Kota)	4	93 %		
			05 - Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor B ke atas terhadap SAKIP (Kementerian/Lembaga)	4	98,00 %		
			06 - Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor B ke atas terhadap SAKIP (Provinsi)	4	90,00 %		
			07 - Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor B ke atas terhadap SAKIP (Kabupaten/Kota)	4	65,00 %		
PRO-P	07.04.04.01 - Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi	01 - Meningkatnya kualitas kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional	01 - Jumlah rekomendasi kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional	4	9 Rekomendasi Kebijakan	5.100,0	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PRO-P	07.04.04.02 - Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	01 - Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja pembangunan	01 - Jumlah rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan	4	135 Rekomendasi	144.636,4	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
PP	07.05 - Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	01 - Terjaganya stabilitas pertahanan dan keamanan	01 - Indeks Kekuatan Militer	2	0,24 Nilai	36.166.940,9	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.15 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		02 - Indeks Terorisme Global	5	4,34 Nilai			
		03 - Persentase orang yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	3	>55 %			
		04 - Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3	3,20 Nilai			
KP	07 05.01 - Penguatan Keamanan Dalam Negeri	01 - Menguatnya keamanan dalam negeri	01 - Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)	4	38,00 Nilai	999.981,3	
			02 - Indeks Risiko Terorisme (Target)	4	54,26 Nilai		
			03 - Angka Pelanggaran Lintas Batas Negara	4	<250 Pelanggaran		
			04 - Angka Kejadian Konflik	4	45 Kejadian		
			05 - Angka Korban Pengungsi Internal	4	≤15.000 Orang		
PRO-P	07.05.01.01 - Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme	01 - Meningkatnya deradikalisasi dan penanganan terorisme	01 - Clearance rate terorisme	5	77 %	625.903,6	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT), BADAN INTELIJEN NEGARA, KEMENTERIAN SOSIAL, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
			02 - Jumlah kegiatan deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, serta orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme.	5	187 Kegiatan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.16 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			03 - Jumlah kegiatan pencegahan tindak pidana terorisme	5	139 Kegiatan		
			04 - Jumlah instansi yang berpartisipasi aktif dalam sinergisitas penanggulangan terorisme	5	44 Institusi		
PRO-P	07.05.01 02 - Pengamanan Objek Vital dan Target Rentan	01 - Terlaksananya pengamanan objek vital dan target rentan	01 - Jumlah objek vital dan target rentan yang mendapat pengamanan	5	2.179 Objek Vital dan Target Rentan	20.000,0	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PRO-P	07.05 01 03 - Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar	01 - Terlaksananya penguatan pertahanan dan keamanan di perbatasan dan pulau terluar	01 - Jumlah pos pamtas, posal, pos pol subsektor dan PLBN yang dibangun	2	56 M ²	322 849,3	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP), KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERTAHANAN
			02 - Panjang jalan inspeksi patroli perbatasan	2	200 km		
			03 - Jumlah penduduk perbatasan yang diberdayakan dalam sistem hankamor	1	180 Orang		
			04 - Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ditingkatkan sarana prasarana pertahanan dan keamanannya	2	49 PPKT		
PRO-P	07.05.01.04 - Penanganan Konflik secara Humanis	01 - Tertanganinya konflik secara humanis	01 - Tertanggulangnya potensi konflik sosial di tingkat kabupaten	5	23 Kasus	30.067,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.17 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			02 - Jumlah anggota satuan yang mendapatkan pelatihan penanganan konflik secara humanis	1	900 Orang		
PRO-P	07.05 01.05 - Keselamatan dan Reintegrasi di Wilayah Rawan dan Bencana	01 - Terwujudnya keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan dan bencana	01 - Jumlah korban bencana yang diselamatkan	4	120 000 Orang	1.161,4	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KP	07.05.02 - Penguatan Kemampuan Pertahanan Dibarengi <i>Confidence Building Measures</i> (CBM)	01 - Terwujudnya kemampuan pertahanan yang kuat dibarengi <i>Confidence Building Measures</i> (CBM)	01 - Pemenuhan MEF	4	86 %	29.591.788,5	
			02 - Persentase kontribusi industri pertahanan	5	≥50 %		
PRO-P	07.05 02.01 - Pengadaan Alutsista	01 - Terlaksananya pengadaan alutsista	01 - Jenis alutsista yang diadakan	4	23 Jenis	12.647.179,8	KEMENTERIAN PERTAHANAN
PRO-P	07.05 02.02 - Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista	01 - Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan alutsista	01 - Jenis alutsista yang diharwat	4	20 Jenis	8.148.221,5	KEMENTERIAN PERTAHANAN
PRO-P	07 05.02.03 - Pembangunan Sarana-Prasarana Pertahanan	01 - Terlaksananya pembangunan sarana-prasarana pertahanan	01 - Jumlah sarpras pertahanan yang dibangun	2	5 Jenis	746 629,2	KEMENTERIAN PERTAHANAN
PRO-P	07.05.02.04 - Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	01 - Terwujudnya profesionalisme dan kesejahteraan prajurit yang meningkat	01 - Jumlah sarpras profesionalisme dan kesejahteraan prajurit yang dibangun	2	25 Jenis	4.863.344,5	KEMENTERIAN PERTAHANAN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.VII.18 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	07.05.02 05 - Pembangunan Pertahanan Siber	01 - Terlaksananya pembangunan pertahanan siber	01 - Jumlah sistem siber pertahanan yang dibangun	4	1 Sistem	38.720,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN
PRO-P	07 05 02 06 - Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan	01 - Jenis alpalhankam industri pertahanan yang diadakan	01 - Jenis alpalhankam industri pertahanan yang diadakan	5	5 Jenis	3.147.693,6	KEMENTERIAN PERTAHANAN
KP	07.05.03 - Penguatan Keamanan Laut	01 - Terwujudnya penguatan keamanan laut	01 - Angka pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut	4	246 Jumlah	1.117.466,7	
PRO-P	07.05.03 02 - Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut	01 - Terlaksananya operasi keamanan laut yang kuat	01 - Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i>	4	65 %	1.116.546,1	BADAN KEAMANAN LAUT, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERTAHANAN
PRO-P	07.05.03.03 - Peningkatan Penyelesaian Kasus Keamanan Laut	01 - Terwujudnya penyelesaian kasus keamanan laut yang meningkat	01 - <i>Clearance rate</i> tindak pidana laut	4	80 %	920,6	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KP	07.05.04 - Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	01 - Terwujudnya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat	01 - Angka prevalensi penyalahguna narkoba	1	1,86 %	4.286.460,6	
			02 - <i>Crime rate</i>	4	112 Orang/100.000 Penduduk		
			03 - Pelayanan publik Polri yang prima	4	64 %		
PRO-P	07.05.04.01 - Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	01 - Meningkatnya Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	01 - <i>Clearance rate</i> tindak pidana narkotika	1	87 %	200.968,1	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN), KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.19 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
		02 - Jumlah kawasan yang pulih dari tanaman terlarang	5	3 Kawasan			
PRO-P	07 05.04.02 - Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	01 - Meningkatnya pencegahan penyalahgunaan dan rehabilitasi penyalahguna narkotika	01 - Indeks Ketahanan Diri Remaja	1	52 Nilai	72.705,8	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN), KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		02 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek fisik	1	7 %			
		03 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek psikologis	1	7 %			
		04 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek hubungan sosial	1	6 %			
		05 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek sumber daya lingkungan	1	5 %			
		06 - Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi	4	3,13 Nilai			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.20 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	07.05.04.03 - Penanganan Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya	01 - Tertanganinya kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya	01 - <i>Clearance rate</i> tindak pidana TPPO serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan	4	84 %	12.999,6	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PRO-P	07.05.04.04 - Peningkatan Layanan Kepolisian yang Presisi sebagai Kelanjutan Promoter	01 - Terlaksananya peningkatan layanan kepolisian yang Presisi sebagai kelanjutan promoter	01 - Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian	4	8,3 Nilai	41.533,3	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
			02 - <i>Clearance rate</i>	4	65 %		
			03 - <i>Clearance rate</i> tindak pidana kejahatan perbankan dan TPPU	4	59 %		
PRO-P	07.05.04.05 - Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Dukungan Layanan Kepolisian	01 - Terlaksananya pengadaan almatsus dan alpalkam dukungan layanan kepolisian	01 - Jumlah almatsus dan alpalkam Kepolisian	2	6 Paket	3.308.288,1	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
			02 - Persentase almatsus dan alpalkam kontribusi industri pertahanan	5	30 %		
PRO-P	07.05.04.06 - Peningkatan Profesionalisme, dan Kesejahteraan Anggota Polri	01 - Meningkatkan profesionalisme, dan kesejahteraan anggota Polri	01 - Jumlah personel yang tersertifikasi diklat profesional	1	9.517 Personel	649.965,6	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
			02 - Jumlah unit pemenuhan rumah negara	2	603 Unit		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.21 -

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
			03 - Jumlah rumah sakit yang dibangun/meningkat akreditasinya	2	1 Unit		
			04 - Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	4	78 %		
KP	07.05.05 - Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber	01 - Terwujudnya ketahanan dan keamanan siber yang kuat	01 - Skor <i>Global Cyber Security Index</i>	1 dan 2	0,826 Nilai	171.243,8	
PRO-P	07.05.05.01 - Pembangunan dan Penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber	01 - Terlaksananya pembangunan tim cepat tanggap keamanan siber yang kuat	01 - Skor Pilar <i>Technical</i> pada <i>Global Cybersecurity Index (GCI)</i>	2	0,171 Nilai	14.290,6	BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
PRO-P	07.05.05.02 - Penguatan Infrastruktur, SDM, dan Regulasi Keamanan Siber	01 - Terlaksananya pembangunan infrastruktur, SDM, dan regulasi keamanan siber yang kuat	01 - Skor Pilar <i>Organizational</i> pada <i>Global Cybersecurity Index (GCI)</i>	4	0,133 Nilai	124.178,4	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, BADAN INTELIJEN NEGARA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
			02 - Skor Pilar <i>Technical</i> pada <i>Global Cybersecurity Index (GCI)</i>	2	0,171 Nilai		
			03 - Skor Pilar <i>Capacity Building</i> pada <i>Global Cybersecurity Index (GCI)</i>	1	0,189 Nilai		
PRO-P	07.05.05.03 - Penyelesaian Kejahatan Siber	01 - Terlaksananya penyelesaian kejahatan bidang siber	01 - <i>Clearance rate</i> tindak pidana siber	5	63 %	16.831,6	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.22 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
PRO-P	07.05.05.04 - Pencegahan Kejahatan Siber dan Peningkatan Kerja Sama Internasional Bidang Siber	01 - Terwujudnya pencegahan kejahatan siber melalui peningkatan kerja sama internasional bidang siber	01 - Skor Pilar <i>Cooperation</i> pada <i>Global Cybersecurity Index (GCI)</i>	1 dan 5	0,139 Nilai	15 943,1	BADAN INTELLJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional.
- 2) Rincian pada masing-masing prioritas nasional masih terus akan dilakukan penajaman dan pendalaman kesiapan pelaksanaan. Beberapa proyek yang masih terpusat (alokasi dan lokusnya) akan terus dipertajam alokasi dan distribusi lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota nya. Untuk proyek yang mendukung lintas PP/KP/ProP dalam 1 PN, alokasi hanya di munculkan 1 (satu) kali;
- 3) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L dan KPBU, belum mencakup dukungan Transfer Ke Daerah dan Badan Usaha (BUMN/Swasta). Identifikasi dan integrasi antar instansi dan sumber pendanaan (K/L, Transfer Ke Daerah, KPBU dan Badan Usaha) akan terus dilakukan sampai dengan Pemutakhiran RKP dan APBN

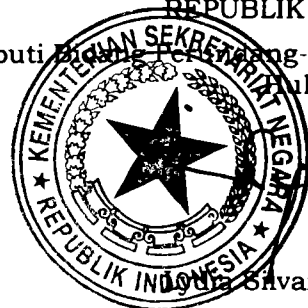
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum, Kebijakan dan Administrasi



Savanna Djaman